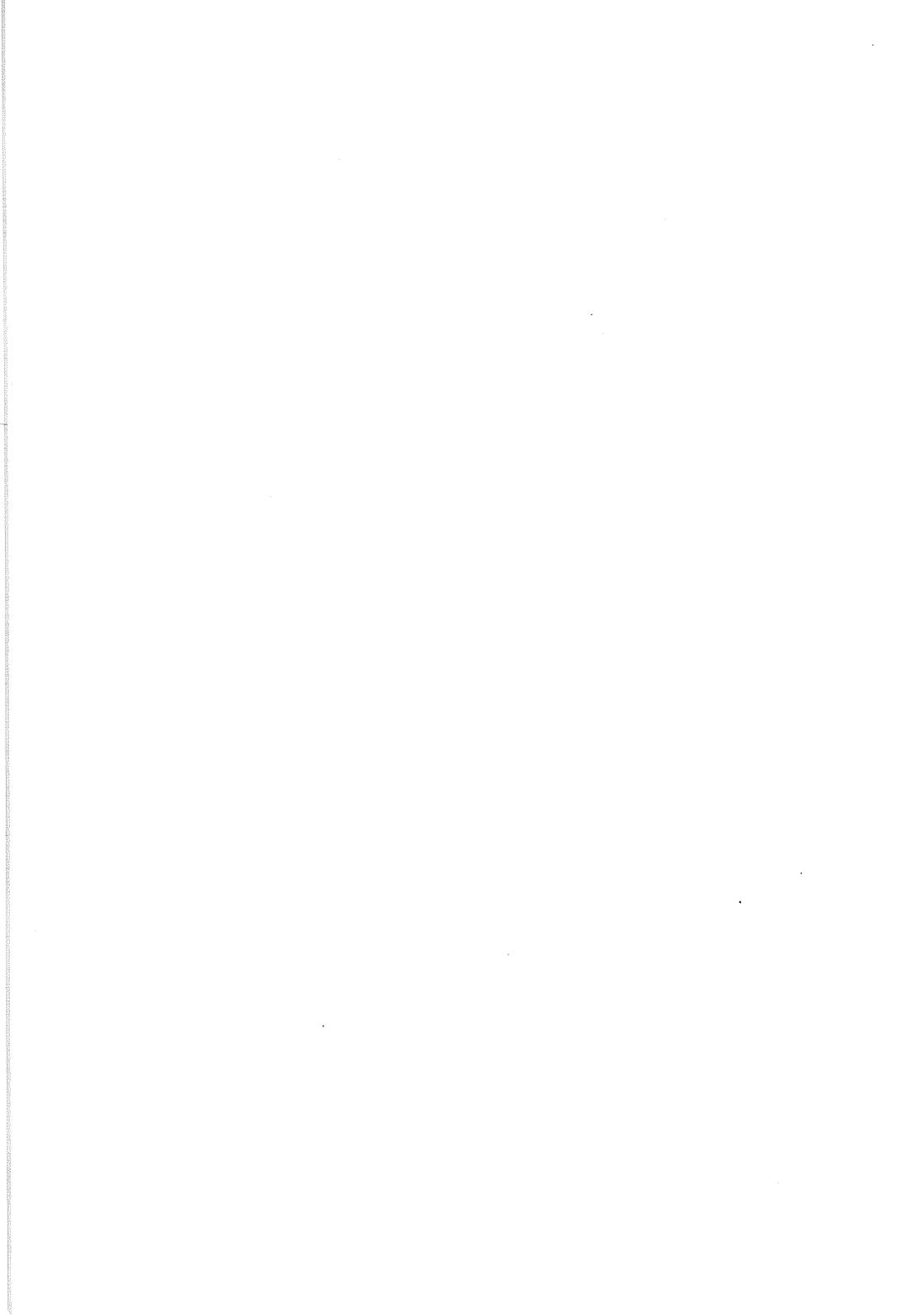


**KONDISI SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II
KASUS KABUPATEN SIKKA**

HASIL BME



**KONDISI SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II
KASUS KABUPATEN SIKKA**

HASIL BME

**DALIYO
SOEWARTOYO
SUMONO
ZAINAL FATONI**



LIPI

**COREMAP-LIPI
PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(PPK-LIPI), 2008**



COREMAP-LIPI



RINGKASAN

Secara umum penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program COREMAP di daerah dan mengumpulkan data tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Khususnya tingkat pendapatan yang dimaksudkan untuk memantau dampak COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan COREMAP di daerah.
2. Mengkaji pemahaman masyarakat tentang COREMAP.
3. Menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat untuk memantau dampak COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada hasil survei sosial-ekonomi COREMAP tahun 2006 dan survei sosial-ekonomi COREMAP tahun 2008. Data juga diperoleh dari hasil wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, data sekunder dari berbagai instansi dan observasi. Lokasi kajian di Kabupaten Sikka dan mengambil sampel di Desa Kojadoi mewakili kawasan pulau-pulau kecil dan Desa Namangkewa mewakili kawasan pantai di daratan.

Program COREMAP Fase I di Desa Kojadoi dan Namangkewa sudah masuk sejak tahun 1999/2000 dan berakhir pada tahun 2003. Berbagai masalah dan keberhasilan telah muncul di desa-desa kajian. Program tersebut kemudian dilanjutkan pada COREMAP Fase II yang berlangsung dari tahun 2004 – 2009. Pada saat kajian dilakukan (pertengahan tahun 2008) COREMAP Fase II telah menginjak tahun yang ke empat. Beberapa program kegiatan telah dilakukan, namun juga banyak program yang belum berjalan karena adanya beberapa masalah dan kendala.

Implementasi program COREMAP Fase II di Desa Kojadoi dan Namangkewa sampai pertengahan tahun 2008 belum berjalan sebagaimana mestinya. Namun kegiatan pembetukan LPSTK dan

pembentukan Pokmas-Pokmas sudah dilakukan pada tahun 2006 (di Kojadoi bulan November 2006 dan di Namangkewa bulan Januari 2006). Penyusunan RPSTK baik di Kojadoi dan Namangkewa telah dilakukan November 2007 serta telah disosialisasikan pada Desember 2007. Pembentukan Pokmas-Pokmas sudah dilakukan tahun 2007, namun sebagian besar Pokmas tersebut belum mempunyai kegiatan yang maksimal. Hal tersebut disebabkan berbagai kendala seperti : masih kurangnya pelatihan-pelatihan untuk kegiatan Pokmas, belum turunnya dana operasional dan belum cairnya dana bergulir untuk penguatan modal usaha dari COREMAP Fase II.

Program COREMAP Fase II yang telah direalisasikan adalah berupa program *Village Grant*. Program tersebut menggunakan dana tahun anggaran 2007. Program tersebut khusus untuk membantu pembangunan fisik desa yang sesuai dengan aspirasi penduduk. Masing-masing desa mendapat bantuan sebesar Rp 75 juta. Realisasi penggunaan dana *Village Grant* tersebut di Kojadoi pada awal 2008 yang digunakan untuk membangun MCK, sarana air bersih dan mesin listrik. Hasil program ini telah dinikmati oleh sebagian besar penduduk. Dalam tahun anggaran yang sama (2007) COREMAP Fase II juga memberikan dana Rp 10 juta untuk membangun pondok informasi. Realisasi penggunaan dan pembangunan pondok informasi di Kojadoi pada awal tahun 2008. Namun perlengkapan pondok informasi (inventaris meja, kursi, buku-buku, pamlet) masih sangat kurang. Sedangkan program yang lain termasuk Pokmas-Pokmas baru yang telah dibentuk dalam COREMAP Fase II belum ada kegiatan, kecuali Pokmaswas yang secara mandiri sudah mulai ada kegiatan pengawasan DPL.

Sebagaimana di Desa Kojadoi, di Desa Namangkewa program COREMAP Fase II yang telah direalisasikan dari program *Village Grant* yang dananya juga dari tahun anggaran 2007. Program tersebut juga berupa pembangunan fisik, namun jenis pembangunannya berupa pembuatan bak penampungan air bersih dan pipanisasi air bersih. Jumlah dana yang dikucurkan juga sebanyak Rp 75 juta. Sampai pertengahan 2008 pembangunan bak penampungan air sudah dibangun, sementara pipanisasi belum selesai. Hasil

program ini sampai saat kajian belum dapat dinikmati oleh penduduk. Pondok informasi pada awal 2008 di Desa Namangkewa sudah terbangun. Namun perlengkapan pondok informasi masih sangat kurang. Kemudian Pokmas-Pokmas juga sudah terbentuk namun belum ada kegiatan yang dilakukan.

Implementasi kegiatan program COREMAP Fase II apabila dilihat dari pendapatan dengan membandingkan kajian tahun 2006 dengan tahun 2008 dapat dikatakan belum berhasil. Kegiatan program COREMAP Fase II yang berkaitan pengembangan ekonomi belum ada. Selanjutnya pendapatan rumah tangga secara umum selama 2 tahun terakhir (2006-2008) justru telah mengalami penurunan, baik di Desa Kojadoi maupun di Desa Namangkewa. Penurunan tersebut utamanya dipengaruhi oleh penurunan pendapatan dari usaha budi daya rumput laut. Usaha budi daya rumput laut merupakan kegiatan UEP andalan dari program COREMAP yang selama ini telah menunjukkan keberhasilannya. Namun pendapatan dari budi daya rumput laut tersebut ternyata mengalami penurunan drastis pada 12 bulan terakhir (2007/2008). Hal tersebut disebabkan karena pengaruh musim yang tidak kondusif dan hama tanaman rumput laut yang melanda kawasan Teluk Maumere (termasuk kawasan pulau-pulau kecil) setahun terakhir. Adanya hama tersebut telah menurunkan hasil panen dan pendapatan rumah tangga nelayan dalam satu tahun terakhir.

Mengenai pengetahuan/pemahaman tentang COREMAP bagi penduduk Desa Kojadoi cukup baik, hampir semua penduduk telah memahami. Sebagian besar dari mereka pernah terlibat dalam kegiatan COREMAP dan merasakan manfaat setelah adanya COREMAP. Hal tersebut cukup mereka rasakan setelah adanya kegiatan pengembangan usaha budi daya rumput laut. Meskipun pada satu tahun terakhir sedang dilanda bencana hama tanaman rumput laut yang mengakibatkan turunnya pendapatan rumah tangga.

Di Namangkewa menunjukkan gambaran yang berbeda, sebagian penduduk belum memahami tentang COREMAP. Sebagian besar dari mereka tidak pernah terlibat dalam kegiatan COREMAP dan merasakan manfaat dari program COREMAP. Sebagian

penduduk kurang peduli terhadap COREMAP karena kegiatan ekonomi mereka tidak ada kaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya laut. Sebagian besar dari mereka sumber mata pencariannya dari usaha di darat. Namun demikian ada sebagian penduduk Desa Namangkewa yang bertempat tinggal jauh dari pantai juga dimasukkan sebagai anggota Pokmas. Mereka sebetulnya juga perlu diberikan pemahaman yang luas tentang COREMAP dan program-programnya. Mengingat kerusakan terumbu karang di Teluk Maumere di samping oleh penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, juga disebabkan oleh adanya sedimentasi (endapan lumpur). Material sedimentasi tersebut dibawa air sungai ketika banjir terjadi. Dalam hal ini peran khusus anggota Pokmas dan penduduk pada umumnya yang tinggal di sekitar sungai di Namangkewa harus juga disadarkan untuk ikut melestarikan hutan atau tanaman pelindung di sekitar sungai.

Rata-rata pendapatan perkapita baik di Desa Kojadoi maupun di Desa Namangkewa, baik untuk tahun 2006 maupun tahun 2008 masih berada di atas garis kemiskinan. Namun rata-rata pendapatan rumah tangga sampel pada tahun 2006-2008 secara umum justru terjadi penurunan, baik di Desa Kojadoi maupun di Desa Namangkewa. Di Kojadoi terjadi penurunan dari Rp 756.503,-/ bulan menjadi Rp 624.245,-/ bulan atau terjadi penurunan sebesar 10,1 persen. Sementara di Namangkewa mengalami penurunan dari Rp 1.115.437,- menjadi Rp 850.324,- atau terjadi penurunan 14,5 persen. Faktor penyebab penurunan rata-rata pendapatan rumah tangga tersebut, seperti telah disebut di atas sangat dipengaruhi oleh penurunan pendapatan dari kegiatan usaha budi daya rumput laut. Di mana pada tahun terakhir (2007/2008) tanaman rumput laut sedang dilanda bencana hama. Sehingga hasil panen pada tahun terakhir sangat menurun, akibatnya pendapatan rumah tangga usaha rumput laut sangat menurun.

Dengan mendasarkan pada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan implementasi program COREMAP, pemahaman dan keterlibatan dalam program COREMAP dan perkembangan

pendapatan rumah tangga di daerah kajian ada beberapa alternatif saran/rekomendasi yang dapat disampaikan, yakni :

1. Kegiatan program COREMAP termasuk Pokmas belum banyak kegiatannya, karena masih menunggu dana operasional dan dana bergulir untuk penguatan modal usaha belum dicairkan sampai saat kajian dilakukan. Oleh karena itu, mengingat program COREMAP Fase II segera akan berakhir (tahun 2009), maka seyogyanya dana-dana tersebut segera dicairkan dan diberikan kepada anggota Pokmas yang membutuhkan. Dengan demikian diberikan pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang memadai untuk menunjang usaha ekonomi produktif. Namun juga diperlukan adanya pendampingan dalam pengelolaan/ manajemen usaha (dari penanaman sampai panen dan pemasaran) agar setelah modal usaha kembali tetap ada peningkatan hasil usaha, agar tidak kembali lagi seperti sebelum mendapat pinjaman dana bergulir. Bagi penduduk Desa Kojadoi dan Namangkewa terutama untuk meningkatkan kembali pendapatan rumah tangga mereka yang pada tahun terakhir sempat terpuruk. Bagi Kojadoi dan Namangkewa pembuatan kembali tanda-tanda DPL harus segera dilakukan, agar para nelayan terutama nelayan luar tidak sembarangan memasuki wilayah DPL.
2. Pemahaman tentang COREMAP dan program-programnya bagi penduduk Desa Namangkewa perlu ditingkatkan, khususnya yang telah masuk dalam anggota Pokmas dan penduduk pada umumnya. Meskipun mereka tidak tinggal di pinggir pantai, namun tinggal di sekitar sungai yang airnya mengalir ke Teluk Maumere mereka diharapkan ikut menjaga pelestarian hutan/ tanaman pelindung di sekitar sungai agar tidak terus terjadi penggundulan lahan, erosi tanah sekitar sungai. Sehingga ketika hujan tiba, tidak terjadi banjir dan tidak membawa material-material dan tidak menghasilkan endapan di pantai yang berpotensi mencemari serta merusak terumbu karang dan tanaman rumput laut yang selama ini telah dirasakan.
3. Di daerah kajian (Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa) pendapatan rumah tangga dalam 2 tahun terakhir mengalami

penurunan disebabkan penurunan penghasilan dari usaha rumput laut sebagai akibat terserang hama tanaman. Program COREMAP di masa mendatang harus mampu membantu para rumah tangga usaha budi daya rumput laut untuk mengatasi hama. Dalam hal ini diperlukan adanya kajian/penelitian yang mendalam terkait dengan hama tanaman rumput laut. Di samping itu, perlu diperhatikan lembaga pemasaran untuk memasarkan produksi rumput laut. Dalam hal ini peran koperasi (seperti Koperasi Koja Jaya di Desa Kojadoi) harus dikembangkan dan menjadi contoh untuk memasarkan produksi rumput laut. Dalam hal ini penting agar harga rumput laut tidak dipermainkan oleh para tengkulak yang akan merugikan para petani. Hal-hal tersebut sangat perlu mengingat banyak rumah tangga di dua desa penelitian sudah sangat menggantungkan hidupnya dari budi daya rumput laut, agar penghasilan rumah tangga dari usaha budi daya rumput laut dapat meningkat lagi. Kemudian juga perlu diupayakan bahan/obat pembrantas hama yang ramah lingkungan. Ketergantungan rumah tangga nelayan ke usaha budi daya rumput laut, telah membantu program pelestarian terumbu karang karena mereka sudah tidak lagi mengganggu wilayah terumbu karang. Usaha budi daya ikan di rumpun dan penangkapan ikan di bagan berjalan dapat terus dikembangkan, karena tidak merusak kawasan terumbu karang.

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP fase II bertujuan untuk menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang, agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Program ini telah berjalan kurang lebih tiga tahun atau sampai pada pertengahan program. Keberhasilan COREMAP dapat dikaji dari aspek bio-fisik dan sosial ekonomi. Terjadinya peningkatan tutupan karang sebesar 2 persen per tahun merupakan indikator keberhasilan dari aspek bio-fisik. Indikator keberhasilan dari aspek sosial ekonomi adalah jumlah pendapatan yang didapat dari, dan jumlah orang yang menerima pendapatan dari berbagai kegiatan berkelanjutan yang berbasis terumbu karang meningkat sebesar 10 persen pada akhir program. Selain itu, diharapkan sedikitnya 70 persen masyarakat pesisir, terutama nelayan (penerima manfaat) merasakan dampak positif program terhadap kesejahteraan dan status ekonominya.

Untuk melihat keberhasilan tersebut perlu dilakukan penelitian benefit monitoring evaluation (BME) baik ekologi maupun sosial-ekonomi. Penelitian BME ekologi dilakukan setiap tahun untuk memonitor kesehatan karang, sedangkan BME sosial-ekonomi dilakukan pada tengah dan akhir program. BME sosial-ekonomi bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil BME sosil-ekonomi ini selain dapat dipakai untuk memantau perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan pendapatan penduduk di lokasi COREMAP, juga dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan program, baik di tingkat nasional, kabupaten maupun di tingkat lokasi. Dengan adanya evaluasi dan masukan-masukan bagi

· pengelola dan pelaksana program, diharapkan dalam sisa waktu yang ada sampai akhir program fase II, keberhasilan COREMAP dari indikator bio-fisik dan sosial-ekonomi dapat tercapai.

Buku laporan ini merupakan hasil dari BME sosial-ekonomi yang dilakukan pada tahun 2008 di lokasi-lokasi Coremap di Indonesia Bagian Timur (lokasi World Bank). BME sosial-ekonomi ini dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku laporan melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Kepada para informan: masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di lokasi Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Unit pelaksana COREMAP di Kabupaten Sikka, CRITC Kabupaten Sikka dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi (Disesuaikan dengan daerah masing-masing).

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna meskipun tim peneliti telah berusaha sebaik mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini.

Jakarta, Desember 2008
Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Prof. DR. Ono Kurnaen Sumadhiharga, MSc

DAFTAR ISI

RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR/DIAGRAM	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Tujuan Penelitian	2
1.3. Metodologi	3
1.3.1. Lokasi Penelitian	3
1.3.2. Pengumpulan Data	3
1.4. Pembabakan Penulisan	5
BAB II PROFIL LOKASI PENELITIAN	7
2.1. Keadaan Geografis	8
2.2. Potensi SDA dan Pengelolaannya	12
2.2.1. Keadaan sumber daya alam	12
2.2.2. Wilayah pengelolaan	17
2.2.3. Teknologi penangkapan	18
2.2.4. Sarana dan prasarana	20
2.2.5. Program dan kegiatan dalam pengelolaan sumber daya laut	28
2.3. Kependudukan	35
2.3.1. Jumlah dan komposisi penduduk	36
2.3.2. Pendidikan dan ketrampilan	40
2.3.3. Pekerjaan utama dan tambahan	45
2.3.4. Pemilikan aset dan kondisi lingkungan	53

BAB III	COREMAP DAN IMPLEMENTASINYA	65
3.1.	Pelaksanaan COREMAP : Permasalahan dan Kendala	65
3.1.1.	Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan COREMAP di tingkat makro : Kabupaten Sikka	65
3.1.2.	Pengelolaan dan pelaksanaan COREMAP Fase II di tingkat mikro: Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa.	74
3.1.3.	Pengelolaan dan kegiatan COREMAP Fase II di Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi)	75
3.1.4.	Pengelolaan dan kegiatan COREMAP Fase II Kawasan Daratan (Desa Nawangkewa)	86
3.2.	Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan COREMAP	93
3.2.1.	Kawasan pulau-pulau kecil (Desa Kojadoi)	94
3.2.2.	Kawasan daratan (Desa Namangkewa)	105
BAB IV	PENDAPATAN PENDUDUK DAN PERUBAHANNYA	115
4.1.	Pendapatan Penduduk Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi)	116
4.1.1.	Pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita di Desa Kojadoi	117
4.1.2.	Pendapatan/bulan menurut lapangan pekerjaan di Desa Kojadoi	119

4.1.3.	Pendapatan rumah tangga kenelayanan menurut musim di Desa Kojadoi	125
4.1.4.	Pendapatan anggota Pokmas di Desa Kojadoi	128
4.2.	Pendapatan Penduduk Kawasan Daratan (Desa Namangkewa)	130
4.2.1.	Pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita di Desa Namangkewa	130
4.2.2.	Pendapatan/ bulan menurut lapangan pekerjaan di Desa Namangkewa	131
4.2.3.	Pendapatan rumah tangga kenelayanan menurut musim di Desa Namangkewa	133
4.2.4.	Pendapatan anggota Pokmas di Desa Namangkewa	135
4.3.	Faktor Berpengaruh Terhadap Pendapatan	137
4.3.1.	Program COREMAP	137
4.3.2.	Program pemerintah dan lembaga lain	139
4.3.3.	Faktor-faktor lain yang berpengaruh	141
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	149
5.1.	Kesimpulan	149
5.2.	Rekomendasi	152
DAFTAR PUSTAKA		155
LAMPIRAN		159

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Distribusi Penduduk Sampel (7 tahun ke atas) menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008	41
Tabel 2.2.	Distribusi Penduduk Sampel (10 tahun ke atas) menurut Kegiatan Utama, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008	47
Tabel 2.3.	Kepemilikan Aset Produksi berupa Alat Tangkap, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008	57
Tabel 2.4.	Kepemilikan Aset Non-Produksi, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008	60
Tabel 3.1.	Implementasi Program COREMAP Fase II di Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka	92
Tabel 4.1a.	Statistik Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga dan Per Kapita, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, 2006 dan 2008.	118
Tabel 4.2a.	Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Kelompok/ Kategori Pendapatan, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, 2006 dan 2008.	119
Tabel 4.3a.	Distribusi Pendapatan Menurut Lapangan Pekerjaan (Sektor), Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, 2006 dan 2008.	124

Tabel 4.4a.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Tahun 2006 – 2008 Menurut Musim, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka.	126
Tabel 4.5a.	Distribusi Persentase Rumah Tangga Nelayan Menurut Kelompok Pendapatan dan Musim, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, 2006 dan 2008.	127
Tabel 4.6a.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Ada Tidaknya ART Anggota Pokmas, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, 2008	129
Tabel 4.1b.	Statistik Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga dan Per Kapita, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka, 2006 dan 2008.	130
Tabel 4.2b.	Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Kelompok/ Kategori Pendapatan, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka, 2006 dan 2008.	131
Tabel 4.3b.	Distribusi Rata-rata Pendapatan Menurut Lapangan Pekerjaan, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka, 2006 dan 2008.	133
Tabel 4.4b.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Tahun 2006 – 2008 Menurut Musim, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka.	134
Tabel 4.5b.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Ada Tidaknya ART Anggota Pokmas, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka, 2008	137

DAFTAR GAMBAR/ DIAGRAM/GRAFIK

Gambar 2.1.	Dusun Kojadoi (kiri) yang terletak di Pulau Kojadoi dan Dusun Koja Besar (kanan) yang terletak di Pulau Besar dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan desa	10
Gambar 2.2.	Kawasan <i>mangrove</i> di Desa Kojadoi (kiri) dan batang-batang <i>mangrove</i> (kanan) yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan	13
Gambar 2.3.	Areal budi daya rumput laut (kiri) dan rumput laut yang sedang dikeringkan (kanan) di daratan pesisir utara Kecamatan Kewapante	16
Gambar 2.4.	Salah satu gedung SD di Desa Kojadoi (kiri) dan di Desa Namangkewa (kanan)	21
Gambar 2.5.	Warung/kedai sembako di salah satu rumah di Desa Kojadoi (kiri) dan suasana Pasar Geliting di Kecamatan Kewapante (kanan)	25
Gambar 2.6.	'Gudang' hasil panen rumput laut KSU Koja Jaya (kiri) dan sarana dermaga (kanan) yang ada di Desa Kojadoi	27
Diagram 2.1.	Piramida Penduduk Sampel Desa Kojadoi, 2008	37
Diagram 2.2.	Piramida Penduduk Sampel Desa Namangkewa, 2008	39
Gambar 2.7.	Keterampilan membuat kapal kayu/perahu (kiri) beserta sarana/peralatan yang dimiliki (kanan)	43
Gambar 2.8.	Keterampilan ibu-ibu membantu usaha budi daya rumput laut (kiri) dan membuat tenun ikat (kanan)	44

Diagram 2.3.	Distribusi Penduduk Sampel menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008 (Persentase)	48
Diagram 2.4.	Distribusi Penduduk Sampel menurut Status Pekerjaan Utama, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008 (Persentase)	50
Diagram 2.5.	Distribusi Penduduk Sampel menurut Lapangan Pekerjaan Tambahan, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008 (Persentase)	51
Diagram 2.6.	Distribusi Penduduk Sampel menurut Status Pekerjaan Tambahan, Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008 (Persentase)	53
Diagram 2.7.	Kepemilikan Aset Produksi berupa Armada Penangkapan, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008	54
Gambar 2.9.	Alat tangkap ‘bagan apung’ yang dimiliki sebagian nelayan di Desa Namangkewa	58
Diagram 2.8.	Kepemilikan Aset Produksi berupa Lahan Pangan dan Lahan Budi daya Rumput Laut, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008	59
Gambar 2.10.	Fasilitas bak penampung air bersih di Desa Kojadoi (kiri) dan Desa Namangkewa (kanan)	62
Diagram 3.1.	Pengetahuan Responden tentang COREMAP, Desa Kojadoi, 2008 (Persentase, N=100)	95
Diagram 3.2.	Pengetahuan dan Keterlibatan Responden dalam Kegiatan COREMAP, Desa Kojadoi, 2008 (N=100)	96

Diagram 3.3.	Pengetahuan dan Keterlibatan Responden dalam Kegiatan Pokmas, Desa Kojadoi, 2008 (N=100)	98
Diagram 3.4.	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan, Keterlibatan dan Manfaat dalam Kegiatan Ekonomi COREMAP, Desa Kojadoi, 2008 (N=100)	101
Diagram 3.5.	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan, Keterlibatan dan Manfaat dalam Jenis Usaha yang Pernah Dilakukan COREMAP, Desa Kojadoi, 2008 (N=100)	103
Diagram 3.1a.	Pengetahuan Responden tentang COREMAP, Desa Namangkewa, 2008 (Persentase, N=100)	106
Diagram 3.2a.	Pengetahuan dan Keterlibatan Responden dalam Kegiatan COREMAP, Desa Namangkewa, 2008 (N=100)	107
Diagram 3.3a.	Pengetahuan dan Keterlibatan Responden dalam Kegiatan Pokmas, Desa Namangkewa, 2008 (N=100)	109
Diagram 3.4a.	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan, Keterlibatan dan Manfaat dalam Kegiatan Ekonomi COREMAP, Desa Namangkewa, 2008 (N=100)	110
Diagram 3.5a.	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan, Keterlibatan dan Manfaat dalam Jenis Usaha yang Pernah Dilakukan COREMAP, Desa Namangkewa, 2008 (N=100)	112
Gambar 4.1.	Kerajinan Tenun Kain Tradisional di Desa Kojadoi	124
Diagram 4.1.	Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Kegiatan Kenelayanan di Desa Kojadoi Kabupaten Sikka, 2006-2008	126

Diagram 4.2.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas dan Bukan Anggota Pokmas di Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), 2008	128
Diagram 4.3.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas dan bukan Anggota Pokmas di Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), 2008	136
Gambar 4.2.	Hasil panen rumput laut yang terkena hama, batang memutih terus membusuk, di Namangkewa	145
Gambar 4.3.	Penggunaan kayu bakau untuk bahan baker memasak mengancam pelestarian hutan <i>mangrove</i> , Kojadoi, 2008	146
Gambar 4.4.	Penggunaan batu karang untuk pondasi rumah dan jalan lingkungan mengancam pelestarian terumbu karang, Kojadoi 2008	146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah sasaran program COREMAP di Wilayah Indonesia Timur. Bentangan seluruh terumbu karang di perairan wilayah Sikka akhir-akhir ini mencapai sekitar 14.500,4 hektar. Dari seluruh bentangan tersebut ada sekitar 60 persen masih dalam kondisi baik. Sebagian besar bentangan terumbu karang tersebut terletak di wilayah pesisir selatan wilayah Kabupaten Sikka dan sebagian yang lain tersebar di kawasan perairan wilayah utara. Menurut informasi bentangan terumbu karang yang paling banyak mengalami kerusakan terletak di kawasan perairan utara Kabupaten Sikka atau di Teluk Maumere. Diperkirakan terumbu karang di kawasan utara ini hanya sekitar 10 persen yang masih dianggap baik. Sehingga sekitar 90 persen telah dinyatakan telah mengalami kerusakan (PMU – COREMAP Kab. Sikka, 2005). Program COREMAP Fase I yang lalu mendapatkan bantuan dana dari Aus-AID (*Australian Agency for International Development*) dan sasaran program meliputi 6 desa pesisir, yakni Desa Nangahale, Namangkewa, Wuring, Wolomarang, Kojadoi dan Perumaan. Semua desa pesisir tersebut berada di wilayah utara. Dalam COREMAP Fase II dengan bantuan dana dari Bank Dunia (*World Bank*) sasaran program ditingkatkan menjadi 34 desa pesisir yang meliputi wilayah utara dan selatan Kabupaten Sikka. Desa-desa tersebut adalah desa-desa lama Nangahale, Namangkewa, Wuring, Wolomarang, Kojadoi dan Perumaan. Kemudian ditambah desa baru, yakni Lewomada, Wailawung, Bangkoor, Darat Pantai, Pruda, Hoeder, Watudiran, Kojagete, Pemana, Gunung Sari, Samparong, Kota Uneng, Hewuli, Kolisia, Reroroja, Maluriwu, Reruwairere, Lidi, Ipir, Hebing, Sikka, Watuledang, Lela, Korobhera. Paga, Mbengu dan Wolowiro.

Ada beberapa indikator yang dapat dimanfaatkan untuk memantau tercapainya tujuan COREMAP, antara lain dapat dilihat dari aspek biofisik dan aspek sosial – ekonomi. Dalam aspek biofisik diharapkan dapat tercapai peningkatan tutupan karang paling sedikit 5 persen per tahunnya. Pada akhir program diharapkan tercapai *level* yang sama dengan daerah yang telah dikelola secara baik atau *pristine area* atau daerah terumbu karang yang masih asli/ belum dimanfaatkan. Untuk melihat keberhasilan COREMAP dalam aspek sosial – ekonomi adalah : (1). Adanya pendapatan penduduk dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi yang berbasis terumbu karang dan kegiatan ekonomi alternatif lainnya, mengalami kenaikan sebesar 10 persen pada akhir program (tahun 2009); dan (2). Paling sedikit 70 persen dari masyarakat nelayan (*beneficiary*) di kabupaten program merasakan dampak positif COREMAP. Dalam hal ini dampak pada tingkat kesejahteraannya dan status sosial – ekonominya (Word Bank, Project Appraisal Document, 2004).

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program COREMAP di daerah dan mengumpulkan data tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Khususnya tingkat pendapatan yang dimaksudkan untuk memantau dampak COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan COREMAP di daerah.
2. Mengkaji pemahaman masyarakat tentang COREMAP.
3. Menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat untuk memantau dampak COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.3. METODOLOGI

1.3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian kali ini merupakan kajian monitoring dan evaluasi dari kegiatan COREMAP dari desa-desa yang telah diteliti sebelumnya (T0) atau telah dibuatkan Data Dasar (*Base Line*) Aspek Sosial – Ekonominya tahun 2006, yaitu di Desa Kojadoi (Kecamatan Maumere – sekarang Kecamatan Alok Timur) dan Desa Namangkewa (Kecamatan Kewapante).

1.3.2. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, observatif dan penggunaan data sekunder. Masing-masing metode tersebut ada beberapa kekuatan dan kelemahannya. Dalam metode kuantitatif menggunakan survei. Survei memanfaatkan daftar pertanyaan yang disusun dengan jawaban tertutup dan setengah tertutup. Daftar pertanyaan ini digunakan untuk mewawancarai para responden rumah tangga dan perseorangan (individu). Penggunaan survei sebagai metode kuantitatif dalam analisis lebih objektif dibandingkan dengan metode kualitatif, sebab subjektivitas peneliti dapat dihindari. Kelemahan metode kuantitatif ini adalah data yang dikumpulkan sangat terbatas dan terbatas pada jawaban tertutup yang tersedia di daftar pertanyaan. Metode ini kurang memberikan kebebasan kepada para peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi dari para responden.

Namun kelemahan metode kuantitatif tersebut masih dapat diatasi dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengumpulan data yang sifatnya kualitatif. Cara yang digunakan adalah dengan mengadakan wawancara mendalam ditambah dengan observasi lapangan. Kekuatan metode kualitatif ini dapat memberikan peluang lebih leluasa kepada para peneliti untuk menggali data atau informasi yang lebih mendalam dan kontekstual dari para informan sesuai dengan kondisi dan kejadian yang sebenarnya di lokasi kajian. Kelebihan lainnya data atau

informasi yang dikumpulkan lebih kaya dan mendalam dibandingkan metode kuantitatif.

Instrumen dan responden

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan tersebut di atas, penelitian ini dibekali dengan 2 paket instrumen, yaitu daftar pertanyaan dan pedoman wawancara.

Daftar pertanyaan

Daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Daftar Pertanyaan Survei *Benefit Monitoring Evaluation* (BME) Sosial – Ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis daftar pertanyaan, yakni Daftar Pertanyaan Rumah Tangga dan Daftar Pertanyaan Perorangan/ Individu. Dalam Daftar Pertanyaan Rumah Tangga terdiri dari 6 bagian, yakni : (1). Pengenalan Tempat; (2). Keterangan Rumah Tangga; (3). Keterangan Pencacahan; (4). Keterangan Anggota Rumah Tangga; (5). Ekonomi Rumah Tangga; dan (6). Pemilikan Aset Rumah Tangga. Sedangkan Daftar Pertanyaan Perorangan terdiri dari dua bagian, yakni : (1). Pengetahuan dan Partisipasi Reponden dalam COREMAP; dan (2). Manfaat COREMAP untuk Kehidupan Ekonomi.

Pedoman wawancara mendalam

Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan dengan para *stakeholders*, baik di tingkat kabupaten maupun para pelaksana di tingkat lokasi (desa) yang terkait dengan perencanaan sampai implementasi pelaksanaan program COREMAP dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan di laut. Dalam wawancara mendalam, pedoman wawancara diperlukan agar wawancara lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kajian. Pedoman wawancara berupa daftar dari poin-poin penting yang diteliti. Poin-poin tersebut dikembangkan para peneliti dan dilakukan cek dan recek di lapangan. Peneliti berhenti melakukan wawancara, bilamana telah mendapatkan pemahaman yang komprehensif, mendalam dan solid dari informan-informan kunci dan narasumber yang mewakili *stakeholders*.

Pengambilan sampel rumah tangga

Dalam penelitian ini rumah tangga sampel yang dikunjungi dan diwawancarai adalah rumah tangga yang pernah dikunjungi dan diwawancarai dalam penelitian sebelumnya (T0 tahun 2006). Jumlah rumah tangga sampel yang diwawancarai di Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa masing-masing sebanyak 100 rumah tangga. Alamat rumah tangga sampel diperoleh berdasar nama kepala rumah tangga dan alamat dari daftar pertanyaan yang telah diisi tahun 2006. Sedangkan responden individu adalah anggota rumah tangga yang berusia 15 tahun ke atas yang dipilih secara acak/ insidental.

Pengolahan data dan analisis data

Penelitian ini menghasilkan data rumah tangga dan individu dari daerah penelitian dan kemudian diolah secara komputerisasi. Data *entry* menggunakan program *SPSS data entry* versi 4. Dengan tahapan *cleaning*, data tersebut diolah dengan *SPSS 11.5 for Windows*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tabel-tabel frekuensi dan tabel-tabel silang dan diagram. Tabel dan diagram tersebut digunakan untuk mendeskripsikan kondisi kenelayanan, implementasi program COREMAP, kegiatan dan manfaat program COREMAP.

1.4. PEMBABAKAN PENULISAN

Bagian pertama dari tulisan ini merupakan bab pendahuluan. Bagian ini meliputi latar belakang penelitian, tujuan dari penelitian, metodologi penelitian yang digunakan. Bagian kedua, mengungkap profil lokasi penelitian. Kondisi profil lokasi penelitian mencakup keadaan geografi daerah penelitian. Kemudian dilanjutkan tentang gambaran potensi sumber daya alam dan pengelolaannya. Dalam hal ini meliputi baik keadaan sumber daya laut maupun sumber daya daratnya, wilayah pengelolaan, teknologi penangkapan, sarana dan prasarana yang ada di daerah kajian dan program-program dan kegiatan dalam pengelolaan sumber daya laut. Dalam bagian kedua ini juga mengungkap tentang kondisi kependudukan daerah kajian. Dalam kependudukan antara lain mengungkap jumlah dan komposisi

penduduk, pendidikan dan ketrampilan penduduk, pekerjaan baik utama maupun tambahannya serta kesejahteraannya.

Bagian ketiga membahas tentang program COREMAP dan implementasinya. Dalam hal ini menguraikan tentang pelaksanaan COREMAP, juga mengenai permasalahan dan kendalanya, baik pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat desa. Di tingkat desa berbicara tentang pembentukan, kinerja dan kegiatan LPSTK dan Pokmas, kegiatan sosialisasi dan pelatihan, kegiatan pengawasan dan kegiatan UEP. Selanjutnya mengenai pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan/program COREMAP.

Bagian keempat, membahas tentang pendapatan penduduk dan perubahannya selama tahun 2005 – 2007. Dalam pembahasan pendapatan disajikan secara umum rata-rata pendapatan rumah tangga/ bulan dan rata-rata pendapatan per kapita/ bulan. Kemudian gambaran pendapatan per bulan menurut lapangan kerja, pendapatan khusus bagi para nelayan pendapatan menurut musim dan pendapatan bagi para anggota Pokmas. Kemudian pembahasan dilanjutkan melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan. Faktor-faktor tersebut apakah berasal dari program COREMAP, program pemerintah lainnya, dan faktor lainnya. Bagian terakhir dari kajian akan ditutup dengan membuat beberapa kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PROFIL LOKASI PENELITIAN

Pemaparan profil lokasi penelitian pada bagian ini meliputi keadaan geografis, potensi sumber daya alam dan pengelolaannya serta kondisi kependudukan. Uraian difokuskan pada perubahan-perubahan yang terjadi selama dua tahun terakhir (2006-2008) untuk membandingkan dengan keadaan yang dijumpai pada saat pengumpulan data dasar (*baseline*). Sebagian informasi kondisi awal yang disajikan dalam tulisan ini diperoleh dari hasil penelitian PPK-LIPI tahun 2006 (Daliyo dkk, 2007), sedangkan gambaran kondisi lokasi penelitian pada saat ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan tahun 2008. Meskipun demikian, mengingat bahwa dua penelitian tersebut dilakukan di lokasi yang sama, pengulangan pada beberapa bagian dari hasil penelitian sebelumnya tidak dapat dihindarkan.

Penelitian di Kabupaten Sikka¹ dilakukan di dua lokasi, yaitu di kawasan pulau-pulau kecil dan kawasan daratan. Untuk kawasan pulau-pulau kecil, lokasi studi berada di Kecamatan Alok Timur²,

¹ Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Kabupaten Sikka mengalami pemekaran, khususnya dengan adanya pembentukan kecamatan-kecamatan baru, yang banyak mengubah wilayah administrasi masing-masing kecamatan dan desa. Saat ini Kabupaten Sikka terdiri dari 21 kecamatan (dari sebelumnya hanya 12 kecamatan). Selain pemekaran wilayah kecamatan dan desa, dalam beberapa waktu terakhir juga muncul wacana mengenai pemekaran di tingkat kabupaten, yakni dengan mengembangkan Kabupaten Sikka menjadi dua wilayah administratif, yaitu Kota Sikka (berpusat di Maumere) dan Kabupaten Sikka (berpusat di Kewapante). Meskipun demikian, mengingat publikasi data statistik terakhir (2006/2007) masih mengacu pada keadaan sebelumnya (12 kecamatan), maka beberapa data di tingkat kecamatan tidak dapat ditampilkan untuk menghindari kerancuan pemahaman lokasi penelitian.

² Kecamatan Alok Timur merupakan kecamatan baru hasil pemekaran wilayah administratif Kecamatan Maumere. Kecamatan Maumere sendiri dikembangkan menjadi 4 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Nelle, Koting, Alok dan Alok Timur.

yakni tepatnya di Desa Kojadoi. Sedangkan untuk kawasan daratan, lokasi studi berada di Kecamatan Kewapante³, khususnya di Desa Namangkewa. Sementara itu, lokasi kegiatan survei dalam penelitian ini berada di Dusun Kojadoi, Desa Kojadoi (kawasan pulau-pulau kecil) serta Desa Namangkewa dan Waiara di Kecamatan Kewapante dan Desa Watumilok di Kecamatan Kangae (kawasan daratan). Pembahasan profil lokasi penelitian pada bagian ini memfokuskan pada dua lokasi di tingkat desa, yaitu Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa. Namun demikian, beberapa bagian tulisan ini juga membahas kondisi pada tingkat kecamatan dan kabupaten untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai lokasi penelitian.

2.1. KEADAAN GEOGRAFIS

Secara geografis, Desa Kojadoi terletak di kawasan pulau-pulau kecil di sebelah utara Laut Flores, terpisah dari sebagian besar wilayah Kabupaten Sikka yang terletak di daratan Pulau Flores. Desa ini terletak di Pulau Besar⁴ dan Pulau Kojadoi yang termasuk dalam

Kecamatan Alok Timur terdiri dari 10 desa, 5 desa diantaranya sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Maumere, yaitu Desa Watugong, Kojadoi, Kojagete, Parumaan dan Lepolima. Sementara itu, Desa Pemana saat ini menjadi salah satu desa (dari total 7 desa) yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Alok.

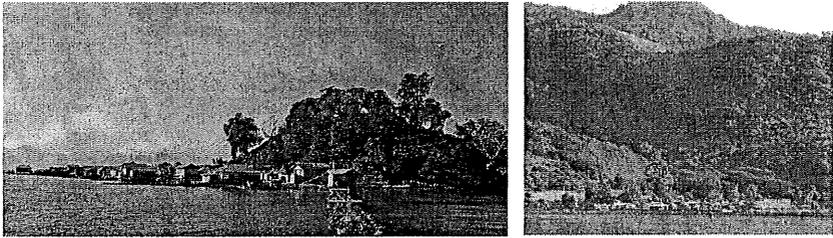
- ³ Kecamatan Kewapante, yang sebelumnya meliputi 24 desa, saat ini dikembangkan menjadi 3 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Kewapante (kecamatan induk), Kangae dan Hewokloang. Kecamatan Kewapante (hasil pemekaran) saat ini terdiri dari 8 desa, yaitu Desa Umagera, Ian Tena, Kopong, Seusina, Namangkewa, Waiara, Geliting dan Wairkoja. Sedangkan Kecamatan Kangae terdiri dari 9 desa (salah satunya Desa Watumilok) dan Kecamatan Hewokloang terdiri dari 7 desa.
- ⁴ Pulau Besar memiliki luas kurang lebih 53,13 km². Selain menjadi wilayah sebagian besar Desa Kojadoi, pulau ini juga menjadi wilayah administratif Desa Kojagete. Meskipun Desa Kojagete dan Kojadoi berbatasan darat secara langsung, dua desa ini terpisah oleh hamparan perbukitan dengan ketinggian sampai dengan 931 di atas permukaan laut. Secara morfologi Pulau Besar diklasifikasikan sebagai pulau bukit, di mana dataran pantai sangat sempit dan umumnya lahan darat yang ada langsung terjal (COREMAP – LIPI, 2006). Kondisi topografi yang cukup terjal dan kasar tersebut menyebabkan akses dari dan ke dua desa tersebut lebih mudah dilakukan melalui jalur perairan (laut).

wilayah administratif Kecamatan Alok Timur. Sebagian besar wilayah Desa Kojadoi dikelilingi oleh perairan (Laut Flores), sedangkan daerah/desa terdekat yang berbatasan tidak langsung dengan Desa Kojadoi masing-masing adalah Desa Kojagete (Kecamatan Alok Timur) di sebelah utara, Desa Nangahale (Kecamatan Talibura) dan Desa Parumaan (Kecamatan Alok Timur) di sebelah timur, Desa Namangkewa (Kecamatan Kewapante) dan Desa Gunung Sari (Kecamatan Alok Timur) di sebelah barat. Pusat pemerintahan Desa Kojadoi terletak di Dusun Koja Besar (Pulau Besar)⁵. Sedangkan pusat kecamatan dan kabupaten terletak di daratan Pulau Flores, masing-masing berjarak sekitar 20 dan 28 km dari Desa Kojadoi serta harus ditempuh melalui jalur perairan (laut) dilanjutkan dengan jalur darat.

Luas Desa Kojadoi mencapai 26,54 km² dan terbagi menjadi tiga dusun (Dusun Kojadoi, Koja Besar dan Margajong), lima RW dan 12 RT (Lampiran 1). Selain itu, terdapat beberapa pusat pemukiman penduduk lainnya (kampung), antara lain Kampung Wailago dan Labantour, yang terletak di sebelah barat Dusun Margajong dan menjadi lokasi Daerah Perlindungan Laut (DPL) Program COREMAP. Sebagian besar dusun dan kampung tersebut terletak di daratan Pulau Besar, kecuali Dusun Kojadoi yang terletak di Pulau Kojadoi. Dusun Kojadoi dan Dusun Koja Besar dihubungkan dengan sebuah jembatan kecil sepanjang sekitar 500 meter yang dapat tenggelam (tertutup air laut) pada saat kondisi air sedang 'pasang'. Sedangkan untuk menjangkau wilayah Dusun Margajong, Kampung Wailago dan Labantour harus menggunakan jalur perairan meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Ketiga wilayah tersebut tidak dapat

⁵ Sebelumnya, ibukota Desa Kojadoi berada di Dusun Kojadoi, demikian juga berbagai sarana publik seperti kantor desa dan gedung sekolah. Setelah terjadinya gempa dan tsunami di daerah ini pada tahun 1992, bangunan publik dan permukiman akhirnya direlokasi ke daratan Pulau Besar. Namun demikian, khusus untuk permukiman penduduk, masyarakat yang sebagian besar adalah nelayan lama kelamaan kembali lagi mendiami Dusun Kojadoi karena lebih dekat dengan laut. Sedangkan kantor desa, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan sampai saat ini tetap berada di daratan Pulau Besar.

diakses melalui jalur darat dari Dusun Koja Besar mengingat topografi daerah ini yang cukup kasar.



Gambar 2.1

Dusun Kojadoi (kiri) yang terletak di Pulau Kojadoi dan Dusun Koja Besar (kanan) yang terletak di Pulau Besar dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan desa

Kondisi topografi Desa Kojadoi meliputi kawasan daratan (pesisir) dan perbukitan. Pulau Kojadoi yang relatif kecil dan dihuni sekitar 150 rumah tangga merupakan daerah/pulau yang sebelumnya sudah tenggelam akibat bencana gempa dan tsunami tetapi ditimbun oleh penduduk setempat sehingga membentuk sebuah pulau kecil. Pulau ini hanya digunakan untuk areal pemukiman penduduk karena kondisi tanah buatan yang tidak cocok untuk ditanami berbagai tanaman. Sementara itu, kondisi topografi di daratan Pulau Besar relatif homogen, ditandai dengan kawasan daratan (pesisir) yang landai di sekitar pantai yang menjadi tempat pemukiman penduduk. Daerah pedalaman pulau ini merupakan kawasan tegalan/ladang yang banyak dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Sedangkan daerah pedalaman di bagian tengah merupakan kawasan perbukitan yang sangat terjal.

Berbeda dengan Desa Kojadoi yang memiliki karakteristik desa di kawasan pulau-pulau kecil, Desa Namangkewa merupakan salah satu desa di kawasan daratan Pulau Flores, tepatnya berada di kawasan pesisir utara Kabupaten Sikka dengan bentuk desa yang memanjang dari garis pantai ke arah pedalaman (kawasan tegalan/ladang). Secara administratif, wilayah Desa Namangkewa berbatasan langsung Desa Waiara di sebelah timur, Desa Geliting di

sebelah barat, Desa Seusina di sebelah selatan dan Laut Flores di sebelah utara. Desa Namangkewa dan tiga desa lainnya tersebut merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kewapante. Wilayah Desa Namangkewa juga sekaligus menjadi pusat kecamatan, sedangkan jarak desa/kecamatan ini dari pusat kabupaten hanya mencapai sekitar 9 km dan dapat ditempuh melalui jalur darat.

Luas wilayah Desa Namangkewa mencapai 1,43 km² dengan garis pantai hanya sepanjang 600 meter. Wilayah desa ini terbagi menjadi tiga dusun (Dusun Namangjawa, Kewapante dan Napungseda), 7 RW dan 14 RT (Lampiran 2). Namangjawa merupakan satu-satunya dusun yang memiliki daerah pesisir di desa ini sekaligus terletak di sepanjang jalan raya antarkabupaten dengan topografi wilayah yang relatif landai. Sementara itu Dusun Kewapante dan Napungseda berada di daerah pedalaman dengan topografi wilayah didominasi perbukitan. Wilayah dua desa ini banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian/perkebunan dan peternakan.

Kondisi iklim dan musim di dua desa penelitian relatif tidak jauh berbeda dengan kondisi di tingkat kabupaten. Musim kemarau berlangsung lebih lama daripada musim hujan. Musim kemarau biasanya berlangsung antara 7 dan 8 bulan, yakni mulai dari bulan April/Mei sampai dengan bulan Oktober/November. Pada bulan-bulan ini, gelombang laut umumnya tenang atau dapat disebut musim gelombang tenang (sekitar September-Desember) dan musim peralihan atau pancaroba (sekitar Mei-Agustus). Musim hujan berlangsung hanya sekitar 4-5 bulan, yaitu antara bulan November/Desember dan Maret/April. Pada bulan-bulan tersebut (Januari-April) sering terjadi gelombang laut yang cukup kuat sehingga pada waktu-waktu tertentu para nelayan sama sekali tidak berani melaut.

Berkaitan dengan kegiatan budi daya rumput laut, masyarakat di lokasi penelitian umumnya juga telah mengenal 'kalender musim' yang menjadi acuan dalam kegiatan budi daya tersebut (Lampiran 3). Musim panen budi daya rumput laut biasanya berlangsung selama 6-7 bulan dalam 1 tahun, yaitu mulai dari bulan Maret sampai dengan

Agustus/September. Bulan-bulan yang lain biasanya digunakan untuk kegiatan perawatan areal budi daya dan pembuatan bibit rumput laut.

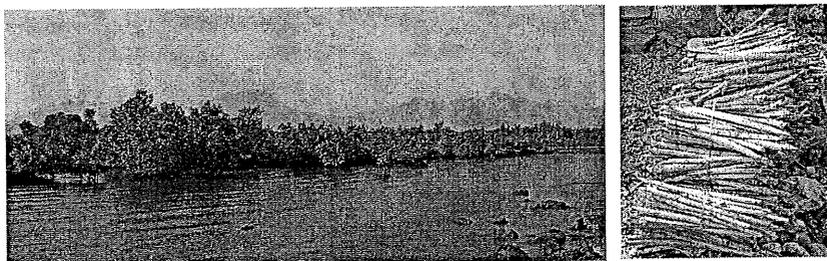
2.2. POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN PENGELOLAANNYA

Meskipun karakteristik dua desa yang menjadi lokasi penelitian ini relatif berbeda (kawasan pulau-pulau kecil dan kawasan daratan), Desa Kojadoi dan Namangkewa memiliki berbagai potensi sumber daya alam. Potensi tersebut dapat terus dikembangkan dan dapat mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut apabila dikelola dengan baik dan berkesinambungan. Uraian mengenai kondisi sumber daya alam pada bagian ini dibedakan menurut potensi sumber daya wilayah perairan dan potensi sumber daya wilayah daratan yang dimiliki dua desa. Berkaitan dengan sumber daya wilayah perairan (khususnya kegiatan kenelayanan), paparan dilanjutkan dengan membahas mengenai wilayah pengelolaan serta teknologi penangkapan yang dimiliki nelayan di dua lokasi penelitian.

2.2.1. Keadaan sumber daya alam

Sumber daya wilayah perairan

Sumber daya wilayah perairan cukup beragam, antara lain berupa hutan *mangrove*, terumbu karang, padang lamun dan berbagai hasil perikanan tangkap maupun perikanan budi daya. Hutan bakau (*mangrove*) dengan luas sekitar 23 ha di Desa Kojadoi dapat dijumpai di sepanjang pesisir pantai Pulau Besar, mulai dari Dusun Koja Besar di sebelah timur, Dusun Margajong, Kampung Wailago sampai dengan Kampung Labantour di sebelah barat daya (Lute, 2007). Kondisi *mangrove* di sepanjang pantai tersebut masih cukup lebat, bahkan di beberapa lokasi lebar *mangrove* dapat mencapai sekitar 100 meter (COREMAP – LIPI, 2006). Kondisi ini tentunya perlu dipertahankan supaya luas hutan *mangrove* di daerah ini tidak mengalami penurunan. Hal ini mengingat masih dijumpainya masyarakat yang menebang batang-batang *mangrove*, baik untuk dijual maupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar rumah tangga sehari-hari.



Gambar 2.2
Kawasan *mangrove* di Desa Kojadoi (kiri) dan batang-batang *mangrove* (kanan) yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan

Sebaliknya, kondisi di perairan Desa Namangkewa menunjukkan tidak dijumpainya ekosistem *mangrove* di kawasan ini. Daerah pesisir pantai di desa ini dan desa-desa di sekitarnya umumnya kurang terhalang oleh *mangrove* dan berbagai tanaman lainnya yang dapat menahan abrasi pantai. Banyak dijumpai rumah-rumah penduduk dan bangunan-bangunan lainnya yang berhadapan langsung dengan pantai. Kondisi ini tentunya bisa berbahaya, terutama pada saat gelombang pasang, cuaca buruk, maupun abrasi pantai. Ombak dan abrasi pantai dalam beberapa kurun waktu terakhir juga telah mengakibatkan kerusakan berbagai bangunan di pesisir pantai, termasuk bangunan pos keamanan laut (kamla) yang sempat dibangun pada Program COREMAP Fase I lalu.

Potensi sumber daya wilayah perairan lainnya adalah berupa ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini memiliki peran penting sebagai habitat (tempat hidup) berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Luas terumbu karang di seluruh wilayah Kabupaten Sikka mencapai sekitar 104,92 km², terdiri dari terumbu karang tepi (*fringing reef*) yang terdapat di pesisir daratan pulau utama (Pulau Flores) dan di pesisir pulau-pulau kecil (COREMAP – LIPI, 2006). Salah satunya adalah kawasan terumbu karang yang terdapat di pesisir Pulau Besar, khususnya di wilayah Desa Kojadoi. Luas terumbu karang di desa ini mencapai 199,48 ha. Dilihat dari kondisinya, maka sebagian besar terumbu karang tersebut (161,88 ha atau 81 persen) berada dalam kondisi rusak ringan. Sedangkan

terumbu karang yang berada dalam kondisi masih baik hanya mencapai 37,60 ha (19 persen), terutama terdapat di sekitar Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Wailago dan Labantour⁶.

Sementara itu, hasil Survei Biofisik COREMAP Fase II menyebutkan, terumbu karang yang terdapat di perairan sekitar Desa Namangkewa seluas 75 ha (Pare, 2007). Namun demikian, sebagian besar terumbu karang tersebut sudah dalam keadaan rusak⁷. Selain upaya perlindungan terumbu karang yang belum optimal, kondisi ini juga diakibatkan pengendapan lumpur dari muara sungai yang berada di perbatasan timur dan barat desa. Pengendapan lumpur ini sering terjadi setiap tahunnya, terutama pada saat terjadi luapan air banjir yang melanda melalui dua sungai tersebut.

Sebagaimana perairan di wilayah Kabupaten Sikka pada umumnya, perairan di dua desa lokasi penelitian juga mempunyai potensi perikanan tangkap (potensi lestari) yang masih dapat terus dikembangkan. Namun sayangnya, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan di dua desa. Data hasil tangkapan/panen laut di Desa Kojadoi misalnya, menurut data terakhir (2007) hanya sebanyak 3 ton/tahun untuk hasil tangkapan berupa ikan-ikan kecil. Selain karena masih menggunakan armada dan alat tangkap sederhana, faktor pergeseran aktivitas utama di

⁶ Penilaian kondisi terumbu dari hasil analisa LIT pada bulan Juli 2007 menunjukkan bahwa terumbu karang di perairan Kojadoi-Lambatour berada dalam kondisi sedang dengan persentase tutupan rata-rata 27,1 persen, menurun dibandingkan keadaan pada tahun 2006 (33,0 persen) dan 2004 (38,0 persen). Hasil analisis yang sama juga menunjukkan bahwa terumbu karang di perairan Kojadoi-Wailago berada dalam kondisi jelek dengan persentase tutupan rata-rata hanya 24,4 persen. Angka ini sebenarnya lebih baik dari pengukuran pada tahun 2006 (sangat jelek, persentase tutupan 11,4 persen), tetapi masih menurun dibandingkan keadaan pada tahun 2004 (43,0 persen) maupun 2003 (39,0 persen) (CRITC – COREMAP II – LIPI, 2007 dan COREMAP – LIPI 2006).

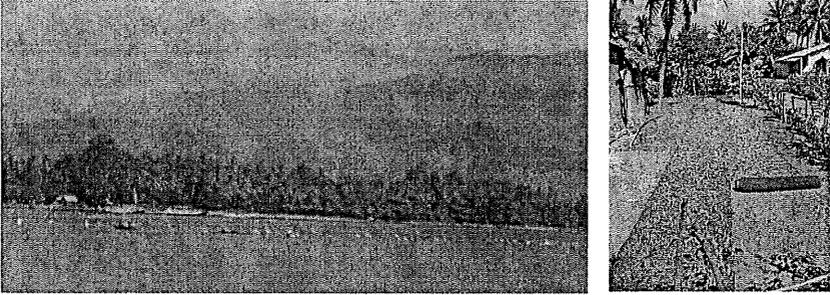
⁷ Studi monitoring ekologi terbaru dilakukan pada bulan Juli 2007 di sisi sebelah utara Perairan Teluk Maumere di Desa Namangkewa yang juga termasuk dalam kawasan DPL. Di lokasi ini persentase tutupan karang hidup sangat rendah, yaitu sekitar 17,5 persen (kategori jelek), meskipun telah meningkat dibanding keadaan pada tahun 2006 (15,1 persen) (CRITC – COREMAP II – LIPI, 2007).

bidang kenelayanan dari perikanan tangkap menjadi perikanan budi daya diperkirakan menjadi salah satu faktor belum optimalnya pemanfaatan potensi lestari di wilayah tersebut.

Beberapa jenis kegiatan perikanan budi daya sudah dicoba untuk dikembangkan di dua desa melalui intervensi dan bimbingan dari berbagai pihak, antara lain budi daya kerapu, kepiting bakau, kerang mutiara dan rumput laut. Namun demikian, tampaknya budi daya rumput laut menjadi daya tarik tersendiri bagi para nelayan, khususnya di Desa Kojadoi. Pengalaman mengembangkan budi daya ini sejak akhir tahun 80-an dan didukung pembinaan dari instansi terkait melalui Program COREMAP Fase I pada akhir tahun 90-an memberikan keuntungan bagi nelayan di desa ini. Hasil produksi budi daya yang terus mengalami perkembangan, baik dari sisi produksi maupun pendapatan, menyebabkan sebagian besar nelayan mulai mengalihkan aktivitas kegiatan kenelayanannya pada usaha budi daya rumput laut. Data terakhir pada tahun 2007 menunjukkan hasil produksi budi daya rumput laut di Desa Kojadoi dapat mencapai sekitar 121 ton dalam satu tahun.

Tidak seperti kondisi di Desa Kojadoi, potensi perikanan tangkap dan budi daya rumput laut di Desa Namangkewa relatif terbatas. Hal ini mengingat desa ini hanya memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 600 meter⁸. Potensi sumber daya perairan di daerah pesisir kawasan daratan tampaknya dapat lebih optimal apabila dikembangkan dalam satu kawasan. Potensi kenelayanan di Desa Namangkewa misalnya, dapat dikembangkan bersama-sama dengan potensi sejenis di desa-desa terdekat, seperti Desa Waiara dan Desa Watumilok yang terletak di sebelah timur dan barat Desa Namangkewa.

⁸ Wilayah administratif desa di sepanjang pesisir pantai utara daratan Kabupaten Sikka ini memang umumnya memanjang dari garis pantai ke arah pedalaman, sehingga hampir setiap desa di daerah ini memiliki wilayah pesisir meskipun dengan panjang garis pantai yang relatif sedikit.



Gambar 2.3

Areal budi daya rumput laut (kiri) dan rumput laut yang sedang dikeringkan (kanan) di daratan pesisir utara Kecamatan Kewapante

Sumber daya wilayah daratan

Selain potensi utama yang bertumpu di wilayah perairan, sebenarnya Desa Kojadoi juga memiliki potensi sumber daya alam, khususnya di daratan Pulau Besar. Di desa ini terdapat kawasan pertanian ladang dengan luas mencapai 300 ha dan perkebunan seluas 3 ha. Selain itu, terdapat kawasan hutan lindung (200 ha), hutan produksi terbatas (10 ha), lahan kritis (20 ha) dan lahan terlantar (102 ha) (Lute, 2007).

Beberapa komoditas yang diusahakan oleh masyarakat antara lain padi ladang, jagung, kelapa, kacang hijau, jambu mente, kacang-kacangan dan ubi-ubian. Data identifikasi potensi desa ini menyebutkan bahwa saat ini terdapat areal perkebunan jambu mente seluas 200 ha, kelapa (7 ha) dan kebun pisang (2 ha). Namun demikian, hasil produksi tanaman pangan/perkebunan ini umumnya masih terbatas⁹ dan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa ini sendiri. Apabila ada hasil produksi yang berlebih,

⁹ Hasil pertanian tanaman pangan/perkebunan di Desa Kojadoi cukup bervariasi, antara lain padi ladang rata-rata 4 ton/tahun, jambu mente (30 ton/tahun), kelapa (10 ton/tahun), kacang hijau (6 ton/tahun) dan jagung (80 ton/tahun) (Lute, 2007).

masyarakat juga bisa menjualnya sendiri secara langsung ke desa-desa sekitar atau ke daratan Maumere pada saat mereka pergi ke kota.

Selain tanaman pangan/perkebunan, Desa Kojadoi juga memiliki potensi di subsektor peternakan yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menambah sumber pendapatan rumah tangga. Hewan ternak yang umumnya dipelihara masyarakat antara lain ayam, kambing, itik/bebek dan sapi. Pemilik ternak ayam di desa ini sebanyak 61 orang dengan jumlah ternak mencapai 417 ayam. Sedangkan pemilik ternak kambing mencapai 42 orang dengan jumlah ternak sebanyak 125 kambing. Sementara itu jumlah pemilik ternak itik/bebek dan kambing relatif sedikit, masing-masing hanya 7 dan 1 orang dengan jumlah ternak sebanyak 72 itik/bebek dan 6 kambing (Lute, 2007).

Mengingat sebagian besar wilayah Desa Namangkewa berada di kawasan daratan utama Kabupaten Sikka, dapat dikatakan bahwa potensi utama wilayah desa ini memang mengandalkan sektor pertanian. Beberapa komoditas yang diusahakan oleh masyarakat antara lain berupa tanaman pangan (seperti padi ladang, jagung, kacang tanah dan kacang hijau), tanaman keras/perkebunan (seperti kelapa, kakao/coklat, cengkeh, jambu mente, asam, kemiri dan vanili), sayuran dan buah-buahan (pisang dan mangga). Selain di sektor pertanian, sebagian penduduk juga memiliki usaha di sektor peternakan, meskipun usaha ini umumnya masih belum dikelola secara besar-besaran. Beberapa jenis hewan ternak yang umumnya dipelihara masyarakat adalah ayam, kambing, sapi dan babi.

2.2.2. Wilayah pengelolaan

Mengingat sebagian besar para nelayan di dua desa penelitian merupakan nelayan tradisional (menggunakan armada dan alat tangkap yang relatif sederhana), maka wilayah tangkap para nelayan tersebut umumnya tidak jauh dari pantai di sekitar tempat tinggal mereka. Nelayan di Desa Kojadoi juga menangkap di daerah sekitar pulau-pulau kecil dan daerah perairan sekitar kawasan terumbu karang di Wailago dan Labantour. Namun demikian, dalam beberapa

tahun terakhir ini, setelah usaha budi daya rumput laut telah berkembang, sebagian besar nelayan di desa ini beralih ke usaha budi daya rumput laut dan menjadikannya sebagai pekerjaan utama mereka. Sedangkan kegiatan penangkapan ikan umumnya hanya bersifat sebagai pekerjaan tambahan dengan hasil produksi yang relatif kecil dan tidak dijual ke pasar. Hasil dari kegiatan melaut tersebut biasanya hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi sendiri dan apabila hasilnya berlebih biasanya hanya dipasarkan ke tetangga sekitar (penduduk setempat).

Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Namangkewa. Nelayan tradisional di desa ini umumnya hanya menangkap ikan di daerah sekitar pantai atau kawasan perairan yang relatif dangkal, sebagian diantaranya juga melaut ke kawasan pulau-pulau kecil terdekat. Sementara itu, bagi mereka yang memiliki armada tangkap yang lebih memadai (kapal motor) atau menjadi anak buah kapal (ABK) pihak lain, wilayah tangkap mereka umumnya cukup jauh, seperti di sekitar Pulau Palue, perairan Larantuka dan perairan Maluku Tenggara.

2.2.3. Teknologi penangkapan

Data statistik terakhir menyebutkan terdapat 91 rumah tangga perikanan di Desa Kojadoi pada tahun 2006 (BPS Kabupaten Sikka, 2007). Apabila dilihat dari statusnya, terdapat 34 rumah tangga (37,4 persen) yang berstatus sebagai nelayan penuh, 46 rumah tangga (50,5 persen) yang berstatus sebagai nelayan sambilan utama dan 11 rumah tangga (12,1 persen) lainnya berstatus sebagai nelayan sambilan tambahan.

Armada penangkapan yang terdapat di Desa Kojadoi mencapai 249 buah, terdiri dari jukung sebanyak 118 buah, perahu papan kecil (18 buah), motor tempel (38 buah) dan kapal motor (75 buah). Alat penangkap ikan yang terdapat di Desa Kojadoi mencapai 223 buah, terdiri dari jaring insang tetap sebanyak 19 buah, jaring insang hanyut (65 buah), pancing tonda sebanyak 87 buah, pancing lainnya (48 buah) dan bubu (4 buah) (BPS Kabupaten Sikka, 2007).

Hasil identifikasi mengenai teknologi penangkapan yang digunakan di Desa Kojadoi menunjukkan bahwa di desa ini terdapat armada kenelayanan berupa perahu motor sebanyak 78 buah, sampan (perahu tanpa motor) sebanyak 109 buah dan bagan/larikan rumput laut sebanyak 47 buah (Lute, 2007). Jika dilihat dari alat tangkap yang digunakan di desa ini, data dari sumber yang sama menyebutkan bahwa jumlah nelayan yang menggunakan pukat sampan sebanyak 21 orang, pukat sampan ketinting sebanyak 126 orang dan pancing sebanyak 205 orang. Sedangkan nelayan yang sudah mengembangkan usaha budi daya rumput laut di desa ini mencapai 330 orang.

Dari 14 nelayan yang terdapat di Desa Namangkewa, 7 nelayan diantaranya (50 persen) berstatus sebagai nelayan penuh, dan 7 nelayan lainnya berstatus sebagai nelayan paruh waktu. Jika dilihat dari armada penangkapan yang dimiliki para nelayan tersebut, maka dapat dilihat hanya 7 nelayan (50 persen) yang memiliki perahu tanpa mesin. Sedangkan dilihat dari alat tangkap yang digunakan, dapat dilihat bahwa 10 nelayan (71,4 persen) diantaranya memiliki alat tangkap berupa senar/kail dan bagan, 3 nelayan (21,4 persen) lainnya memiliki pukat dasar, dan 1 nelayan (7,2 persen) sisanya memiliki alat tangkap berupa senar/kail saja.

Hasil tangkapan ikan umumnya dijual dalam bentuk ikan segar, sebagian lagi dijual dalam bentuk ikan hidup dan hanya jenis ikan teri yang biasanya mengalami proses pengolahan (perebusan, penggaraman dan pengeringan) dahulu sebelum dijual. Selama ini tidak ada pengolahan pascapenangkapan ikan. Hasil tangkapan nelayan biasanya langsung dimasukkan ke dalam peti es atau ditaburi es agar dapat bertahan lebih lama. Hasil tangkapan tersebut selanjutnya dijual langsung ke pedagang pengumpul yang mendatangi para nelayan atau para nelayan tersebut dapat memasarkannya sendiri ke Pasar Geliting, Pasar Maumere atau pedagang pengumpul yang ada di kota.

Sementara bagi para nelayan tradisional, hasil tangkapan ikan biasanya langsung dipasarkan ke konsumen. Di Desa Namangkewa misalnya, para nelayan yang baru saja 'mendaratkan' ikan biasanya langsung diserbu para penjual eceran (*papalele*). Para penjual eceran

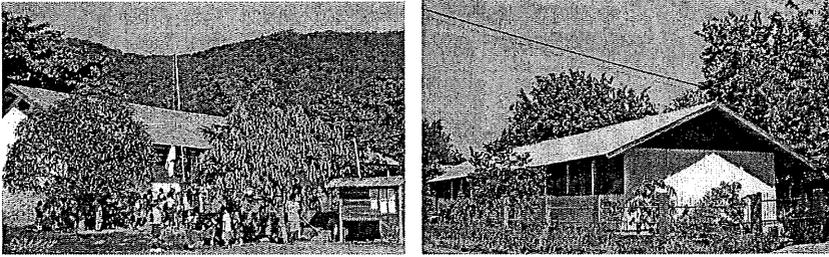
tersebut yang selanjutnya menjajakan langsung ke konsumen di pinggir-pinggir jalan. Setiap sore sampai malam hari, biasanya para penjual ikan tersebut berkeliraran di pinggir-pinggir jalan raya untuk menjajakan ikan segar hasil tangkapan pada hari itu.

2.2.4. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang terdapat di Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa telah mengalami perkembangan dalam dua tahun terakhir. Uraian pada bagian ini membahas mengenai berbagai sarana dan prasarana yang dikembangkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Bahasan mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi penelitian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: sarana pendidikan dan kesehatan, sarana transportasi dan komunikasi, serta sarana ekonomi. Selain sarana dan prasarana yang ada di tingkat desa, pada beberapa bagian juga diuraikan mengenai sarana dan prasarana di lokasi lain (tingkat kecamatan dan kabupaten) yang dapat diakses oleh penduduk di dua desa tersebut.

Sarana pendidikan dan kesehatan

Sarana pendidikan di Desa Kojadoi hanya tersedia sampai dengan tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Di desa tersebut terdapat dua unit gedung SD Negeri/Inpres, yaitu SDN Kojadoi yang berlokasi di Dusun Koja Besar dan SDN Margajong (Dusun Margajong). Sedangkan sarana pendidikan di tingkat SMP telah tersedia di Desa Kojadoi sejak tahun 2003 lalu. Keberadaan sekolah ini sangat berarti bagi masyarakat sekitar, mengingat sebelumnya bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di tingkat SMP harus pergi ke pulau lain atau ke kota (Maumere). Sedangkan sarana pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) belum tersedia di Desa Kojadoi. Penduduk yang ingin menyekolahkan anak mereka umumnya mengirimkan anak mereka ke Maumere atau daerah-daerah sekitarnya.



Gambar 2.4
Salah satu gedung SD di Desa Kojadoi (kiri) dan
di Desa Namangkewa (kanan)

Dibandingkan dengan kondisi di Desa Kojadoi, sarana pendidikan yang ada di Desa Namangkewa jauh lebih memadai. Di desa ini terdapat berbagai sarana pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai dengan SMA. Saat ini, setidaknya terdapat 2 unit gedung SD, 1 unit gedung SMP, 1 unit SMA dan 1 unit sekolah menengah kejuruan (SMK). Sebagian besar sekolah-sekolah tersebut berlokasi di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurut beberapa narasumber, murid-murid yang bersekolah tidak hanya berasal dari Desa Namangkewa, namun juga dari desa-desa terdekat lainnya. Selain sarana pendidikan yang ada di tingkat desa, masyarakat juga memiliki alternatif untuk bersekolah di lokasi lain, termasuk di pusat kabupaten (Maumere) yang relatif mudah diakses dari wilayah desa ini.

Sarana kesehatan yang ada di Desa Kojadoi relatif masih terbatas. Di desa ini terdapat satu puskesmas pembantu (pustu), satu pondok bersalin desa (polindes) dan 3 pos pelayanan terpadu (posyandu). Keberadaan tenaga kesehatan di pustu juga masih terbatas. Saat ini baru terdapat seorang bidan dan seorang mantri, sedangkan tenaga dokter tetap belum ada. Kondisi lokasi pustu dan puskesmas induk yang terpisah secara geografis (pustu berada di daerah kepulauan, sedangkan puskesmas induk berlokasi di daratan Flores) menyebabkan pelayanan kesehatan di desa tersebut hanya mengandalkan keberadaan pustu. Sementara itu operasional kegiatan posyandu juga telah didukung dengan adanya tenaga sukarela

masyarakat (kader) sebanyak 25 orang yang menjadi penggerak kegiatan pelayanan kesehatan dasar, khususnya upaya kesehatan ibu dan anak.

Sementara itu, sarana kesehatan di Desa Namangkewa relatif lebih memadai, baik dari segi jumlah maupun akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Di desa ini terdapat sebuah posyandu dan polindes. Meskipun tidak ada sarana puskesmas di desa ini (puskesmas kecamatan berlokasi di Desa Geliting yang relatif dekat dan mudah diakses dari Desa Namangkewa), di desa ini terdapat sebuah rumah sakit swasta yang telah beroperasi sejak beberapa tahun terakhir. Sama seperti sarana pendidikan yang ada, penduduk di Desa Namangkewa juga memiliki alternatif untuk berobat ke berbagai sarana kesehatan yang ada di lokasi lain di luar desa ini, termasuk di kota Maumere.

Sarana transportasi dan komunikasi

Sarana transportasi dan komunikasi di dua desa secara umum tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Sarana transportasi publik tampaknya masih menjadi permasalahan bagi penduduk di Desa Kojadoi. Sampai saat ini belum tersedia kapal reguler yang melayani pengangkutan penumpang setiap hari dari Desa Kojadoi ke Kota Maumere dan sebaliknya. Kapal penumpang reguler hanya tersedia seminggu sekali, yaitu setiap hari kamis, dengan jarak tempuh sekitar 1-1,5 jam dan biaya sekitar Rp. 20.000 per penumpang untuk sekali perjalanan. Kapal tersebut biasanya berangkat pada pagi hari dari Desa Kojadoi untuk mengantar masyarakat yang ingin berbelanja, menjual barang dagangan atau melakukan aktivitas lainnya, dan kembali lagi pada siang atau sore hari ke Desa Kojadoi. Kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi relatif terbatas. Bagi mereka yang memiliki keperluan yang tidak sebentar di kota, umumnya mereka harus menumpang pada kapal/perahu nelayan yang kebetulan satu arah dengan perjalanan mereka.

Kendala sarana transportasi tersebut juga dialami penduduk di Desa Kojadoi untuk mengakses daerah/pulau lain di sekitar Pulau Besar (Kojagete). Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal

tulisan ini, kondisi topografi yang kasar menimbulkan hambatan tersendiri bagi penduduk di masing-masing dusun/kampung yang ada di Desa Kojadoi. Penduduk dari Dusun Kojadoi dan Koja Besar tidak bisa mengakses melalui jalur darat untuk pergi ke wilayah Margajong, Wailago dan Labantour yang terletak di sisi selatan dan barat daya Pulau Besar, demikian juga sebaliknya. Mereka umumnya harus menggunakan perahu nelayan untuk dapat pergi ke daerah tersebut dengan menggunakan jalur perairan/laut. Menurut beberapa narasumber, selain menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat, kondisi ini juga mengganggu jalannya kegiatan pemerintahan di tingkat desa, terutama apabila ada pertemuan-pertemuan yang harus dihadiri oleh pengurus/pimpinan di masing-masing dusun/kampung yang ada di Desa Kojadoi.

Di daerah penelitian kawasan daratan, terdapat berbagai alternatif sarana transportasi yang dapat digunakan masyarakat. Transportasi darat dari Desa Namangkewa ke Maumere dan kecamatan lainnya dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan umum (minibus) atau dengan menyewa (ojek) motor. Transportasi laut secara resmi dapat dilakukan melalui pelabuhan di Maumere untuk menjangkau pulau-pulau kecil di kabupaten ini maupun kota-kota besar lain di luar Kabupaten Sikka. Sedangkan transportasi udara dapat dilakukan melalui bandara udara Waioti.

Masyarakat di dua desa penelitian sudah dapat mengakses berbagai sarana komunikasi meskipun dengan berbagai keterbatasan, khususnya bagi mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil. Di Desa Kojadoi misalnya, sarana komunikasi berupa telepon seluler sudah dapat dinikmati penduduk, meskipun dengan jumlah penyedia (*provider*) dan jangkauan wilayah di desa yang terbatas (tidak semua tempat di desa ini bisa menerima sinyal telepon seluler dengan baik). Sementara itu, sarana telepon kabel belum menjangkau Desa Kojadoi. Sebaliknya, sebagian besar penduduk di kawasan daratan (Desa Namangkewa) sudah dapat menikmati layanan telepon kabel maupun telepon seluler. Selain telepon seluler dan telepon kabel, sarana komunikasi lain yang dapat dimanfaatkan penduduk adalah melalui jalur komunitas RAPI (radio antar penduduk Indonesia). Beberapa

penduduk di Desa Kojadoi juga menjadi anggota komunitas tersebut. Keberadaan sarana komunikasi terbatas ini cukup penting bagi masyarakat di Desa Kojadoi, terutama apabila terjadi kondisi darurat/gangguan cuaca yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem komunikasi lainnya.

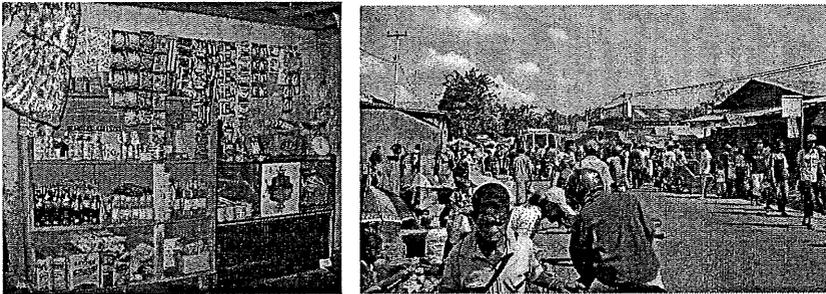
Sarana informasi elektronik berupa siaran radio dan televisi juga sudah dapat dinikmati penduduk di Desa Kojadoi dan Namangkewa. Hanya saja, penduduk di Desa Kojadoi umumnya hanya dapat menikmati dua sarana tersebut dalam jangka waktu yang terbatas. Hal ini disebabkan pasokan energi listrik di desa ini yang dinyalakan hanya selama sekitar 4 jam dalam sehari, yakni mulai pukul 6 sore hari sampai dengan pukul 10 malam hari. Kondisi seperti ini tidak dijumpai di Desa Namangkewa. Namun demikian, meskipun sebagian besar penduduk di desa ini sudah dapat menikmati siaran radio dan televisi setiap saat, beberapa wilayah desa ini belum terjangkau sarana listrik, terutama mereka yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau karena topografi yang kasar. Di Desa Namangkewa sebenarnya juga ada sarana pemancar radio. Menurut pengakuan beberapa informan, beberapa tahun lalu pernah ada siaran radio yang beroperasi melalui pemancar ini. Namun, saat ini keberadaan pemancar radio tersebut terbengkalai dan tidak ada informasi yang disiarkan melalui sarana tersebut.

Sarana ekonomi

Salah satu sarana ekonomi yang penting adalah keberadaan pasar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sebagai daerah kepulauan, Desa Kojadoi sampai saat ini belum memiliki pasar desa permanen yang dapat digunakan untuk transaksi jual-beli setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di desa ini terdapat beberapa warung sembako sederhana yang umumnya dikelola ibu-ibu di masing-masing rumah mereka. Selain itu, dalam setiap pekan biasanya ada pedagang dari luar pulau (misalnya dari Desa Pemana) yang datang ke desa ini untuk berdagang, khususnya barang-barang kebutuhan sekunder seperti pakaian.

Ketiadaan sarana pasar desa permanen di Desa Kojadoi mengakibatkan masyarakat, baik pribadi maupun pedagang warung, harus pergi ke daratan Kabupaten Sikka untuk berbelanja berbagai kebutuhan rumah tangga dan sarana/alat produksi kenelayanan. Mereka umumnya pergi seminggu sekali (setiap Kamis) ke Pasar Geliting di Kecamatan Kewapante atau ke Pasar Maumere di pusat kabupaten. Selain untuk berbelanja, bagi mereka yang memiliki hasil tangkapan laut dapat menjualnya secara langsung ke pasar tersebut.

Keterbatasan akses terhadap pasar yang dialami penduduk Desa Kojadoi tersebut tidak dihadapi oleh mereka yang tinggal di kawasan daratan. Penduduk Desa Namangkewa dapat pergi ke Pasar Geliting (hanya berjarak sekitar 0,5 km dari pusat Desa Namangkewa) atau ke Pasar Maumere (sekitar 9 km) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sarana transportasi darat yang relatif memadai. Selain itu, di Desa Namangkewa sendiri juga sudah banyak berdiri toko permanen serta warung/kedai yang menyediakan berbagai keperluan masyarakat.



Gambar 2.5

Warung/kedai sembako di salah satu rumah di Desa Kojadoi (kiri) dan suasana Pasar Geliting di Kecamatan Kewapante (kanan)

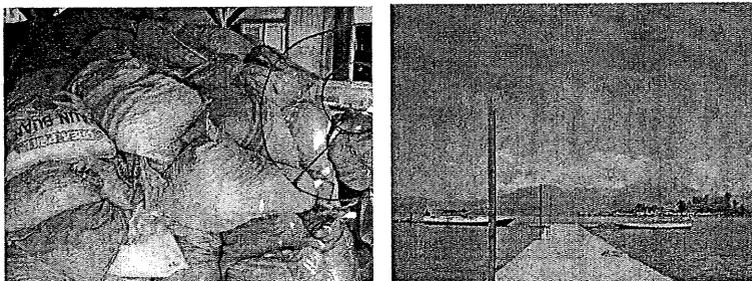
Sementara itu, pemasaran hasil panen budi daya rumput laut umumnya langsung dilakukan di tingkat desa. Para nelayan dapat menjual rumput laut yang sudah kering tersebut ke para ‘pengumpul’ yang ada di tingkat desa, selanjutnya para ‘pengumpul’ (anak buah)

tersebut yang akan membawa hasil pembelian dari para nelayan ke 'pengumpul' (bos/pengusaha) yang ada di tingkat kabupaten. Selain menjual ke 'pengumpul', nelayan –khususnya yang telah menjadi anggota koperasi (KSU Koja Jaya¹⁰)– dapat memasarkan hasil panen rumput laut mereka melalui koperasi tersebut.

Keberadaan koperasi yang dapat menjadi wadah organisasi para nelayan di Desa Kojadoi tersebut sudah tidak dijumpai di Desa Namangkewa. Hal ini terutama mengingat jumlah nelayan di desa ini yang relatif sangat sedikit. Namun demikian, di Desa Namangkewa – juga di tingkat kecamatan dan kabupaten– banyak dijumpai koperasi kredit¹¹ (*credit union* atau CU). Koperasi-koperasi tersebut umumnya memiliki kegiatan pokok berupa simpan-pinjam. Selain koperasi, penduduk di Desa Namangkewa memiliki akses untuk memanfaatkan sarana perbankan yang banyak terdapat di ibukota kabupaten, bahkan beberapa diantaranya sudah menjangkau tingkat kecamatan, seperti yang dapat dijumpai di sekitar Pasar Geliting (Kecamatan Kewapante).

¹⁰ KSU (Koperasi Serba Usaha) Koja Jaya beroperasi di Desa Kojadoi sejak tahun 2001 pada masa COREMAP Fase I. Kegiatan koperasi sampai saat ini masih terbatas pada usaha simpan-pinjam dan pemasaran hasil panen budi daya rumput laut, dengan aset/modal koperasi yang telah mencapai 250 juta rupiah. Setelah sebelumnya hanya memasarkan ke pengusaha di tingkat kabupaten, dalam beberapa tahun terakhir pihak koperasi telah mencoba memasarkan ke pihak yang lebih tinggi lagi, antara lain ke pengusaha di Surabaya untuk selanjutnya diolah menjadi komoditas ekspor. Namun demikian, isu penggunaan pupuk GT (*Green Tonic*) dalam kegiatan budi daya rumput laut menyebabkan hasil panen yang dapat dikumpulkan pihak koperasi dari para nelayan (tanpa menggunakan pupuk GT) menjadi semakin berkurang.

¹¹ Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian terhadap kelompok masyarakat (Pokmas) yang dilakukan oleh COREMAP Fase II pada bulan Maret 2006, di Desa Namangkewa terdapat potensi wadah ekonomi kerakyatan berupa CU atau Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 5 buah dan kelompok usaha produktif lainnya sebanyak 13 buah (Pare, 2007).



Gambar 2.6
'Gudang' hasil panen rumput laut KSU Koja Jaya (kiri) dan sarana dermaga (kanan) yang ada di Desa Kojadoi

Sarana ekonomi lainnya yang terdapat di Desa Kojadoi adalah tersedianya fasilitas 'dermaga' (tambatan perahu). Namun demikian, keberadaan dermaga ini masih kurang optimal. Salah satu sebabnya adalah lokasi dermaga berada di Dusun Koja Besar, padahal mayoritas nelayan budi daya rumput laut berada di Dusun Kojadoi. Lokasi dermaga yang relatif jauh menyebabkan masyarakat di Dusun Kojadoi umumnya menambatkan perahu ke bagian belakang rumah atau lokasi lain yang terdekat dengan rumah mereka.

Sementara itu, fasilitas 'dermaga' tidak dijumpai di Desa Namangkewa. Selain jumlah rumah tangga nelayan yang relatif sedikit, hal ini kemungkinan karena lokasi desa yang dekat dengan Pasar Geliting sehingga nelayan dapat langsung pergi ke pasar tersebut untuk memasarkan hasil tangkapan mereka.

Meskipun memiliki potensi besar di bidang perikanan, sampai saat ini belum ada fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) resmi di Kabupaten Sikka. Selama ini, tempat pemasaran ikan (baik ikan segar maupun kering) memanfaatkan pasar-pasar tradisional yang ada, seperti Pasar Geliting dan Pasar Maumere. Khusus untuk pemasaran ikan segar, nelayan juga dapat memanfaatkan jasa para penjaja ikan (*papalele*) untuk menjualkan ikan hasil tangkapan nelayan di pinggir-pinggir jalan raya.

2.2.5. Program dan kegiatan dalam Pengelolaan sumber daya laut

Program kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Laut (SDL) di Indonesia tampaknya tidak dapat dipisahkan dengan Program COREMAP pada umumnya. Di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat penelitian ini berlangsung, telah dinyatakan masuk fase II dalam kegiatan pengelolaan COREMAP. Pada fase I program COREMAP atas bantuan dari Aus-AID (*Australian Agency for International Development*) dinyatakan sebagai tahap program peletakan dasar untuk pengelolaan terumbu karang. Pada fase I tersebut di Kabupaten Sikka terpilih 6 lokasi yang menjadi sasaran COREMAP dan sekarang fase II adalah meliputi 20 desa (Yaspera, 2005). Dari 20 desa ini di dalamnya termasuk Desa Namangkewa dan Desa Kojadoi yang menjadi lokasi penelitian ini.

Pengelolaan Sumber Daya Laut (SDL) termasuk di dalamnya adalah terumbu karang mencakup sumberdaya yang ada di pesisir, dan sekitar kepulauan serta ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan yang ada di dalamnya. Kemudian perkiraan luas bentangan laut di Kabupaten Sikka termasuk Laut Flores dan Laut Sawu 5.821,3 m² atau sekitar 77 persen dari seluruh luas wilayah kabupaten (Daliyo, dkk, 2006). Tiga hal penting yang menjadi potensi tumbuhan laut seperti, terumbu karang, hutan mangrove dan padang lamun. Khusus tentang terumbu karang diperkirakan bahwa luasan terumbu karang di Kabupaten Sikka mencapai 128 km². dengan hasil perikanan ekosistem yang terdegradasi sekitar 5 ton per tahun atau sekitar 640 ton per km². Dari hasil perikanan pada kawasan ekosistem terumbu karang yang terkelola per tahun mencapai 25 ton / km². Dalam perkiraan selanjutnya adalah terjadi kehilangan keuntungan dari pengelolaan perikanan akibat rusaknya ekosistem di Kabupaten Sikka adalah 43 milyar setiap tahun (DKP, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Perikanan, 2007; 2). Mengingat persoalan pengelolaan SDL yang belum optimal dan masih terjadi kerugian ekonomis tersebut, maka diperlukan program untuk penyelamatan kerusakan SDL agar diperoleh tingkat produksi kelautan yang baik.

Dilihat dari produksi SDL dari Kabupaten Sikka dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu jenis ikan, jenis bukan ikan, jenis rumput laut dan nener. Beberapa jenis ikan yang ada di Kabupaten Sikka meliputi : ikan cakalang, tuna, layang, selar merah,, tongkol, teri, kembung, terbang dan kerapu. Jenis bukan ikan meliputi : udang, cumi, gurita dan penyu. Sedangkan rumput laut umumnya dibudi dayakan dalam wilayah sekitar pulau dan belakangan ini sebagai sasaran program pantai yang memiliki arus yang cukup. Hanya berdasarkan data dari tahun 2003 hingga 2005 jumlah produksi rumput laut tersebut mengalami penurunan dari sekitar 42 ton menjadi 32 ton pada tahun 2005. (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, 2006).

Program pengelolaan SDL yang terlihat dan nyata banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adalah program COREMAP. Program ini di Indonesia dimulai sejak COREMAP fase I antara tahun anggaran 1998/1999 hingga tahun 2004. program ini bisa dikenal dengan program yang dikelompokkan program inisiasi. Artinya bahwa pada program ini lebih banyak kepada upaya penyadaran terhadap pentingnya pemeliharaan dan perlindungan sumberdaya laut. Program itu ternyata secara nasional berlanjut dalam program COREMAP selanjutnya yang akan berakhir hingga tahun 2010. Pada fase ini akan lebih menekankan kepada program yang melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat serta pengembangan berbagai alternatif kegiatan masyarakat dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan atas dasar kebutuhan masyarakat dari sumberdaya laut. Secara nasional kegiatan COREMAP memiliki dua hal penting yakni : *Pertama*, usaha memberikan kepercayaan dan wewenang kepada masyarakat dalam menentukan kebutuhan dan perencanaan yang ingin diprogramkan. *Kedua* adalah turut mengusahakan dukungan lingkungan yang kondusif dalam mewujudkan peningkatan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bagi penduduk.

Beberapa program yang mencakup kegiatan pengelolaan SDL di Kabupaten Sikka (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka 2004-2008). meliputi :

1. Peningkatan SDM dan pengembangan kelembagaan nelayan;
2. Peningkatan konservasi, rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; dan
4. Pengembangan sarana dan prasarana.

Kemudian beberapa program COREMAP baik dari fase I (tahun 2000-2004) maupun fase II (tahun 2005-2009) di Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi) dan di Kawasan Daratan (Desa Namangkewa) akan dibahas berikut ini.

Program kegiatan di kawasan pulau-pulau kecil (Desa Kojadoi)

Program COREMAP Fase I di Desa Kojadoi belum bisa dikatakan sebagai desa yang cukup sukses dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun program COREMAP fase pertama di Desa Kojadoi telah berjalan relatif baik. Hal ini tercermin dari keberhasilan program COREMAP dalam mengenalkan usaha budi daya rumput laut kepada penduduk. Desa yang berpenduduk kurang dari 1500 orang ini mendiami lahan di sebagian wilayah pantai selatan Pulau Besar/ Kojagete (Dusun Markajong dan Dusun Kojagete) dan lahan di atas karang (Pulau Kojadoi) yang kemudian disebut Dusun Kojadoi. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan hanya 36 orang yang memeluk agama Katolik. Sedangkan mata pencaharian utamanya sebagian besar penduduk sekarang adalah sebagai nelayan budi daya rumput laut dan nelayan pancing. Meskipun dikatakan bahwa penduduk desa ini telah meninggalkan pekerjaan penangkapan ikan, tetapi sebagian penduduk ada yang masih juga sebagai nelayan pukat sampan yang jumlahnya sangat kecil. Penduduk Desa Kojadoi selama diperkenalkan program COREMAP memiliki hasil utama produksi rumput laut. Jumlah produksi rumput laut dari Kojadoi selama ini diperkirakan mencapai sekitar 121 ton per tahun.

Visi program COREMAP di Desa Kojadoi adalah ” *Popoassa To jagae Nataynto Ako Te Kandeu-Deu To ba'ng Kita Apa Ompu-Ompu To Mai*” atau ‘Bersama-sama kita jaga laut kita untuk

kesejahteraan kita semua sampai keanak cucu kita'. Dengan demikian visinya bisa dikatakan cukup menantang, bahkan diharapkan menjadi tolok pijak perjuangan penduduk setempat.

Kemudian untuk mencapai cita-cita yang tertuang didalam visi tersebut, akan ditindaklanjuti kedalam misi-misinya. Adapun misi-misinya meliputi :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian terumbu karang.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan MPA (Mata Pencaharian Alternatif)
3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kaum perempuan dalam pengembangan usaha.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung publik.

Dengan mendasarkan pada misi di atas banyak kegiatan yang dikelola di tingkat desa melalui program COREMAP baik yang langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sumber daya laut. Khususnya terkait dengan sumber daya laut untuk pelestarian terumbu karang melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang pentingnya pelestarian terumbu karang.
2. Identifikasi Peraturan Desa (Perdes) tentang DPL.(Daerah Perlindungan Laut).
3. Beberapa kegiatan lainnya untuk mencapai penataan kembali areal terumbu karang.

Ada beberapa sasaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan pada wilayah setempat (desa) dan kegiatannya meliputi.:

1. Pengadaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan memadai.
2. Pengadaan sarana pendukung rumput laut.
3. Pembuatan rumpon.
4. Pelatihan penangkapan yang ramah lingkungan.
5. Pelatihan dan pencegahan hama rumput laut.

Rencana kegiatan tersebut tentu saja dilaksanakan oleh pengelola terumbu karang tingkat desa yang dikoordinasikan dengan Kepala desa dan Badan Perwakilan Desa. Struktur organisasi

pengelolaan terumbu karang yang ada di desa dipimpin oleh Ketua Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) dan didampingi oleh Motivator Desa. LPSTK membawahi Kelompok Masyarakat (Pokmas), yaitu :

1. Pokmas Ekonomi Produktif (PEP),
2. Pokmas Keuangan Mikro,
3. Pokmas Konservasi,
4. Pokmaswas, dan
5. Pokmas Perempuan.

Perkembangan saat ini program desa yang telah terealisasi adalah pembuatan bangunan Pondok Informasi dan pondok data yang dibangun di atas tanah desa. Letaknya berada di Dusun Koja Besar (Kojagete) berdampingan dengan Kantor Desa Kojadoi. Pada saat penelitian dilakukan bangunan ini baru selesai dibangun (sekitar satu minggu sebelum penelitian). Bangunan Pondok Informasi tersebut berukuran sekitar 12 m² dan belum dimanfaatkan untuk kegiatan informasi COREMAP.

Menurut keterangan dari beberapa informan, akhir - akhir ini memang Desa Kojadoi telah memperoleh dana dari program *Village grant*. Di Kabupaten Sikka dana "*Village grant*" tersebut diberikan kepada 34 desa sasaran. Sementara di Desa Kojadoi menerima Rp 18 juta untuk pengadaan mesin listrik dan pengadaan perahu motor Rp 11 juta . Kemudian dana untuk pembangunan fasilitas MCK sebesar Rp 24 juta dan dana untuk pengadaan Unit Reverse Osmosis Rp 30 juta. Kemudian dikatakan untuk swadaya tercatat Rp 11,35 juta. Dalam hasil wawancara ternyata dana dari "*Village Grant*" di Kojadoi sebesar Rp 75 juta yang kemudian dibagi dalam bentuk paket masing-masing dusun memperoleh Rp 25 juta. Menurut keterangan dari pemegang LPSTK dana itu untuk Dusun I Kojadoi kegunaannya untuk rehabilitasi keberadaan pipa air bersih yang menghubungkan pusat sumber air di Dusun Koja Besar menuju ke Dusun Kojadoi. Jaraknya kedua dusun sekitar 1,5 km. Sedangkan peruntukan di Dusun II Koja Besar/ Kojagete adalah untuk memperkuat mesin penggerak listrik dan peralatannya (membeli peralatan baru pengganti

yang sudah rusak). Di Dusun III Margajong dana tersebut digunakan untuk pembuatan sarana mandi cuci dan kakus (MCK) warga masyarakat. Program ini tampaknya merupakan program yang tidak langsung tertuju kepada pengelolaan sumberdaya laut. Namun lebih kepada penguatan usaha di darat untuk mendukung kesejahteraan penduduk.

Program di kawasan daratan (Desa Namangkewa)

Desa Namangkewa memiliki wilayah pantai yang tidak terlalu panjang. Kurang lebih hanya 20 kepala rumah tangga yang memiliki profesi nelayan, namun desa ini menjadi sasaran program COREMAP fase pertama dan fase kedua. Mayoritas kepala rumah tangga (560 kepala rumah tangga) di desa ini adalah petani. Pada fase pertama Dusun Namangkewa merupakan pusat pemerintahan Desa Namangkewa yang wilayahnya meliputi Dusun Krokowolon, Dusun Watu Milok dan Dusun Namangkewa. Saat ini telah terjadi pemekaran menjadi tiga desa yang berdiri sendiri, yakni Desa Namangkewa, Desa Krokowolon dan Desa Watu Milok. Meskipun telah dilakukan pemekaran menjadi 3 desa, namun Desa Namangkewa tetap menjadi desa sasaran COREMAP Fase II.

Pada COREMAP Fase I di desa ini dikelola dan dibiayai oleh dana bantuan dari program *Aus-AID* dengan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah setempat. Tetapi dalam pelaksanaan di tingkat desa ternyata *Aus-AID* memiliki program kerja yang dianggap sangat implementatif. Program tersebut adalah program kerja pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, penyadaran masyarakat dan juga pemberdayaan sekolah. Menurut para informan yang terlibat di tingkat masyarakat menyebutkan bahwa ada bantuan untuk kegiatan ekonomi pada program fase pertama, namun dalam fase kedua ini belum jelas kegiatannya.

Visi dalam Program COREMAP Fase II di Desa Namangkewa adalah '*Lestari Lautku, Sejahtera Masyarakatku*'. Berdasarkan visi tersebut dibuatlah program kerja COREMAP Fase II yang meliputi :

1. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan menjaga kelestarian sumberdaya pesisir dan laut.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Meningkatkan pengetahuan/keterampilan dan manajemen usaha bagi kaum perempuan.
4. Meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut program kerja tersebut direncanakan untuk menentukan strategi yang ingin ditempuh khususnya yang terkait dengan sumberdaya laut. Strategi tersebut adalah pertama, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan dan terpadu. Kedua adalah peningkatan sistem pengawasan dan pemantauan. Kemudian kegiatan tahun pertama yang paling diperlukan adalah sosialisasi dan desiminasi tentang pentingnya ekosistem terumbu karang serta biota laut. Kegiatan ini tampaknya di desa Namangkewa telah berjalan melalui berbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, kelompok masyarakat RT dan kelompok masyarakat lain pada fase pertama. Tetapi ternyata pada fase kedua juga masih dijadikan kegiatan yang terus akan dilakukan hingga tahun ketiga. Penanggung jawab kegiatan ini adalah fasilitator (CF) dan dari kelompok. Desa adalah Pemerintah desa dan masyarakat adalah LPSTK. Kemudian pada tahun kedua kegiatan yang dilakukan selain strategi yang ada sosialisasi yang terus dilakukan juga. Kegiatan memperkenalkan bahwa kegiatan pelestarian lingkungan laut melalui kurikulum di sekolah tentang terumbu karang, hal ini kemudian bisa dimasukkan dalam kurikulum lokal di tingkat sekolah dasar di desa (mulok). Kegiatan pada pengawasan dilakukan pelatihan manajemen pengawasan. Pada tahap yang ketiga beberapa yang ingin dilakukan seperti penerusan kegiatan pertama juga kegiatan seperti penanaman kembali hutan bakau, penghidupkan kembali kearifan lokal dan akan dilakukan pelatihan pemberantasan hama yang merusak terumbu karang.

Pada COREMAP Fase II tahun pertama kegiatan itu juga sudah ada yang pernah dilaksanakan seperti pengenalan muatan lokal dan sosialisasi tentang pelestarian lingkungan. Beberapa pelaksanaan

waktu itu prosesnya ada yang melalui berbagai kegiatan perlombaan atau kerja bakti bersama di lingkungan anak-anak sekolah dan kelompok masyarakat.

Kemudian organisasi pelaksana program COREMAP di tingkat desa melibatkan masyarakat desa itu sendiri dengan membentuk kepengurusan di mana Kepala Desa sebagai agen kunci. Kepala Desa didampingi Fasilitator dan BPD (Badan Musyawarah Desa).. Sedangkan Motivator (MD) mendampingi Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK). Ketua LPSTK membawahi Pokmas Bidang Usaha Ekonomi Produktif, Pokmas Bidang Konservasi dan Pokmas Bidang Pemberdayaan Perempuan serta Siswamas dan LKM.

Program kegiatan yang dananya dari “*Village Grant*” untuk desa ini tercatat 75 juta rupiah. Meskipun desa ini hanya memiliki kurang dari 20 kepala keluarga nelayan ternyata dana itu digunakan untuk membangun penyediaan air dengan kegiatan pengadaan penampungan air dan pipanisasi dari daerah yang lebih tinggi. Kemudian ada pendampingan dana swadaya masyarakat diperkirakan 11,5 juta rupiah. Nantinya jika dananya cukup akan merencanakan untuk mengalirkan air (distribusi) ke wilayah bawah, dialirkan ke setiap rumah tangga dengan menggunakan pipa yang cukup. Namun sekarang tampaknya belum semuanya rumah tangga dapat menikmati air bersih tersebut. Program ini tampaknya seperti juga di Desa Kojadoi bahwa program tersebut tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya laut. Namun lebih kepada penguatan usaha di darat untuk perbaikan kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

2.3. KEPENDUDUKAN

Data dan informasi mengenai kondisi kependudukan di lokasi penelitian sangat penting sebagai landasan untuk merencanakan sebuah program intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Uraian kondisi kependudukan pada bagian ini meliputi jumlah dan komposisi penduduk, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, pekerjaan

utama dan tambahan, serta tingkat kesejahteraan penduduk yang dilihat dari penguasaan terhadap aset produksi maupun non-produksi serta kondisi permukiman dan sanitasi lingkungan di dua desa. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, meliputi data dari hasil survei, wawancara mendalam, observasi dan data statistik dari berbagai sumber.

2.3.1. Jumlah dan komposisi penduduk

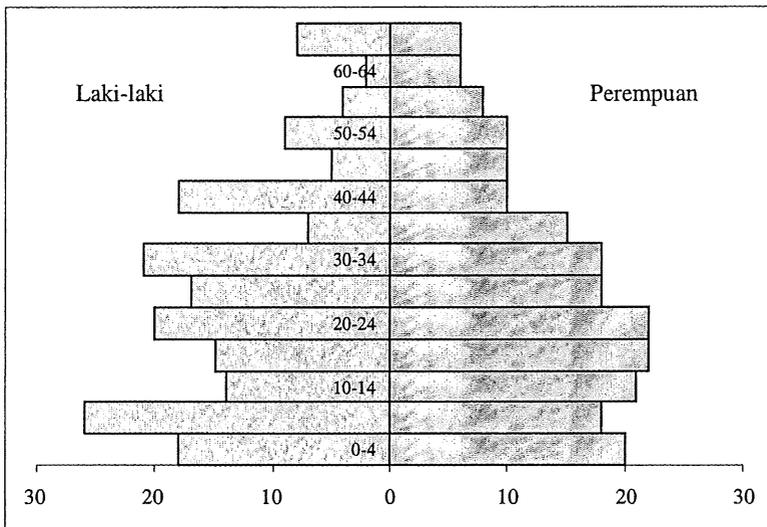
Jumlah penduduk Desa Kojadoi pada tahun 2007 mencapai 1.452 orang¹², di mana jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama (rasio jenis kelamin = 100), yaitu terdiri dari 725 laki-laki dan 727 perempuan (Lute, 2007). Data pada tahun yang sama menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 411 rumah tangga, 53 rumah tangga diantaranya dipimpin oleh kepala keluarga (KK) perempuan, sehingga rata-rata jumlah anggota dalam setiap rumah tangga adalah sekitar 3 atau 4 orang. Dengan luas wilayah mencapai 26,5 km², berarti kepadatan penduduk di desa ini mencapai 55 orang/km². Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk terdapat di areal-areal tertentu, khususnya di daerah pesisir pantai dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar. Bahkan, kepadatan penduduk di Dusun Kojadoi yang terletak di pulau tersendiri (Pulau Kojadoi) yang terpisah dari Pulau Besar relatif sangat tinggi, dengan jarak antarrumah yang berdekatan.

Hasil survei terhadap 100 rumah tangga di Desa Kojadoi menunjukkan jumlah penduduk sampel adalah 388 orang, terdiri dari 184 laki-laki dan 204 perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 90, berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 90 penduduk laki-laki di desa ini. Apabila dilihat berdasarkan komposisi umur, maka struktur penduduk sampel Desa Kojadoi tergolong pada

¹² Publikasi data statistik resmi terakhir menunjukkan jumlah penduduk di Desa Kojadoi pada tahun 2006 mencapai 1.441 jiwa, terdiri dari 722 laki-laki dan 719 perempuan, dengan jumlah KK yang sama (411) (BPS Kabupaten Sikka, 2007). Sementara itu, data sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah penduduk di desa ini pada tahun 2003 sebanyak 1.290 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 48 jiwa/km² (dikutip dari Daliyo dkk, 2007).

penduduk muda¹³. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada kelompok umur muda (0-14 tahun) yang mencapai 30,2 persen, sedangkan 66,2 persen penduduk sampel berusia produktif (15-64 tahun) dan sisanya (3,6 persen) berusia 65 tahun ke atas. Dengan komposisi penduduk tersebut, maka rasio ketergantungan penduduk sampel sebesar 48, artinya setiap 100 orang produktif (usia kerja) menanggung 48 orang usia non-produktif.

Diagram 2.1. Piramida Penduduk Sampel Desa Kojadoi, 2008



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2008

Data kependudukan di Desa Namangkewa pada tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di desa ini mencapai 2.132

¹³ Dalam demografi, suatu daerah memiliki struktur penduduk muda apabila terdapat lebih dari 40 persen penduduk yang termasuk dalam kelompok umur muda (0-14 tahun).

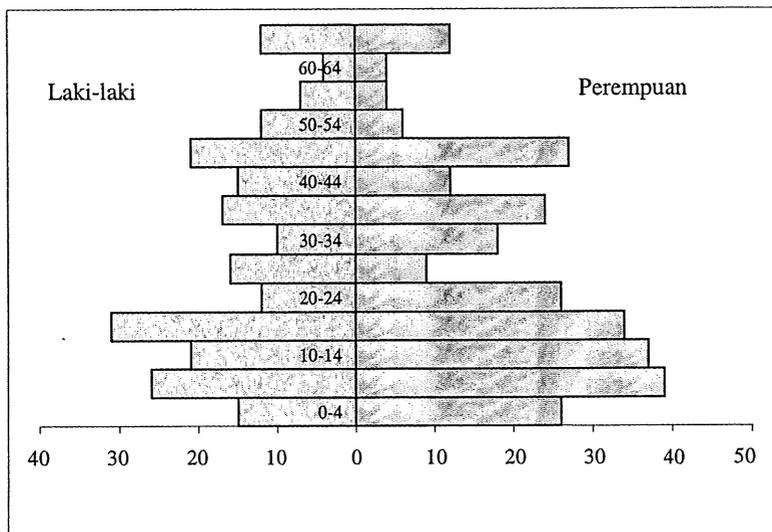
orang¹⁴, terdiri dari 1.023 laki-laki dan 1.109 perempuan (Pare, 2007). Dari data tersebut, dapat dihitung rasio jenis kelamin sebesar 92, artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki. Data dari sumber yang sama menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 423 rumah tangga, sehingga rata-rata jumlah anggota dalam setiap rumah tangga adalah 5 orang. Dengan luas wilayah hanya mencapai 1,43 km², berarti tingkat kepadatan penduduk di Desa Namangkewa sangat tinggi, yakni mencapai 1.491 orang/km².

Jika dilihat berdasarkan dusun, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Dusun Namangjawa sebanyak 834 orang (184 KK), terdiri dari 370 laki-laki dan 464 perempuan. Sedangkan jumlah penduduk di Dusun Kewapante sebanyak 781 orang (136 KK), terdiri dari 391 laki-laki dan 390 perempuan. Sementara itu, jumlah penduduk di Dusun Napungseda sebanyak 517 orang (103 KK), terdiri dari 262 laki-laki dan 255 perempuan.

Hasil survei terhadap 100 rumah tangga di Desa Namangkewa menunjukkan jumlah penduduk sampel adalah 497 orang, terdiri dari 219 laki-laki dan 278 perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 79, berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan hanya terdapat 79 penduduk laki-laki di desa ini. Apabila dilihat berdasarkan komposisi umur, maka struktur penduduk sampel Desa Namangkewa tergolong pada penduduk muda. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada kelompok umur muda (0-14 tahun) yang mencapai 33,0 persen, sedangkan 62,2 persen penduduk sampel berusia produktif (15-64 tahun) dan sisanya (4,8 persen) berusia 65 tahun ke atas. Dengan komposisi penduduk tersebut, maka rasio ketergantungan penduduk sampel sebesar 61, artinya setiap 100 orang produktif (usia kerja) menanggung 61 orang usia non-produktif.

¹⁴ Publikasi data statistik resmi terakhir menunjukkan jumlah penduduk di Desa Namangkewa pada tahun 2006 mencapai 2.448 jiwa, terdiri dari 1.042 laki-laki dan 1.446 perempuan, dengan jumlah KK sebanyak 362 rumah tangga (BPS Kabupaten Sikka, 2007). Sementara itu, data sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah penduduk di desa ini pada tahun 2003 sebanyak 2.417 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 1.464 jiwa/ km² (dikutip dari Daliyo dkk, 2007).

Diagram 2.2. Piramida Penduduk Sampel Desa Namangkewa, 2008



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI, 2008

Penduduk di Desa Kojadoi berasal dari berbagai etnis, antara lain etnis Bugis, Buton dan Iwan (daerah Sikka daratan di sekitar Kewapante/Kangae). Mayoritas penduduk di Dusun Kojadoi beretnis Bugis dan Buton, sebaliknya sebagian besar penduduk beretnis Iwan mendiami Dusun Koja Besar dan Margajong. Mayoritas (97,5 persen) penduduk Desa Kojadoi beragama Islam, sedangkan sisanya beragama Katolik.

Sementara itu, masyarakat Desa Namangkewa merupakan masyarakat semi kota yang memiliki tingkat kemajemukan yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari kompleksitas warga yang 90 persen diantaranya adalah pendatang. Mayoritas penduduk menganut agama Katolik (95 persen) dan sisanya beragama Islam, Protestan, Hindu dan Budha.

2.3.2. Pendidikan dan keterampilan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah antara lain dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk di daerah tersebut. Data mengenai sebaran penduduk di dua desa penelitian berdasarkan tingkat pendidikannya menunjukkan kondisi yang relatif masih memprihatinkan. Data di Desa Kojadoi misalnya, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk (94,2 persen) memiliki tingkat pendidikan tertinggi pada jenjang SD/ sederajat ($n=1.112$ orang). Sedangkan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP dan SMA masing-masing hanya sebesar 2,5 persen dan 2,7 persen. Data dari sumber yang sama menyebutkan terdapat sebanyak 137 orang di desa ini yang sama sekali tidak bisa baca-tulis (buta aksara dan angka latin), sebagian besar berusia di atas 25 tahun. Sementara itu kondisi terakhir menyebutkan masih terdapat anak putus sekolah sebanyak 10 orang, terdiri dari 3 orang pada jenjang SD, 5 orang pada jenjang SMP dan 2 orang lainnya pada jenjang SMA (Lute, 2007).

Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Namangkewa menunjukkan kondisi yang lebih baik, meskipun secara umum juga masih perlu terus ditingkatkan. Proporsi penduduk yang memiliki pendidikan tertinggi pada jenjang SD dan SMA menunjukkan jumlah yang sama, yakni sebesar 30,2 persen ($n=844$ orang). Sedangkan penduduk yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang SLTP juga relatif besar (18,6 persen). Sebagian kecil lainnya bahkan telah menamatkan pendidikan pada jenjang Diploma 3 (5,1 persen) dan Sarjana (4,6 persen). Meskipun demikian, data dari sumber yang sama menyebutkan masih terdapat sebanyak 95 orang (11,3 persen) yang tidak menamatkan pendidikan pada jenjang terendah/SD (Pare, 2007).

Sejalan dengan kondisi makro di tingkat desa, data hasil survei terhadap 200 rumah tangga di lokasi penelitian juga menunjukkan kualitas SDM yang relatif masih rendah. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa sebagian besar (hampir 80 persen) ART yang berusia 7 tahun ke atas masih memiliki tingkat pendidikan tertinggi

pada jenjang SD tamat ke bawah. Bahkan terdapat sebanyak 54 ART (7 persen) yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Tabel 2.1. Distribusi Penduduk Sampel (7 tahun ke atas) menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008 (Persentase)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Kojadoi) N=341	Kawasan Daratan (Namangkewa) N=433	Jumlah (N=774)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum/tidak sekolah	4,7	8,8	7,0
Belum/tidak tamat SD	28,2	30,0	29,2
SD tamat	48,4	32,6	39,5
SLTP tamat	11,4	14,8	13,3
SLTA tamat	7,3	13,9	11,0
Total	100	100	100

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI 2008

Selain dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya, kualitas SDM di suatu wilayah juga dapat dilihat dari berbagai keterampilan (*skill*) yang dimiliki penduduk di wilayah tersebut yang berpotensi untuk terus dikembangkan. Keterampilan yang dimiliki penduduk di suatu wilayah biasanya terkait dengan potensi alam yang ada di wilayah itu sendiri. Di Desa Kojadoi misalnya, keterampilan utama yang dimiliki penduduk adalah yang berkaitan dengan kegiatan melaut. Keterampilan tersebut antara lain adalah kemampuan untuk melaut (menangkap ikan dan biota laut lainnya) yang telah dimiliki secara turun-temurun. Akan tetapi, kemampuan melaut tersebut umumnya masih bersifat tradisional dengan menggunakan armada dan alat tangkap yang sederhana. Demikian juga halnya dengan kegiatan pengolahan pascapenangkapan yang belum banyak dimiliki masyarakat. Hal ini menyebabkan hasil tangkapan nelayan biasanya

langsung dijual dalam bentuk ikan segar, jarang sekali hasil tangkapan di desa ini yang dijual dalam bentuk ikan kering atau dalam bentuk hasil pengolahan lainnya.

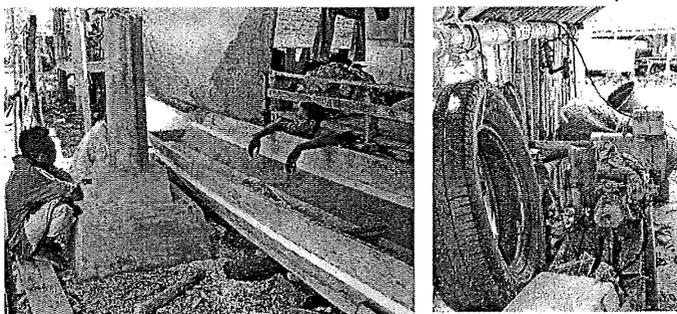
Selain keterampilan di bidang perikanan tangkap yang umumnya diwariskan secara turun-temurun, sebagian besar penduduk di Desa Kojadoi telah memiliki keterampilan di bidang perikanan budi daya, terutama budi daya rumput laut. Menurut keterangan beberapa narasumber, masyarakat mulai mengenal keterampilan ini sejak awal tahun 90-an. Keterampilan ini diperkenalkan oleh seorang pengusaha dari daratan Flores yang mencoba mengembangkan budi daya rumput laut di desa ini¹⁵. Namun, usaha ini mengalami kemunduran, terutama akibat bencana alam gempa dan tsunami pada tahun 1992 yang menghancurkan hampir seluruh hasil produksi dan aset perusahaan tersebut di desa ini.

Usaha budi daya rumput laut di Desa Kojadoi mulai dirintis kembali pada tahun 1998/1999. Hal ini dilakukan melalui bimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh instansi terkait dan semakin mendapatkan dukungan pada saat dijalankannya Program COREMAP Fase I di desa ini pada awal tahun 2000-an. Masyarakat menyambut baik program tersebut, selain karena mendapatkan berbagai dukungan pembinaan dan permodalan, juga karena mereka sebelumnya telah mengenal keterampilan budi daya rumput laut itu sendiri. Sampai saat ini sebagian besar masyarakat di desa ini telah mengembangkan budi daya rumput laut dengan sistem rawai (bentang).

Berbagai keterampilan dimiliki nelayan dari kegiatan budi daya rumput laut ini, mulai dari kegiatan menanam benih rumput laut, membuat lahan (lokasi) budi daya rumput laut dengan mempertimbangkan faktor angin dan arus laut, merawat rumput laut

¹⁵ Pada tahun 1988 PT Budi Indo Primatama mulai beroperasi di desa ini. Mereka memperkenalkan usaha budi daya rumput laut dengan sistem rakit. Kegiatan produksi dilaksanakan dengan menggunakan sistem plasma-inti antara perusahaan dan nelayan budi daya. Nelayan budi daya diberikan target produksi dalam jangka waktu tertentu (400 rakit/petani), sedangkan kegiatan pemasaran dan penentuan harga rumput laut ditentukan langsung oleh perusahaan.

(termasuk mencegah dari kerusakan akibat hama/penyakit seperti penyakit *ice-ice*) sampai dengan kegiatan memanen hasil produksi rumput laut. Sebagian penduduk juga memiliki keterampilan tambahan, yaitu menyelam dengan menggunakan kompresor. Mereka yang memiliki keterampilan dan alat kompresor ini dapat menyewakan tenaga mereka untuk menyelam pada musim awal kegiatan budi daya rumput laut, yaitu pada saat menanam tali (bentang) di areal lokasi budi daya rumput laut milik para nelayan. Sebagian penduduk lainnya juga memanfaatkan kegiatan budi daya rumput laut ini dengan menjadi tenaga pengumpul (pedagang) rumput laut milik para nelayan. Saat ini ada sekitar 4 atau 5 pengumpul rumput laut di desa ini. Mereka umumnya menjadi 'anak buah' dari pengusaha atau 'pengumpul besar' yang ada di tingkat kabupaten.



Gambar 2.7

Keterampilan membuat kapal kayu/perahu (kiri) beserta sarana/peralatan yang dimiliki (kanan)

Selain keterampilan di bidang perikanan tangkap dan budi daya rumput laut, sebagian penduduk di Desa Kojadoi juga memiliki keterampilan khusus di bidang pertukangan, seperti membuat kapal kayu (perahu) dan memperbaiki kapal kayu (perahu) yang mengalami kerusakan. Sebagian lagi memiliki keterampilan sebagai buruh bangunan, antara lain sebagai tukang batu dan tukang kayu.

Kalangan ibu-ibu dan remaja putri umumnya juga memiliki keterampilan untuk membantu usaha budi daya rumput laut ini, antara

lain keterampilan untuk membersihkan tali dan hama/penyakit serta keterampilan mengikat tali rumput laut. Banyak di antara mereka yang dapat mencari pendapatan tambahan dengan menjadi buruh ikat rumput laut bagi nelayan budi daya yang membutuhkan jasa mereka pada waktu-waktu tertentu.

Selain keterampilan terkait usaha budi daya rumput laut, sebagian ibu-ibu di Desa Kojadoi juga memiliki beberapa keterampilan lainnya, antara lain keterampilan berdagang dengan membuka warung/kios barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Selain itu, sebagian ibu-ibu di desa ini juga memiliki keterampilan membuat tenun ikat, mengolah kelapa menjadi minyak kelapa serta membuat kue-kue untuk dijual sendiri maupun dititipkan ke orang lain.



Gambar 2.8
Keterampilan ibu-ibu membantu usaha budi daya rumput laut (kiri)
dan membuat tenun ikat (kanan)

Letak geografis Desa Namangkewa yang berada di kawasan daratan dan relatif dekat dengan daerah perkotaan turut berpengaruh terhadap keragaman jenis keterampilan yang dimiliki penduduk di desa ini. Keterampilan bercocok tanam dikuasai sebagian besar penduduk di desa ini, terutama bagi mereka yang memang telah sejak lama (turun-temurun) memiliki lahan untuk kegiatan bercocok tanam tersebut. Sementara itu, sebagian masyarakat di daerah pesisir pantai desa ini memiliki keterampilan melaut (perikanan tangkap), masih

jarang yang mencoba untuk mengembangkan usaha budi daya rumput laut.

Keterampilan lain yang dimiliki penduduk di Desa Namangkewa antara lain di bidang perdagangan (berdagang di rumah/kios atau di Pasar Geliting), pertukangan (tukang batu dan tukang kayu), transportasi (tukang ojek, supir angkutan) dan jasa (karyawan pemerintah/swasta). Sementara itu, kalangan ibu-ibu juga memiliki berbagai keterampilan, antara lain membantu kegiatan pertanian tanaman pangan atau tanaman keras/perkebunan, membuat tenun ikat, mengolah kelapa menjadi minyak kelapa, serta membuat kue-kue, termasuk aneka kue berbahan dasar rumput laut.

2.3.3. Pekerjaan utama dan tambahan

Pekerjaan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa, sesuai dengan pengakuan responden. Adapun uraian tentang pekerjaan pada bagian ini meliputi pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan yang dikategorikan menurut jenis, lapangan dan status pekerjaan. Selain deskripsi tentang pekerjaan responden, gambaran tentang kegiatan utama yang dilakukan responden dijelaskan di bagian awal tulisan ini.

Dari jumlah penduduk Desa Kojadoi yang mencapai 1.452 orang, 577 orang (39,8 persen) diantaranya berada dalam usia kerja. Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, sebanyak 260 orang (45,1 persen) diantaranya telah bekerja, sedangkan 317 orang (54,9 persen) lainnya belum bekerja (Lute, 2007). Dilihat dari kualitas angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan, dapat dilihat bahwa sebagian besar (sekitar 85 persen) diantaranya berpendidikan tamat SD. Hanya sebagian kecil penduduk usia kerja yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang SLTP ke atas.

Mata pencaharian utama penduduk di Desa Kojadoi pada umumnya telah mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan usaha budi daya rumput laut yang dirasakan lebih memberikan keuntungan dari sisi pendapatan. Penduduk di Dusun Kojadoi misalnya, sebelumnya mereka memiliki mata pencaharian sebagai

nelayan perikanan tangkap. Akan tetapi, saat ini sebagian besar penduduk di dusun ini telah beralih menggantungkan sumber pendapatan rumah tangganya dari usaha budi daya rumput laut. Kegiatan menangkap ikan hanya bersifat sebagai aktivitas tambahan dengan hasil tangkapan yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau dijual ke masyarakat setempat saja. Sudah jarang dijumpai lagi nelayan yang menjual hasil tangkapan ikan dalam jumlah besar ke Pasar Maumere atau Pasar Geliting di kawasan daratan. Sementara itu, penduduk di Dusun Koja Besar dan Margajong (Pulau Besar) juga sudah mulai mengembangkan usaha budi daya rumput laut, di samping mata pencaharian utama mereka sebagai petani ladang dan sesekali melakukan kegiatan menangkap ikan.

Mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di Desa Namangkewa adalah di sektor pertanian (sekitar 80%). Sebagian lainnya memiliki mata pencaharian di bidang jasa (PNS atau pegawai swasta), perdagangan (toko/kios/warung), nelayan, transportasi (tukang ojek), tenaga kasar (tukang batu/kayu, buruh) dan usaha-usaha alternatif lainnya.

Jumlah nelayan di Desa Namangkewa relatif sedikit. Hasil wawancara dengan berbagai informan menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga nelayan di desa ini kurang dari 10 persen dari total rumah tangga yang ada. Hasil identifikasi tim fasilitator COREMAP di desa setempat menyebutkan jumlah nelayan di Desa Namangkewa sebanyak 14 orang, separuh diantaranya berstatus sebagai nelayan penuh dan separuh lainnya hanya sebagai nelayan paruh waktu. Sebagian besar nelayan tersebut merupakan nelayan tradisional dilihat dari armada penangkapan, alat tangkap dan jenis ikan yang ditangkap nelayan-nelayan tersebut. Mereka umumnya tinggal di daerah pesisir desa ini, tepatnya di Dusun Namangjawa, yang juga terletak di pinggir jalan utama antarkabupaten.

Hasil survei terhadap anggota rumah tangga (ART) terpilih mengenai kegiatan utama ART selama enam bulan terakhir sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 698 ART berusia 10 tahun ke atas, lebih dari 60 persen

diantaranya mengaku bekerja. Sedangkan 32,7 persen ART memiliki kegiatan utama lain, yaitu bersekolah atau mengurus rumah tangga. Hanya 6,0 persen ART yang dalam 6 bulan terakhir ini berstatus menganggur, tidak mencari kerja atau sedang mencari kerja.

Tabel 2.2. Distribusi Penduduk Sampel (10 tahun ke atas) menurut Kegiatan Utama, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008 (Persentase)

Kegiatan Utama	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Kojadoi) N=306	Kawasan Daratan (Namangkewa) N=392	Jumlah (N=698)
(1)	(2)	(3)	(5)
Bekerja	72,2	52,6	61,2
Menganggur/ Tidak mencari kerja	2,3	6,1	4,4
Mencari kerja	1,3	1,8	1,6
Sekolah	22,9	30,9	27,4
Mengurus rumah tangga	1,3	8,4	5,3
Lainnya	-	0,3	0,1
Total	100	100	100

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI 2008

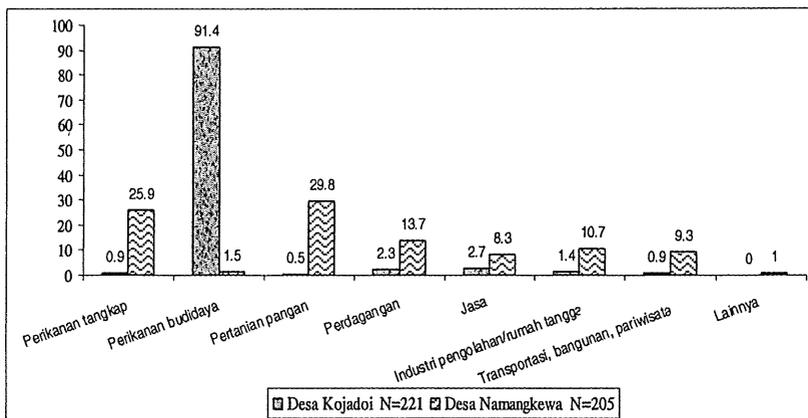
Apabila data pada Tabel 2.2 di atas dilihat menurut lokasi desa, didapatkan informasi bahwa persentase ART berusia 10 tahun ke atas yang masih berstatus sekolah di Desa Kojadoi hanya mencapai 22,9 persen, lebih rendah dibandingkan angka di Desa Namangkewa yang mencapai 30,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa banyak ART di Desa Kojadoi yang lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA atau lebih tinggi. Faktor aksesibilitas penduduk di daerah pulau-pulau kecil yang lebih sulit untuk menjangkau sarana pendidikan yang ada tampaknya cukup berpengaruh terhadap kondisi tersebut. Pilihan penduduk di Desa Kojadoi untuk bekerja juga terlihat dari data hasil survei. Persentase ART yang bekerja di desa ini mencapai lebih dari 70 persen, lebih

tinggi dibandingkan angka di Desa Namangkewa yang mencapai 52,6 persen.

Pekerjaan utama

Hasil survei mengenai pekerjaan utama terhadap 100 rumah tangga terpilih di masing-masing desa menunjukkan kecenderungan yang berbeda antara kondisi penduduk di Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan utama ART cukup bervariasi (Diagram 2.3).

Diagram 2.3. Distribusi Penduduk Sampel menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008 (Persentase)



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI 2008

Perikanan budi daya rumput laut tampaknya telah menjadi tumpuan utama masyarakat di Desa Kojadoi. Dari 221 ART di desa ini yang berusia 10 tahun ke atas dan memiliki kegiatan utama bekerja, mayoritas (91,4 persen) bekerja pada perikanan budi daya rumput laut, 42,1 persen diantaranya merupakan pemilik usaha budi daya rumput laut, sedangkan 49,3 persen lainnya merupakan ART

yang turut membantu mengerjakan usaha budi daya tersebut. Sebagian kecil ART lainnya memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor jasa (PNS, guru, aparat desa), perdagangan (perdagangan rumput laut atau kios menjual kebutuhan rumah tangga), industri rumah tangga (pembuatan tenun ikat, minyak kelapa atau kue), bangunan dan pertanian pangan. Bahkan hanya sekitar 1 persen ART yang masih menjadikan perikanan tangkap sebagai lapangan pekerjaan utama mereka.

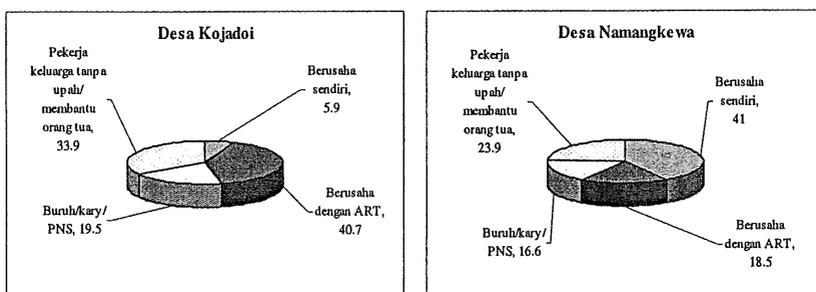
Berbeda dengan kondisi di Desa Kojadoi, sektor pertanian tampaknya cukup dominan di Desa Namangkewa sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki desa di kawasan daratan ini. Dari 205 ART yang berusia 10 tahun ke atas dan memiliki kegiatan utama bekerja, sebagian besar diantaranya memiliki lapangan pekerjaan utama di subsektor pertanian pangan (sekitar 30 persen) dan perikanan tangkap (sekitar 25 persen¹⁶). Persentase yang hampir sama (sekitar 10 persen) dapat dijumpai pada mereka yang memiliki pekerjaan utama di sektor perdagangan (pedagang ikan, pedagang di pasar atau pedagang kios menjual kebutuhan rumah tangga di rumah), industri pengolahan/rumah tangga (pembuatan tenun ikat, minyak kelapa atau kue), transportasi/bangunan/pariwisata dan jasa (PNS, karyawan swasta). Hanya 1,5 persen ART yang mengerjakan usaha budi daya rumput laut sebagai lapangan pekerjaan utama mereka.

Dilihat dari status pekerjaannya, sebagian besar ART di Desa Kojadoi (sekitar 40 persen) berusaha dengan ART lainnya (Diagram 2.4). Mereka ini terutama adalah KRT yang mengusahakan budi daya

¹⁶ Relatif banyaknya ART yang bekerja di sektor perikanan tangkap ini dikarenakan responden dalam survei ini tidak hanya mereka yang tinggal di Desa Namangkewa, tetapi juga di desa sekitar (Desa Waiara di sebelah timur dan Desa Watumilok di sebelah barat). Kenyataan sebenarnya menunjukkan persentase penduduk Desa Namangkewa yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan relatif sedikit, bahkan kurang dari 10 persen. Hal ini antara lain dikarenakan desa ini memiliki panjang garis pantai yang relatif pendek, yakni hanya sekitar 600 meter, sehingga secara tidak langsung hal ini berpengaruh terhadap mereka yang bekerja di sektor perikanan yang umumnya adalah mereka yang tinggal di daerah pesisir pantai.

rumpun laut, di mana usaha tersebut pada umumnya dibantu oleh istri atau ART yang lain. Hal ini terlihat dari persentase ART yang berstatus sebagai pekerja keluarga tanpa upah/membantu orang tua yang relatif tinggi, yakni mencapai sekitar 34 persen. Sedangkan ART yang berstatus sebagai buruh/karyawan/PNS/TNI sekitar 20 persen, dan ART yang mengaku berusaha sendiri sebanyak 6 persen.

Diagram 2.4. Distribusi Penduduk Sampel menurut Status Pekerjaan Utama, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008 (Persentase)



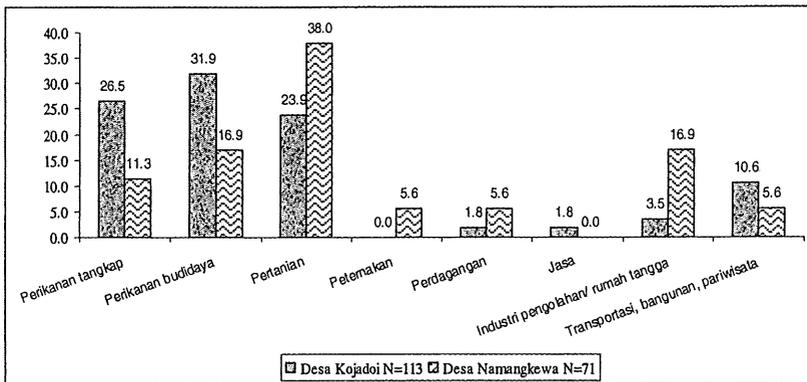
Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI 2008

Hasil survei yang sama menunjukkan sebagian besar ART di Desa Namangkewa (41 persen) mengaku berusaha sendiri. Mereka ini terutama adalah KRT yang bekerja di subsektor pertanian tanaman pangan atau tanaman keras/perkebunan. Responden umumnya mengaku mengerjakan sendiri kegiatan bercocok tanam, meskipun kenyataannya pada waktu-waktu tertentu (musim tanam atau musim panen) ada istri atau ART lain yang turut membantu. ART yang mengaku berusaha dengan ART lain adalah sebanyak 18,5 persen, sedangkan ART yang berstatus sebagai pekerja keluarga tanpa upah/membantu orang tua juga relatif tinggi (24 persen). Sekitar 17 persen ART lainnya memiliki status pekerjaan sebagai buruh, karyawan atau PNS.

Pekerjaan tambahan

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa selain pekerjaan utama, beberapa ART juga memiliki pekerjaan tambahan lain yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan rumah tangga. Dari 426 ART berusia 10 tahun ke atas dan memiliki kegiatan utama bekerja, sebanyak 184 orang diantaranya (43,2 persen) juga memiliki pekerjaan tambahan di samping pekerjaan utama mereka. Sebagaimana ilustrasi pada karakteristik pekerjaan utama di atas, hasil survei mengenai pekerjaan tambahan juga menunjukkan kecenderungan yang berbeda di dua desa penelitian (Diagram 2.5).

Diagram 2.5. Distribusi Penduduk Sampel menurut Lapangan Pekerjaan Tambahan, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008 (Persentase)



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI 2008

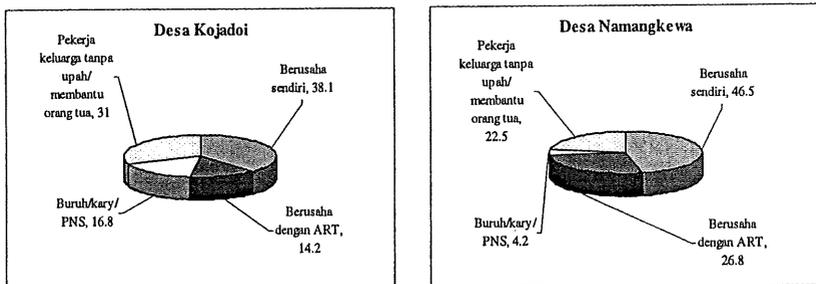
Dari 113 ART di Desa Kojadoi yang memiliki pekerjaan tambahan, 31,9 persen diantaranya bekerja pada perikanan budi daya rumput laut, namun sebagian besar diantara mereka ini hanya bersifat membantu mengerjakan usaha budi daya tersebut (bukan pemilik utama). Persentase ART yang memiliki pekerjaan tambahan di perikanan tangkap juga relatif besar (sekitar 25 persen), hal ini

menunjukkan bahwa memang telah terjadi pergeseran mata pencaharian utama penduduk Desa Kojadoi dari perikanan tangkap menjadi perikanan budi daya rumput laut. Persentase yang hampir sama (23,9 persen) dijumpai pada ART yang memiliki pekerjaan tambahan di subsektor pertanian tanaman pangan atau tanaman keras/perkebunan. Sebagian kecil ART lainnya memiliki pekerjaan tambahan di sektor industri pengolahan/rumah tangga (pembuatan perahu, tenun ikat atau kue), perdagangan ('pengumpul' rumput laut) dan jasa (PNS, guru, aparat desa).

Sementara itu, mayoritas penduduk di Desa Namangkewa memiliki pekerjaan tambahan di subsektor pertanian pangan. Dari 71 ART di Desa Namangkewa yang memiliki pekerjaan tambahan, sebagian besar diantaranya (38 persen) bekerja di subsektor pertanian tanaman pangan atau tanaman keras/perkebunan. Persentase relatif besar juga ditemui pada ART yang bekerja di sektor perikanan budi daya rumput laut dan industri rumah tangga –pembuatan minyak kelapa atau tenun ikat– (masing-masing sekitar 17 persen) serta perikanan tangkap (11,3 persen). Sebagian kecil ART lainnya memiliki pekerjaan tambahan di subsektor peternakan, sektor perdagangan (pedagang ikan atau kebutuhan rumah tangga) dan transportasi/bangunan/ pariwisata.

Dilihat dari status pekerjaannya, sebagian besar ART di Desa Kojadoi berusaha sendiri (38 persen) atau sebagai pekerja keluarga tanpa upah/membantu orang tua (31 persen) (Diagram 2.6). Sedangkan ART yang berstatus sebagai buruh/karyawan/PNS mencapai sekitar 17 persen, dan sisanya (sekitar 14 persen) berusaha dengan ART lainnya. Sementara itu, sebagian besar ART (46,5 persen) di Desa Namangkewa mengaku berusaha sendiri. Sedangkan ART yang berusaha dengan ART lainnya dan ART yang berstatus sebagai pekerja keluarga tanpa upah/membantu orang tua masing-masing sekitar 27 persen dan 23 persen. Hanya sebagian kecil ART (4,2 persen) yang berstatus sebagai buruh/karyawan/PNS.

Diagram 2.6. Distribusi Penduduk Sampel menurut Status Pekerjaan Tambahan, Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008 (Persentase)



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI 2008

2.3.4. Pemilikan aset dan kondisi lingkungan

Uraian pada bagian ini diawali dengan bahasan mengenai pemilikan dan penguasaan terhadap aset rumah tangga, baik aset produksi maupun aset non produksi. Uraian dilanjutkan dengan memaparkan kondisi permukiman dan sanitasi lingkungan di lokasi kajian.

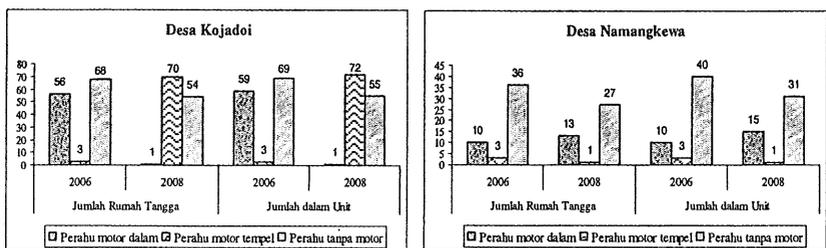
Pemilikan dan penguasaan aset produksi dan non produksi

Kepemilikan aset produksi rumah tangga nelayan dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan terhadap armada penangkapan dan alat tangkap. Armada penangkapan berupa perahu merupakan aset rumah tangga yang sangat berharga bagi nelayan. Semakin canggih perahu yang dimiliki, maka semakin besar pula jangkauan penangkapan dan hasil tangkapan yang didapatkan.

Hasil survei (Diagram 2.7) menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga hanya memiliki armada penangkapan yang relatif sederhana. Di Desa Kojadoi, perahu motor tempel dimiliki oleh 70 rumah tangga, sedangkan perahu tanpa motor dimiliki oleh 54 rumah tangga. Hanya satu rumah tangga di desa ini yang tercatat memiliki

perahu motor dalam. Sementara itu, perahu tanpa motor dimiliki oleh 27 rumah tangga di Desa Namangkewa, perahu motor dalam dimiliki oleh 13 rumah tangga dan perahu motor tempel dimiliki oleh satu rumah tangga.

Diagram 2.7. Kepemilikan Aset Produksi berupa Armada Penangkapan, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI 2008

Catatan: Perahu motor dalam dan motor tempel di dua desa memiliki ukuran mesin bervariasi, sebagian besar diantaranya berukuran 8 PK. Sedangkan perahu tanpa motor (sampan) juga memiliki ukuran *body* bervariasi (mulai dari 2 m x 0,5 m sampai dengan 12 m x 0,5 m), sebagian besar diantaranya berukuran 3 m x 0,5 m.

Diagram di atas juga menunjukkan perubahan yang cukup signifikan terhadap kepemilikan armada penangkapan, khususnya di Desa Kojadoi, dalam dua tahun terakhir (2006-2008). Pada tahun 2006, terdapat 59 unit perahu motor dalam di desa ini yang dimiliki oleh 56 rumah tangga. Namun, pada tahun 2008 ini hanya teridentifikasi sebanyak satu unit perahu motor dalam yang dimiliki satu rumah tangga. Demikian juga dengan kepemilikan perahu tanpa motor (sampan) yang menurun dalam dua tahun terakhir, yakni dari 69 unit (68 rumah tangga) pada tahun 2006 menjadi 55 unit (54 rumah tangga) pada tahun 2008. Kondisi sebaliknya terjadi pada kepemilikan jenis armada perahu motor tempel. Dua tahun lalu hanya terdapat 3 rumah tangga yang memiliki perahu motor tempel masing-

masing sebanyak satu unit. Namun pada tahun ini jumlah rumah tangga yang memiliki perahu motor tempel meningkat tajam menjadi 70 rumah tangga dengan total kepemilikan mencapai 72 unit, yang berarti terdapat sebagian kecil rumah tangga yang memiliki perahu motor tempel lebih dari satu unit.

Perubahan kepemilikan jenis armada penangkapan di Desa Kojadoi ini tampaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama karena semakin bergesernya mata pencaharian utama masyarakat yang telah meninggalkan aktivitas menangkap ikan (melaut) dan secara total menggantungkan sumber pendapatan rumah tangganya dari usaha budi daya rumput laut. Lokasi usaha budi daya yang umumnya hanya berada di perairan sekitar desa ini (tidak terlalu jauh) menyebabkan kebutuhan para nelayan terhadap armada perahu yang lebih canggih (perahu motor dalam) menjadi berkurang, bahkan cenderung tidak ada. Hal inilah yang mungkin menjadi faktor sudah hampir tidak adanya lagi rumah tangga yang memiliki perahu motor dalam. Mereka mungkin telah menjual armada tersebut dan menggantinya dengan yang lebih sederhana, yaitu perahu motor tempel. Dengan armada ini, para nelayan budi daya dapat lebih menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang harganya cenderung terus meningkat. Mesin motor pada perahu dinyalakan hanya pada saat diperlukan, selebihnya nelayan tersebut tidak perlu menyalakan mesin motor mengingat lokasi budi daya tidak terlalu jauh. Kondisi ini tentunya berbeda pada saat para nelayan tersebut masih melakukan aktivitas melaut, apalagi mereka yang lokasi melautnya relatif jauh di luar perairan desa ini. Mereka membutuhkan perahu motor dalam dan harus mengeluarkan biaya BBM setiap kali pergi melaut dengan hasil tangkapan yang dirasakan tidak menentu.

Perubahan jenis armada penangkapan di Desa Kojadoi ke armada yang lebih sederhana tersebut (dari perahu motor dalam menjadi perahu motor tempel) lebih kepada faktor kebutuhan terhadap aktivitas budi daya rumput laut, dan bukan karena faktor menurunnya kesejahteraan masyarakat secara signifikan di desa ini, meskipun dalam dua tahun terakhir memang terjadi penurunan pendapatan rata-rata penduduk sampel (Bab IV). Hal ini dapat dilihat

dari kepemilikan armada perahu tanpa motor (sampan) yang juga menurun dan beralih ke meningkatnya kepemilikan armada perahu motor tempel. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang mampu membeli motor tempel, terutama dengan pertimbangan penggunaannya yang dapat diatur sendiri oleh nelayan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, kepemilikan armada penangkapan di Desa Namangkewa relatif tidak banyak berubah. Jumlah perahu motor dalam cenderung bertambah meskipun tidak signifikan, sebaliknya jumlah perahu motor tempel dan perahu tanpa motor (sampan) cenderung berkurang. Beberapa informan (nelayan) mengaku mendapatkan bantuan pengadaan perahu dari berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki program di sebagian desa di wilayah pesisir utara Kecamatan Kewapante ini.

Selain armada penangkapan, salah satu aset produksi yang sangat penting dimiliki nelayan adalah berbagai jenis alat tangkap. Alat tangkap yang dimiliki oleh responden nelayan umumnya juga masih bersifat sederhana (Tabel 2.3). Alat tangkap yang umumnya dimiliki nelayan di dua desa antara lain berupa pancing rawai, jaring dan bubu. Sementara itu, sebagian nelayan di kawasan daratan (Desa Namangkewa) juga memiliki bagan apung, pukot dasar dan keramba.

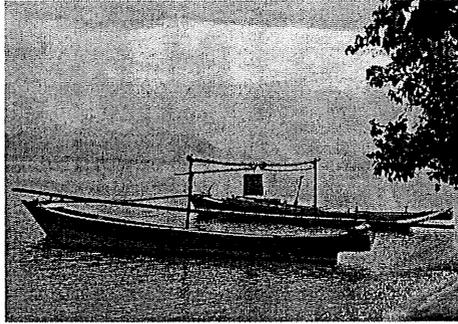
Tabel 2.3 menunjukkan kenyataan bahwa kepemilikan alat tangkap di Desa Kojadoi cenderung menurun. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pergeseran aktivitas mata pencaharian utama masyarakat ke usaha budi daya rumput laut mengakibatkan mereka mulai meninggalkan aktivitas melaut. Aktivitas melaut umumnya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari (lauk-pauk). Hal ini menyebabkan penggunaan alat tangkap juga semakin berkurang, bahkan sebagian diantaranya sudah tidak terawat (rusak) karena jarang/tidak pernah digunakan lagi.

Tabel 2.3. Kepemilikan Aset Produksi berupa Alat Tangkap, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008

Jenis Alat Tangkap	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Kojadoi)				Kawasan Daratan (Namangkewa)			
	Jumlah Rumah Tangga		Jumlah dalam Unit		Jumlah Rumah Tangga		Jumlah dalam Unit	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008	2006	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Keramba	-	-	-	-	-	3	-	4
Bagan apung	-	-	-	-	8	15	8	18
Bubu	15	7	53	28	2	3	13	14
Jaring	18	6	37	25	35	25	100	60
Pancing rawai	19	16	29	34	24	11	80	44
Pukat dasar	-	-	-	-	-	4	-	5

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI 2008

Kepemilikan alat tangkap di Desa Namangkewa, khususnya jaring dan pancing rawai, juga cenderung menurun. Sebaliknya, kepemilikan alat tangkap berupa bagan apung semakin bertambah. Jika pada tahun 2006 terdapat hanya 8 rumah tangga yang memiliki bagan apung (masing-masing 1 unit), maka pada tahun 2008 ini terdapat sebanyak 15 rumah tangga memiliki alat tangkap tersebut, beberapa diantaranya memiliki bagan apung lebih dari 1 buah. Bagan apung yang ada di daerah ini umumnya bagan bergerak yang terdiri dari 2 sampan dan diikat dengan menggunakan bambu (Gambar 2.9).



Gambar 2.9
Alat tangkap ‘bagan apung’ yang dimiliki
sebagian nelayan di Desa Namangkewa

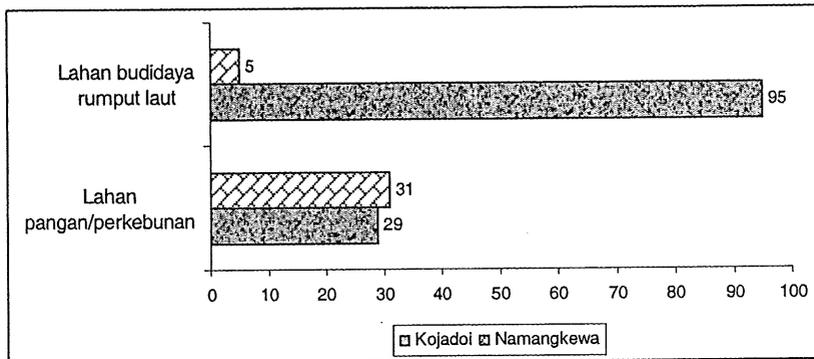
Selain kepemilikan aset produksi berupa sarana dan alat tangkap di atas, kepemilikan lahan dapat menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat untuk terus dikembangkan. Data hasil survei menunjukkan sebagian besar rumah tangga (95 persen) di Desa Kojadoi memiliki lahan budi daya rumput laut dengan jumlah dan lokasi yang berbeda-beda¹⁷ (Diagram 2.8). Sementara itu, terdapat sebanyak 29 rumah tangga sampel di desa ini yang juga memiliki lahan pangan/perkebunan. Lahan tersebut umumnya hanya berukuran kecil (kurang dari 1 ha) dan terletak di daratan Pulau Besar.

Sementara itu, sebanyak 31 rumah tangga di Desa Namangkewa memiliki lahan pangan/perkebunan dengan luas dan lokasi yang bervariasi, sebagian besar diantaranya memiliki luas

¹⁷ Data hasil survei menunjukkan lahan budi daya rumput laut yang dimiliki rumah tangga di Desa Kojadoi bervariasi. Penduduk mengenal beberapa ukuran untuk menyebutkan kepemilikan mereka terhadap lahan budi daya ini, antara lain dalam ukuran ‘lokasi’, ‘kavling’ dan ‘iris/bentang’. Sebagian besar rumah tangga umumnya hanya memiliki 1 lokasi budi daya, sedangkan sebagian kecil lainnya memiliki 2, 3, 4 bahkan 5 lokasi budi daya. Jumlah kavling yang dimiliki juga beragam mulai dari 1 sampai dengan 8 kavling, di mana sebagian besar rumah tangga memiliki 2-4 kavling. Demikian juga bila dilihat dalam ukuran ‘iris/bentang’ yang relatif berbeda-beda, sebagian besar memiliki lahan budi daya sebanyak 60 dan 100 iris/bentang.

sebesar 0,5-1,5 ha. Sedangkan jumlah rumah tangga di desa ini yang memiliki lahan budi daya rumput laut adalah sebanyak 5 rumah tangga. Lahan budi daya tersebut umumnya memiliki luas 0,25 atau 0,5 ha.

Diagram 2.8. Kepemilikan Aset Produksi berupa Lahan Pangan dan Lahan Budi daya Rumput Laut, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI 2008

Selain kepemilikan terhadap aset produksi (armada penangkapan, alat tangkap dan lahan pangan/perkebunan serta lahan budi daya), hal lain yang penting dilihat untuk mengetahui kesejahteraan rumah tangga adalah kepemilikan terhadap berbagai aset non-produksi. Kepemilikan aset rumah tangga non-produksi meliputi rumah, alat-alat elektronik dan kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga yang menjadi sampel penelitian di dua desa telah mempunyai rumah sendiri (Tabel 2.4). Sedangkan rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri pada umumnya merupakan pendatang yang masih menyewa rumah atau mereka yang masih tinggal dengan orang tua atau keluarga besar dalam satu rumah tangga.

Cukup banyak rumah tangga di dua desa yang mempunyai alat elektronik (televisi, *VCD player*, parabola). Jumlah rumah tangga di Desa Kojadoi yang memiliki tiga jenis alat elektronik tersebut relatif hampir sama dengan di Desa Namangkewa, meskipun di Desa Kojadoi alat elektronik tersebut umumnya dinyalakan hanya pada jam-jam tertentu (biasanya terbatas pada sore sampai malam hari ketika mesin pembangkit listrik juga dinyalakan).

Tabel 2.4. Kepemilikan Aset Non-Produksi, Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008

Jenis Lahan	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Kojadoi)		Kawasan Daratan (Namangkewa)	
	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah dalam Unit	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah dalam Unit
Rumah	79	79	98	103
TV	32	32	35	35
<i>VCD Player</i>	26	26	23	23
Parabola	21	21	21	21
Perhiasan	58	bervariasi	7	bervariasi
Kendaraan bermotor	3	3	11	12
Ternak	12	bervariasi	50	136
Hand phone	40	40	12	12
Telepon rumah	-	-	1	1
Diesel/Aki/Genset	14	14	-	-

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK-LIPI 2008

Jumlah rumah tangga yang memiliki sarana komunikasi berupa telepon seluler (HP) di Desa Kojadoi relatif banyak (40 persen). Sarana komunikasi melalui HP tersebut semakin banyak dimiliki dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan sarana komunikasi alternatif tersebut cukup bermanfaat bagi masyarakat, mengingat sampai saat ini desa di kawasan pulau-pulau kecil tersebut belum dijangkau fasilitas telepon rumah.

Kondisi permukiman dan sanitasi lingkungan

- *Kondisi permukiman*

Permukiman penduduk di kawasan daratan (Desa Namangkewa) relatif hampir sama dengan permukiman di kawasan daratan lain di kabupaten ini. Bangunan rumah umumnya sudah berdinding tembok dan berdiri di atas tanah. Dinding rumah sudah bersifat permanen dengan kondisi lantai juga sudah disemen, sedangkan sebagian lainnya masih berupa lantai tanah.

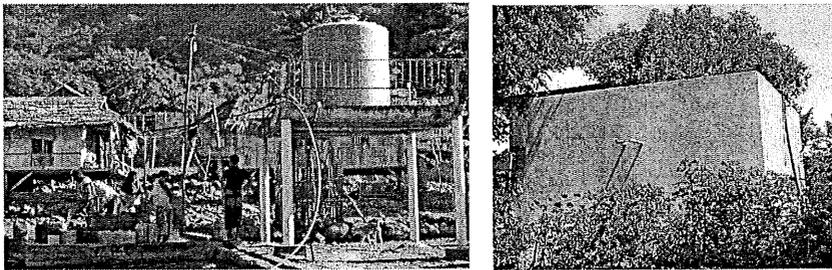
Sebaliknya, sebagian besar permukiman penduduk di Desa Kojadoi mencirikan kondisi permukiman di kawasan pulau-pulau kecil. Bangunan rumah umumnya berbentuk rumah panggung dengan bahan bangunan terutama dari kayu. Demikian juga dengan kondisi dinding dan lantai rumah yang umumnya juga dari kayu/papan. Namun demikian, sebagian kecil rumah tangga juga telah memiliki bangunan rumah yang berdinding tembok dengan kondisi lantai sudah disemen/dikeramik.

- *Sanitasi lingkungan*

Sarana air bersih menjadi salah satu kebutuhan vital penduduk. Akses penduduk terhadap air bersih di dua desa umumnya telah mengalami perkembangan dalam dua tahun terakhir, salah satunya melalui intervensi program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sumber air bersih di Desa Kojadoi umumnya banyak dijumpai di Dusun Koja Besar (daratan Pulau Besar). Sebelumnya, masyarakat di Dusun Kojadoi harus pergi ke Pulau Besar untuk mengambil air bersih tersebut, baik untuk sumber air minum maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Mereka umumnya pergi dengan menggunakan sampan dan membawa tempat-tempat khusus (jerigen) untuk menampung air. Setiap hari, setidaknya dua kali (pagi dan sore hari) setiap rumah tangga harus pergi mengambil air sehingga kegiatan ini cukup menyita waktu.

Saat ini masyarakat di Dusun Kojadoi sudah menerima program pipanisasi air bersih. Masyarakat memasang pipa-pipa untuk mengalirkan air dari Pulau Besar. Pipa-pipa ini melewati jembatan penghubung kedua pulau (Pulau Besar dan Pulau Kojadoi) sepanjang sekitar 500 meter serta dilanjutkan ke jalan utama di Dusun Kojadoi. Di jalan utama dusun inilah terdapat berbagai titik/pusat pengambilan air bersih, semacam saluran (kran air) sederhana. Dengan fasilitas ini, penduduk di Dusun Kojadoi cukup pergi ke tempat tersebut untuk mengambil air bersih sehingga tidak perlu lagi pergi ke Pulau Besar. Meskipun demikian, fasilitas pipanisasi air bersih masih belum permanen dan rentan mengalami kerusakan. Hal ini terutama apabila terjadi kerusakan/kebocoran pipa-pipa saluran air. Pipa-pipa yang ada di sepanjang jembatan antarpulau rentan mengalami kerusakan/kebocoran terutama apabila terjadi air pasang yang ‘menghantam’ dan ‘menenggelamkan’ jembatan tersebut. Kondisi pipa-pipa yang kurang terlindung dengan baik juga rentan mengalami kerusakan/kebocoran apabila sering terinjak oleh penduduk yang melalui jembatan tersebut.



Gambar 2.10
Fasilitas bak penampung air bersih di Desa Kojadoi (kiri)
dan Desa Namangkewa (kanan)

Selain pipanisasi air bersih, program lain yang dilaksanakan di desa ini adalah pembangunan bak penampung air bersih serta fasilitas MCK (mandi cuci kakus). Fasilitas bak penampung air bersih banyak dijumpai di Dusun Koja Besar, sedangkan fasilitas MCK baru-baru ini dibangun di Dusun Margajong. Keberadaan dua fasilitas

tersebut sangat bermanfaat bagi penduduk setempat sehingga diharapkan kondisi sanitasi lingkungan di wilayah ini dapat terus ditingkatkan.

Akses terhadap sarana air bersih juga masih menjadi permasalahan bagi penduduk di Desa Namangkewa, terutama bagi mereka yang tinggal cukup jauh dari sumber-sumber air bersih yang tersedia di desa ini. Salah satu Program *Village Grant* COREMAP Fase II saat ini adalah berupa pembangunan sarana bak penampung air bersih dan pipanisasi air di Dusun Napungseda. Program ini sebenarnya mendukung program pengadaan air bersih yang sudah dirintis instansi terkait dan didukung bantuan swadaya dari masyarakat setempat. Namun demikian, sampai saat ini program tersebut belum banyak dinikmati penduduk di Desa Namangkewa pada umumnya.

BAB III

COREMAP DAN IMPLEMENTASINYA

Salah satu tujuan utama penelitian ini mengadakan kajian tentang program-program COREMAP Fase II yang ada dan implementasinya. Bagian tulisan ini menjawab tujuan penelitian tersebut dengan membahas tentang program-program COREMAP Fase II yang ada dan bagaimana pelaksanaan/ implementasinya dengan berbagai permasalahan dan kendalanya. Pembahasan meliputi program dan implementasi pada tingkat makro kabupaten (Kabupaten Sikka) serta program dan implementasi di tingkat mikro desa (Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa). Kemudian bagian ini juga membahas tentang pengetahuan dan partisipasi penduduk terhadap kegiatan COREMAP di desa penelitian selama ini.

3.1. PELAKSANAAN COREMAP : PERMASALAHAN DAN KENDALA

3.1.1. Pengelolaan dan pelaksanaan COREMAP tingkat makro : Kabupaten Sikka

PMU (Project Management Unit)

Pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Sikka sudah memasuki fase II. Fase ini telah berlangsung sejak tahun 2004. Pembentukan organisasi pelaksanaan COREMAP Kabupaten Sikka dituangkan dalam SK Bupati Sikka Nomor 89/ Tahun 2004 tentang struktur organisasi COREMAP Fase II . Menurut SK tersebut struktur organisasi COREMAP Fase II terdiri dari Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (*Coastal Community Empowerment Board/ CCEB*) dan Unit Pengelola Proyek (*Project Management Unit /PMU*). Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Unit Pengelola Proyek (PMU)

bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Sikka. Dari struktur organisasi ini pemerintah daerah dalam hal ini bupati bertanggungjawab terhadap kegiatan COREMAP. Dalam pembagian tugasnya penanggung jawab mendelegasikan pelaksanaan kegiatan kepada PMU. Sedang Dewan Pengelolaan Pesisir bertugas untuk memberikan rekomendasi rencana kegiatan COREMAP.

Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir anggotanya terdiri dari berbagai unsur dalam jajaran pemerintah maupun masyarakat. Mereka terdiri dari unsur Bappeda, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pariwisata, Koperasi, Bapedal, Lanal, Polri, Camat, Kepala Desa, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Perwakilan Wanita. Dari keterlibatan berbagai pihak dalam Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, nampaknya dewan diharapkan dapat memberikan rekomendasi pelaksanaan COREMAP dari berbagai sudut pandang masyarakat. Sedang PMU sebagai unit pelaksana kegiatan terdiri dari para ahli di bidangnya dan diangkat dari instansi-instansi yang relevan.

Mekanisme kerja kegiatan COREMAP Fase II berdasarkan SK Bupati menunjukkan adanya proses perencanaan dari bawah (*bottom up*). Perencanaan kegiatan dimulai dari tingkat desa, baik perencanaan kegiatan fisik maupun nonfisik. Dalam hal ini Fasilitator Desa (FD) dan Motivator Desa (MD) bersama masyarakat menyusun rencana kegiatan sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Setelah dapat diselesaikan, maka FD menyerahkan rancangan tersebut kepada Koordinator Fasilitator Desa yang selanjutnya diserahkan kepada PMU. Kepala PMU bersama Kepala Bidang di COREMAP Kabupaten Sikka menyusun rencana yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Setelah selesai, PMU menyerahkan perencanaan kegiatan tersebut kepada Bupati Kabupaten Sikka. Bupati selaku penanggung jawab program meminta Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (CCEB) untuk menilai, membahas dan memberi rekomendasi terhadap rencana tersebut untuk dapat dilaksanakan. Atas dasar rekomendasi ini, Bupati memerintahkan kepada PMU untuk melaksanakan rencana kegiatan tersebut.

Dari uraian di atas jelas bahwa pelaksanaan kegiatan COREMAP diserahkan langsung kepada PMU setelah melalui berbagai langkah sebelumnya. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, secara spesifik tugas PMU sebagai berikut : *Pertama*, PMU bertugas menyusun program tahunan dan di-review oleh Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Kedua*, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan COREMAP Fase II sesuai arahan dari dewan. *Ketiga*, bersama dengan bidang yang ada melakukan kegiatan CBM (*Community-Based Management*) atau PBM (Pengelolaan Berbasis Masyarakat), CRITC (*Coral Reef Information and Training Center*), PA (*Public Awareness*), MCS (*Monitoring, Controlling & Surveillance*) dan Pengawasan Konserwasi Laut. Di samping melaksanakan kegiatan teknis tersebut PMU juga ikut mengelola keuangan, pengadaan barang dan memantau kegiatan konsultan.

Komponen COREMAP

- *Kegiatan Bidang CBM (Community-Based Management atau Pengelolaan Berbasis Masyarakat/PBM).*

Fokus kegiatan CBM menurut informan bidang ini di Kabupaten Sikka adalah pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan masyarakat. Kegiatan COREMAP dalam rangka CBM telah mencakup di 34 desa dari sekitar 56 desa di Kabupaten Sikka. Dalam melakukan kegiatannya CBM tidak terlepas dengan kegiatan bidang lainnya, terutama PA, MCS dan CRITC. Penyadaran masyarakat (PA) tidak terlepas dengan kegiatan PBM, karena kesadaran masyarakat penting untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Pengenalan serta edukasi tentang terumbu karang dilakukan oleh PA melalui materi muatan lokal pada sekolah di masyarakat desa sasaran. Demikian juga pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan tanpa kegiatan pengamanan serta bahan maupun hasil penelitian yang relevan berkaitan dengan terumbu karang bagi kehidupan masyarakat target.

Sebagai bidang yang bertanggungjawab pada pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan konsep pemberdayaan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, dalam kegiatannya selalu mendasarkan

diri pada metode PRA (*Participatory Rapid Assessment*) dan dalam pembentukan kelompok masyarakat dilakukan dengan metode OSA (*Organization Self Assessment*). Dalam rangka melaksanakan konsep tersebut CBM dibantu oleh Fasilitator dan Motivator Desa. Di tingkat kabupaten Koordinator Fasilitator Desa disebut SETO (*Senior Extension and Training Officer*). Fasilitator Desa, *Community Fasilitator* (CF/SETO) diangkat oleh COREMAP melalui proses pelelangan, jadi bukan orang desa setempat. Sedang Motivator Desa diangkat dari dan oleh masyarakat, jumlahnya sebanyak 2 orang, terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.

Untuk mendapatkan gambaran pengetrapan konsep CBM, maka akan diuraikan proses pembentukan LPSTK (Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang), dan proses pembuatan RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang). LPSTK merupakan lembaga tingkat desa yang penting dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP. Atas pertimbangan antara Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, Fasilitator Desa membentuk LPSTK. Pengurusnya terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Setelah LPSTK terbentuk maka bersama Fasilitator Desa, LPSTK memilih 2 orang Motivator Desa yang akan bertugas di desa tersebut. Motivator Desa diangkat dari masyarakat setempat (desa sasaran COREMAP). Kemudian Fasilitator Desa tersebut bersama dengan LPSTK membuat RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang). Dengan metode PRA, maka seluruh masyarakat diajak memikirkan kebutuhan yang relevan bagi desanya. Proses ini memerlukan waktu cukup panjang dan memerlukan fasilitator yang mampu membangkitkan semangat partisipasi masyarakat desa. Dalam proses ini masyarakat menentukan kebutuhan desanya dengan mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dibutuhkan di desa. Karena keterbatasan wawasan masyarakat desa untuk melihat kebutuhan desanya, maka dibutuhkan bimbingan yang intensif dari Motivator Desa dan Fasilitator Desa. Dengan proses ini diharapkan segala kegiatan yang dibutuhkan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemiliknnya. RPTK yang telah tersusun kemudian dibawa ke tingkat kabupaten oleh Fasilitator Desa sebagai bahan pembahasan dalam pertemuan PMU dalam penyusunan

rencana kegiatannya. Penyusunan rencana kegiatan tersebut dengan sendirinya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Pembentukan kelompok masyarakat di tingkat desa dilakukan dengan metode OSA, di mana masyarakat diminta untuk membentuk kelompok sendiri sesuai dengan kesamaan pandangan mereka. Kelompok masyarakat (Pokmas) yang dibentuk dengan cara ini diharapkan atas dasar kehendak mereka sendiri. Dari kelompok yang sudah terbentuk kemudian dikelompokkan lagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu Kelompok masyarakat (Pokmas) Ekonomi Produktif, Pokmas Konservasi dan Pokmas Jender/ Perempuan. Dari gambaran tersebut, pelaksanaan CBM di tingkat konsep bisa dipahami dan apabila terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur dapat diharapkan tujuan program pemberdayaan masyarakat tercapai. Untuk pelaksanaannya diperlukan koordinasi antar bidang, kemampuan pelaksana (fasilitator) dalam memberi motivasi kepada masyarakat serta informasi yang relevan ke masyarakat, baik metode penyampaiannya maupun mediana.

- *Kegiatan Bidang MCS*

Kegiatan utama MCS adalah pengawasan laut, untuk menghindari atau menjaga agar tidak terjadi pengrusakan laut yang akan mengganggu kelestarian terumbu karang. Di samping itu, MCS juga melakukan pembinaan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat-Pengawasan) di Kabupaten Sikka ada di 34 desa binaan COREMAP. MCS sebagai bagian dari PMU juga melibatkan berbagai *stakeholders* yang berhubungan dengan pengawasan kelautan. *Stakeholders* tersebut meliputi Lanal, Polres, Kejari, Rapi, LSM dan DKP sebagai ketua tim.

Anggota MCS mempunyai perbedaan fokus pengawasan kelautan, maka dalam pelaksanaan tugasnya perlu koordinasi yang baik agar masing-masing instansi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebelum turun melakukan pengawasan kelautan tim mengadakan pertemuan untuk menentukan sasaran pengawasan. Daerah rawan di Kabupaten Sikka cukup tersebar dan bervariasi, yaitu kerawanan disebabkan karena sering terjadi pengeboman ikan

dan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium. Kegiatan pengerusakan ini dilakukan oleh nelayan daerah setempat maupun nelayan pendatang dari daerah lain. Di samping mengadakan patroli di daerah tersebut, maka tim MCS-COREMAP juga melakukan pembinaan terhadap Pokmaswas di desa terdekat dengan lokasi patroli. Masing-masing anggota tim melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokoknya, akan tetapi mereka juga akan saling memberikan informasi bila terjadi hal yang dapat dikembangkan untuk ditanggulangi bersama. Apabila tim menemukan kejadian pengeboman, atau penangkapan ikan dengan potasium, maka pihak Polri akan memeriksa pelaku sebagai tindakan kriminal, sedang tim COREMAP akan menganalisis kemungkinan kerusakan yang terjadi akibat tindakan pengeboman tersebut terhadap kemungkinan kerusakan biota laut termasuk terumbu karang.

Menurut para informan, pengawasan rutin dilakukan sejak tahun 2006 sampai sekarang (2008) sebanyak 3 kali setiap bulan dan selama 10 bulan dalam satu tahun. Setiap temuan dalam kegiatan pengawasan kelautan, maka informasinya akan dikoordinasikan kepada bidang lain, terutama CBM dan PA agar ditindaklanjuti dengan penyadaran masyarakat dan kewaspadaan masyarakat desa terhadap ancaman kerusakan laut. Pembinaan Pokmaswas perlu ditingkatkan sebab bila Pokmaswas di desa cukup aktif maka pengawasan laut sekitar desa dapat selalu terjaga. Apabila Pokmaswas menemukan gejala yang kurang baik, seperti penggunaan potasium maka bisa dengan persuasif melarang masyarakatnya agar mereka menyadari bahwa penggunaan potasium dapat merusak kelestarian lingkungan laut. Bila Pokmaswas dapat menemukan pelanggaran yang lebih serius yang dilakukan oleh masyarakat dari luar, maka Pokmaswas dapat segera mengkomunikasikan kepada tim MCS. Selanjutnya ketua tim akan berkoordinasi dengan polisi untuk melakukan penangkapan.

Dari gambaran kegiatan tersebut di atas, maka pembinaan Pokmaswas sangat penting. Beberapa kegiatan pembinaan antara lain memberikan pengetahuan kepada Pokmaswas tentang Sistem pengawasan berbasis masyarakat (Siswasmas). Demikian pula sering

dilakukan Apel Siaga untuk menjaga kesiapan anggota Pokmaswas. Di samping pembinaan terhadap Pokmaswas COREMAP juga membangun pos pengawasan dan radio. Pos pengawasan sudah tersedia di semua desa binaan, akan tetapi radio sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi belum sepenuhnya terpenuhi karena kendala perizinan dan dana. Untuk menopang kegiatan Pokmaswas telah disediakan kapal/perahu (*response boat*) untuk 3 desa, sedang alat patroli tim MCS tersedia satu speed boat. Dengan terbatasnya alat komunikasi, baik radio maupun transportasi laut akan mengganggu pelaksanaan tugas pengawasan pada masa mendatang.

- *Kegiatan Bidang PA(Public Awareness) dan CRITC*

Kegiatan dua bidang CRITC dan PA pada saat ini kurang ada kegiatan. Khusus untuk bidang CRITC sedang tidak ada kegiatan, sebab kebetulan koordinator bidang tersebut tidak aktif lantaran akhir-akhir ini sedang sibuk mengikuti pencalonan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Sikka.

Masalah dan kendala pelaksanaan COREMAP

- *Kontinuitas COREMAP Fase I dan II : pemilihan desa dan program*

Dalam penelitian BME tahun 2008 dilakukan di desa sampel (Desa Kojadoi dan Namangkewa). Desa-desanya tersebut merupakan desa COREMAP Fase I dan II. Seharusnya kegiatan COREMAP di dua desa tersebut mencerminkan kesinambungan program COREMAP Fase I dan II. Namun ternyata terdapat kecenderungan bahwa kesinambungan kegiatan COREMAP I dan II kurang nampak. Hal ini ditunjukkan adanya perbedaan kelompok masyarakat yang menjadi target pemberdayaan dan program yang dibiayai dari program COREMAP Fase I seolah lepas pengelolaannya pada fase II. Pada masalah pertama terjadi karena adanya pemekaran desa, sehingga desa yang tadinya menjadi satu kesatuan terpecah menjadi dua desa yang berbeda. Keputusan yang diambil tetap memakai nama desa pertama yang ternyata masyarakat sebagian bertempat tinggal

tidak dekat dengan pantai. Mata pencaharian masyarakat sebagian dari mereka bukan dari usaha pemanfaatan sumber daya laut, tapi sebagai petani, pedagang, jasa dan lainnya. Sebagai akibatnya maka program yang dikembangkan banyak yang tidak menyentuh fokus kegiatan COREMAP. Masalah ini disebabkan karena pemilihan desa lebih ditentukan dengan pertimbangan wilayah administratif dari pada pertimbangan kawasan pantai yang kehidupan masyarakatnya menggantungkan pada sumber daya laut. Kesalahan penentuan lokasi program ini juga dirasakan oleh masyarakat maupun fasilitator yang bertugas di daerah ini.

Keberhasilan program pada fase pertama yang terjadi di desa melalui koperasi dirasakan kurang mendapat perhatian oleh COREMAP Fase II di tingkat Desa (LPSTK). Keadaan ini disebabkan karena pihak yang terpilih di lembaga terdiri dari orang yang berasal dari kelompok yang tadinya bukan pengurus pada fase I. Keberadaan koperasi tersebut kini berpotensi sangat besar berperan dalam pemasaran rumput laut. Pihak kabupaten melihat masalah ini sebagai masalah lokal, tetapi secara keseluruhan program COREMAP akan dapat menyelesaikannya dengan baik.

- *Dedikasi kerja pelaksana lapangan (fasilitator)*

Fasilitator Desa merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP. Meskipun calon yang mendaftar sebagai fasilitator telah dipilih secara seksama, ternyata masih ada yang kurang merasa ikut memiliki kegiatan COREMAP. Orientasi pemikirannya masih *project oriented*, kegiatannya masih sangat ditentukan oleh dana yang tersedia. Keadaan ini mengakibatkan keaktifannya dalam membina masyarakat sangat rendah. Meskipun pelatihan telah dilakukan, pembekalan pribadi melalui pendekatan agama dan program telah diberikan, tetapi masih ada fasilitator yang akhirnya meninggalkan tugas dan ke luar dari COREMAP. Meskipun jumlahnya tidak banyak, hal ini dapat mengganggu pelaksanaan program.

- *Pencapaian tujuan (target 10 persen).*

COREMAP Fase II tinggal satu tahun lagi, pertanyaannya apakah kegiatan yang dilakukan telah mendekati pencapaian target. Target yang akan dicapai pada akhir COREMAP Fase II adalah adanya pendapatan penduduk dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi yang berbasis terumbu karang dan kegiatan ekonomi alternatif lainnya, mengalami kenaikan sebesar 10 persen pada akhir program (tahun 2009) atau rata-rata per tahun ada peningkatan sekitar 2 persen. Apabila yang ditanyakan pencapaian kualitas pelayanannya, maka dengan pelayanan 34 desa sasaran COREMAP Fase II (dari 56 desa) berarti telah mencapai lebih dari 50 persen desa di Kabupaten Sikka telah tersentuh program COREMAP dan diharapkan sudah menyadari pentingnya pelestarian terumbu karang. Pencapaian ini masih bersifat pencapaian fisik, secara kualitatif apa artinya masih harus diteliti yang lebih cermat. Sebagai contoh, meskipun pembentukan LPSTK dan Pokmas telah dilakukan dengan menggunakan PRA dan OSA, tapi dalam kenyataan banyak masyarakat belum mengenal apa LPSTK dan RPTK nya.

- *Perselisihan masyarakat : apa peran COREMAP*

Pengembangan tanaman rumput laut telah mengangkat Kabupaten Sikka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pantai dan telah berdampak langsung pada menurun kegiatan masyarakat merusak terumbu karang. Dalam musim panen raya rumput laut tahun 2006 di Desa Kojadoi, Menteri Kelautan dan Perikanan menyempatkan diri untuk hadir dalam panen raya tersebut. Pada waktu itu hasil panen tanaman rumput laut memang sangat menggembirakan. Akan tetapi dibalik kesuksesan ini terjadi silang pendapat dari dua kelompok masyarakat Desa Kojadoi. Dalam pelaksanaan penanaman rumput laut ada kelompok masyarakat yang menggunakan pupuk *Green Tonic* (GT) dan kelompok masyarakat yang tidak menggunakan pupuk GT. Dalam dialog dengan menteri, menurut kelompok pengguna GT menteri telah merestui penggunaan GT. Setelah acara selesai dua kelompok ini tetap bersilang pendapat dan pengguna GT cenderung semakin banyak. Pada saat ini

pertentangan ini semakin tajam. Menurut para nelayan non-GT akhir-akhir ini laut di perairan sekitar Kojadoi sudah makin tercemar, yaitu munculnya lumut yang mengganggu tanaman rumput laut termasuk tanaman milik nelayan non-GT. Pertentangan ini menjadi kontra produktif terhadap keberhasilan COREMAP. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka telah melarang penggunaan GT, tetapi masyarakat nelayan pengguna tetap bertahan.

Masalah tersebut di atas dapat menjadi masalah besar bagi kelangsungan kegiatan COREMAP karena konflik antara pengguna GT dengan non pengguna GT dapat menjalar ke desa lain. Dalam hal ini COREMAP harus dapat mengatasi masalah dengan memberikan informasi yang benar dengan mendasarkan hasil penelitian ilmiah tentang apa dampak penggunaan GT terhadap tanaman rumput laut dan kerusakan biota laut lainnya. Hal tersebut dikawatirkan dimasa mendatang akhirnya akan merugikan para nelayan sendiri.

Dari kegiatan pengawasan laut kendala yang dihadapi adalah kurangnya alat transportasi laut dan sarana komunikasi lainnya. Komunikasi yang cepat sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan pengawasan. Masalah lainnya yang perlu diperhatikan adalah banyaknya kegiatan para kepala bidang, misalnya CRITC dan PA mempengaruhi kinerja dua bidang tersebut.

3.1.2. Pengelolaan dan pelaksanaan COREMAP Fase II di tingkat mikro : Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa.

Dari pembahasan pelaksanaan COREMAP Fase II di tingkat kabupaten menunjukan bahwa pembentukan LPSTK (Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang), dan pembuatan RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang) merupakan lembaga tingkat desa yang penting dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP. Setelah LPSTK terbentuk, maka pengurus LPSTK bersama Fasilitator Desa memilih 2 orang (laki dan perempuan) sebagai Motivator Desa. Motivator Desa tersebut yang akan bertugas di tingkat desa. Mereka harus berasal dari di antara masyarakat desa setempat. LPSTK

tersebut selanjutnya melakukan kegiatan penyusunan RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang) untuk desanya dengan metode PRA. Sedangkan pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) dengan menggunakan metode OSA. Bab ini akan membahas tentang pengelolaan dan pelaksanaan COREMAP di dua desa kajian, yaitu Desa Kojadoi dan Desa Nawangkewa.

3.1.3. Pengelolaan dan kegiatan COREMAP Fase II di Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi)

- *Pembentukan dan kinerja kelembagaan Desa Kojadoi*

LPSTK Desa Kojadoi sebagai pusat pelaksanaan kegiatan COREMAP di tingkat desa baru terbentuk tahun 2007. Panitia pemilihan calon pengurus LPSTK terdiri dari Motivator Desa, ketua Pokmas, fasilitator dan aparat pemerintah desa. Panitia mengundang masyarakat yaitu tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, agama, dan anggota pokmas. Masing-masing anggota masyarakat mengajukan calon ketua, yang kemudian disaring sesuai dengan persyaratan sebagai ketua. Salah satu persyaratan yang dianggap sulit dipenuhi adalah pendidikan, karena untuk bisa dipilih sebagai ketua, calon harus berpendidikan sarjana. Masyarakat yang berpendidikan sarjana di desa sangat jarang. Dari seluruh calon yang ada terdapat 5 orang yang dianggap mendekati kriteria yang dibutuhkan, kemudian berhasil dipilih satu orang sebagai ketua. Sekretaris dan Bendahara dipilih dari masyarakat di luar 5 calon ketua dengan alasan agar dapat memberi peluang masyarakat lebih luas duduk sebagai pengurus.

Kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas-Pokmas) telah terbentuk di Desa Kojadoi. Pokmas tersebut berfungsi sebagai pelaksana kegiatan COREMAP sesuai dengan bidangnya. Terdapat 4 jenis Pokmas di Desa Kojadoi, yaitu : *Pertama*, Pokmas Konservasi yang telah dibentuk sejak tahun 2002 (COREMAP Fase I) . Kegiatan Pokmas konservasi untuk tujuan penanaman tanaman bakau dan pengawasan DPL (Daerah Perlindungan Laut). *Kedua*, Pokmas Ekonomi Produktif, yang sudah terbentuk sejak COREMAP Fase I. Aktivasnya antara lain simpan pinjam, menyalurkan dana bergulir

dan pengembangan usaha kecil. Pengembangan usaha kecil antara lain mengembangkan kios penjualan barang-barang kebutuhan pokok rumah tangga. *Ketiga*, Pokmas Perempuan/ Jender telah terbentuk pada tahun 2004. Kegiatannya antara lain : kegiatan kewanitaan seperti pengajian dan arisan, pelatihan pengolahan rumput laut untuk kebutuhan makanan sehari-hari. *Keempat*, adalah Pokmas Rumput Laut. Kegiatan Pokmas tersebut meliputi pemberian modal untuk budi daya rumput laut (dengan sistem simpan pinjam) dan mengontrol anggotanya yang menerima pinjaman modal. Masing-masing Pokmas tersebut beranggotakan sekitar 30 orang, kecuali Pokmas Perempuan yang anggotanya lebih banyak.

Setelah pengurus LPSTK berhasil terbentuk kemudian dilakukan pelatihan penguatan fungsi kelembagaan (LPSTK) antara lain pembahasan/ diskusi tentang keadaan desa yang meliputi tentang potensi desa dan permasalahannya. Metode yang digunakan adalah PRA (*Participatory Rural Appraisal*) Hasil PRA tersebut sebagai bahan untuk penyusunan RPTK. Pengkajian tentang keadaan desa dengan metode PRA tersebut merupakan bagian dalam penyusunan RPTK. Kegiatan tersebut baru dilaksanakan dalam bulan Januari 2007. PRA tersebut merupakan salah satu metode pendekatan yang tekanannya pada upaya agar masyarakat turut serta meningkatkan dan menggali pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri. Dengan metode ini diharapkan masyarakat desa dapat membuat rencana dan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Informasi yang digali dalam PRA lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat dan kepentingan program COREMAP fase II. Hasil kajian akan menjadi acuan pembuatan RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang) yang nantinya juga akan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

Pengkajian keadaan desa tersebut telah diikuti oleh 30 orang anggota masyarakat. Mereka terdiri dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, Pokmas, kaum perempuan, Kepala Dusun, Petani, Nelayan, Pengusaha Jasa, Tenaga Medis, tokoh pendidikan, Aparat Desa dan BPD. Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dibentuk tim PRA dari

masyarakat dan fasilitator desa, sedang motivator desa sebagai pendamping.

Dalam kajian tentang keadaan desa dapat dibedakan menjadi beberapa kajian. Kajian pertama adalah mengumpulkan data sekunder tentang potensi desa yang tersedia. Data tersebut antara lain keadaan umum desa (letak desa, topografi, penduduk), potensi penduduk (jumlah penduduk, pendidikan penduduk, jumlah angkatan kerja, penduduk menurut agama, kondisi kesehatan dan kemiskinan) dan potensi alam. Kondisi desa dilihat dari data sekunder tersebut dicoba untuk dipahami bersama agar masyarakat mengenal potensi desanya.

Kajian selanjutnya adalah kajian tentang masalah dan potensi desa. Untuk memahami masalah dan potensi desanya dengan metode PRA telah dipilih 5 pendekatan. Pendekatan tersebut adalah : (1). penelusuran sejarah desa; (2). pemetaan desa; (3). kajian kelembagaan desa; (4). analisis mata pencaharian; dan (5). kalender musim. Untuk pelaksanaan diskusi dengan 5 teknik pengkajian tersebut, maka peserta sebanyak 30 orang dibagi dalam 5 kelompok masing masing terdiri dari 6 anggota.

Pengkajian dengan metode penelusuran sejarah desa dimaksudkan agar masyarakat mengenali peristiwa penting yang pernah terjadi pada masa lalu. Peristiwa tersebut kemudian dipelajari masalah dan potensi yang bisa dikembangkan. Informasi yang digali antara lain asal usul desa, arti nama desa, sejarah terbentuknya desa, riwayat pembangunan desa, pemanfaatan potensi dan sumber daya dan kejadian penting. Kajian keadaan desa dengan metode ini antara lain menghasilkan gambaran situasi desa sejak tahun 1946, yaitu pembangunan mesjid dengan masalah bangunan tidak permanen karena keterbatasan sarana dan prasarana. Tetapi potensi yang dapat digali adalah tenaga kerja cukup tersedia dan pemilihan lokasinya yang strategis. Kegiatan pembangunan sekolah pada tahun 1952 dan pemekaran sekolah Margayong tahun 1961 dilihat sebagai tonggak kegiatan di Desa Kojadoi yang penting.

Tonggak sejarah penting pada tahun 1966 Kojadoi dibentuk sebagai desa gaya baru. Adapun masalah yang dihadapi desa tersebut

adalah keterbatasan sarana dan kekurangan personil untuk aparat desa. Potensi yang dapat dikembangkan adalah tenaga kerja cukup, lokasi strategis, dan terdapat staf desa dan masyarakat pendukungnya. Kegiatan desa yang dicatat sebagai sejarah penting di desa sejak 1966 (desa baru) adalah dibangunnya sarana pendidikan dan transportasi (jembatan) tetapi munculnya bencana alam yang dahsyat, yaitu banjir (1974), kelaparan (1978), wabah penyakit (1989) dan gempa tektonik dan tsunami (1992) yang cukup mengesensasikan masyarakat. Namun di tengah bencana yang terjadi, inovasi baru penanaman budi daya rumput laut (1987) yang sampai pada beberapa tahun telah berkembang dengan baik, meskipun masih banyak menghadapi masalah, antara lain harga tidak stabil, kekurangan bibit dan tidak ada penyuluhan, adanya hama. Tahun berikutnya kejadian bencana dan pembangunan sarana terus terjadi sampai masuknya COREMAP Fase I pada tahun 2001. Menurut masyarakat, masalah yang dihadapi pada saat itu antara lain kesadaran masyarakat masih rendah, banyak kredit macet dan partisipasi kurang. Catatan sejarah desa diakhiri kejadian 2004 yaitu pembuatan tambatan perahu, masalah yang dihadapi adalah kurangnya sarana pendukung sedang potensi yang dapat dikembangkan adalah partisipasi masyarakat tinggi, lahan tersedia dan bahan dapat dari hasil lokal.

Teknik pemetaan desa digunakan untuk memfasilitasi diskusi keadaan wilayah desa beserta lingkungannya. Informasi yang digali antara lain batas desa, pemukiman penduduk, sarana dan prasarana social, potensi sumberdaya. Dari pemetaan ini berhasil dideteksi adalah masalah dan penting bagi kegiatan coremap antara lain rumput laut, daerah perlindungan laut dan hutan bakau. Hutan bakau tempat berkembangnya biota laut pada saat ini menghadapi masalah antara lain terjadinya penebangan liar. Tanaman rumput laut yang menjadi tanaman andalan masyarakat Kojadoi terancam masalah karena terserang penyakit ais-ais, putih dan mati, serta kurang pengetahuan pencegahan penyakit. Daerah perlindungan laut khususnya di Wailago dan Labantong yaitu batas yang belum jelas, masyarakat belum tahu pentingnya DPL dan penangkapan ikan masih dilakukan di zona penyangga dan inti.

Teknik kajian lembaga merupakan salah satu pilihan metode PRA yang dipakai untuk mengkaji hubungan masyarakat dengan lembaga yang terdapat di lingkungan masyarakat desa. Informasi yang digali berasal dari lembaga umum (lembaga tradisional dan lembaga pemerintah) dan lembaga swasta (LSM dan Perusahaan Swasta). PRA masyarakat desa Kojadoi telah memilih 11 lembaga yang ada di lingkungan masyarakat, di antaranya Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Pendidikan, CU Kojaja Jaya, Pensa, PPK, Kelompok Pengajian, COREMAP dan kelompok pemberantasan buta huruf fungsional. Sebelas lembaga tersebut telah dikaji dan hasilnya menunjukkan bahwa seberapa jauh fungsi dan manfaatnya pada masyarakat. Beberapa lembaga dipilih untuk dikemukakan dalam laporan ini adalah Pemerintah Desa, Koperasi Kojaja Jaya dan COREMAP. Tiga lembaga ini dipilih karena dekat dengan pelaksanaan COREMAP di desa. Pemerintah Desa berperan dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat desa termasuk COREMAP dinilai bermanfaat banyak, hubungan dengan masyarakat dinilai ada dan partisipasi masyarakat dinilai cukup banyak. Mereka termasuk yang terbanyak laki laki dan perempuan hanya sebagian kecil. Lembaga Pemerintah Desa dikaji dan masyarakat menilai bahwa masih terdapat masalah, antara lain masih lemahnya dalam transformasi informasi kepada masyarakat dan kurang komunikasi dengan masyarakat. Sedangkan potensi desa yang bisa dikembangkan adalah keberadaan kantor desa dan aparat desa.

Koperasi (CU) Kojaja Jaya merupakan lembaga penting dalam masyarakat yang telah dirintis sejak COREMAP Fase I dinilai banyak manfaatnya oleh masyarakat, tetapi hubungan dengan masyarakat dinilai cukup dan partisipasi masyarakat dinilai banyak, baik laki laki maupun perempuan. Masalah yang dihadapi Koperasi (CU) Kojaja Jaya adalah masih kurangnya komunikasi dengan masyarakat, kesadaran anggota masih rendah, dana kadang macet, kurang fasilitas penunjang dan kurang ketrampilan pengurus. Potensi yang dapat dikembangkan adalah keberadaan pengurus, masyarakat sebagai anggota, ada AD/ART dan masih ada inventaris kantor koperasi.

Keberadaan COREMAP Fase II di Desa Kojadoi dinilai masyarakat manfaatnya banyak, sementara hubungan dengan masyarakat dinilai sedang-sedang, partisipasi masyarakat laki laki terhadap koperasi cukup banyak, sementara partisipasi perempuan sedang. Masalah yang dilihat oleh masyarakat tentang keberadaan COREMAP Fase II di Desa Kojadoi adalah pelaksanaan program lamban. Namun ada potensi yang dapat dikembangkan, yakni adanya Fasilitator Desa dan Motivator Desa yang dapat ditingkatkan perannya.

Kajian mata pencaharian bertujuan untuk memfasilitasi diskusi masyarakat mengenai berbagai aspek dari mata pencaharian masyarakat baik yang dilakukan di dalam desa maupun di luar desa. Informasi yang digali adalah mata pencaharian di bidang pertanian, non-pertanian, dan bidang jasa. Hasil kajian masyarakat meliputi 6 mata pencaharian, yaitu usaha penangkapan ikan, usaha budi daya rumput laut, usaha perdagangan/kios, peternakan kambing dan pertukangan. Dari 6 mata pencaharian dipilih 3 mata pencaharian yang terkait dengan COREMAP, yaitu usaha penangkapan ikan, budi daya rumput laut dan usaha perdagangan/kios. Usaha penangkapan ikan dinilai oleh masyarakat cukup baik karena partisipasi laki laki maupun perempuan banyak. Namun hasil, mutu dan pemasaran termasuk sedang. Masalah yang ada dalam usaha penangkapan ikan antara lain : peralatan terbatas, biaya operasional terbatas, SDM masih rendah, produksi masih rendah. Potensi yang dapat dikembangkan adalah sumber daya laut yang melimpah. Instansi teknis dan Dinas Kelautan dan Perikanan siap membantu masyarakat.

Budi daya rumput laut merupakan mata pencaharian yang banyak ditekuni oleh masyarakat nelayan, baik laki-laki maupun perempuan. Hasil, mutu dan pemasaran dinilai masih pada tingkat sedang oleh masyarakat desa. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya modal, kurang SDM dalam pengelolaan, terserang penyakit ais-ais dan pemasaran masih bersifat lokal. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain tenaga kerja banyak, kawasan pesisir dan laut cocok untuk usaha budi daya rumput laut, bibit cukup tersedia dan instansi/dinas terkait cukup membantu.

Usaha kios merupakan usaha yang ditekuni sebagian masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Hasil dan mutu kegiatan kios dinilai sedang akan tetapi pemasaran masih kecil. Masalah yang dihadapi karena jenis dan jumlah barang terbatas, sedang potensi yang bisa dikembangkan adalah tenaga kerja dan konsumen cukup banyak.

Teknik kajian kalender musim bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat mengkaji keadaan desa menurut pola pekerjaan dan profil kegiatan masyarakat sepanjang tahun dalam musim yang berbeda. Informasi yang digali antara lain iklim dan curah hujan, musim tanam, musim panen angin dan gelombang, musim buka lahan dan hama penyakit. Hasil pengkajian masyarakat tentang kegiatan penduduk menurut musim, curahan waktu terbanyak pada saat musim penangkapan ikan pada bulan Mei sampai dengan bulan Nopember (9 bulan). Kegiatan penduduk cukup sibuk pada musim budi daya rumput laut dimulai bulan Maret sampai dengan Oktober (7 bulan). Di sela kegiatan tersebut sebagian penduduk juga melakukan kegiatan berkebun. Kegiatan masyarakat hampir tidak ada pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret (3 bulan) karena pada bulan tersebut merupakan musim hujan, gelombang besar dan abrasi yang tidak memungkinkan masyarakat pergi melaut.

Masalah dan potensi desa dengan pendekatan PRA telah dapat diketahui dari hasil kajian masyarakat desa. Untuk mendapatkan permasalahan dan upaya penyelesaiannya setiap bidang, maka dalam diskusi masyarakat dibagi dalam 4 kelompok, yaitu : Kelompok Konservasi, Kelompok Ekonomi Produktif, Kelompok Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Sarana dan Prasarana. Dari hasil diskusi dapat diangkat permasalahan di masing-masing bidang. Bidang Konservasi terdapat 3 masalah, yaitu perlunya penanaman kembali hutan pantai, tanda batas DPL perlu diperbaiki dan perlu ada Perdes (Peraturan Desa) tentang perlindungan hutan bakau dan penangkapan ikan. Bidang Ekonomi Produktif mengangkat 3 permasalahan, yaitu harga kebutuhan pokok tinggi, harga produksi lokal rendah, dan basis kehidupan masyarakat ke depan adalah sumber daya laut. Bidang Pemberdayaan Perempuan mengangkat 2

masalah, yaitu rendahnya peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan rendahnya ketrampilan perempuan. Kelompok Bidang Sarana Prasarana mengangkat masalah perlunya sarana prasarana pengawasan laut, kurangnya sarana air bersih dan kurangnya MCK.

Dari hasil diskusi tersebut kemudian didiskusikan apa kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi. Bahan tersebut nantinya merupakan bahan penyusunan RPTK. Dalam menyusun rangking masalah masyarakat dalam bidang konservasi menetapkan 2 masalah yang mempunyai rangking I, yaitu masalah rusaknya terumbu karang, tercemarnya hama penyakit pada rumput laut. Sedang yang menduduki rangking II adalah terjadinya pengerusakan hutan bakau, tanda DPL hilang dan terjadinya abrasi laut. Masih terdapat masalah yang mempunyai rangking III dan IV yang perlu diatasi oleh masyarakat desa.

Bidang Ekonomi Produktif menetapkan 2 masalah dalam rangking I, yaitu serangan hama babi yang merusak tanaman perkebunan masyarakat. Sedang masalah II adalah masalah menurunnya harga rumput laut, tidak tersedianya umpan ikan di desa dan permainan harga rumput laut oleh pembeli

Bidang Pemberdayaan Perempuan, masalah yang menduduki rangking I adalah gizi buruk dan kesehatan ibu dan anak menurun. Bidang Sarana dan Prasarana, masalah yang menduduki rangking I adalah kurangnya air bersih, kurangnya MCK, kurangnya biaya operasional listrik dan alat tangkap ikan yang masih tradisional. Masalah tersebut kemudian di diskusikan dan disusun solusi maupun kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat.

Penyusunan RPTK baru dapat diselesaikan pada bulan Nopember 2007. Dalam penyusunan RPTK diperlukan partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi oleh SETO dan CF. Hasil RPTK diharapkan benar-benar berisi kondisi riil masyarakat desa. Materi yang dipakai untuk penyusunan RPTK adalah dari hasil kajian cepat (PRA) , hasil kajian partisipatif melalui metode PRA, hasil studi *base-line data* dan monitoring CRITC serta referensi yang relevan untuk pembuatan RPTK baik dari aspek legal maupun teknis. Tim

penyusunan dokumen RPTK Desa Kojadoi terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, unsur LPSTK, unsur LKM, unsur tokoh masyarakat, Pokmaswas, MD dan CF yang difasilitasi langsung oleh SETO dan PMU Kabupaten Sikka

Dalam melaksanakan RPTK di Desa Kojadoi telah melibatkan berbagai pihak yang ada di desa. Pihak-pihak tersebut adalah Kepala Desa, BPD, Motivator Desa, LPSTK, Badan Perencanaan Desa, Pokmas Usaha Ekonomi Produktif, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pokmaswas/konservasi, dan Pokmas Perempuan. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan program dan dalam tugasnya selalu berkoordinasi dengan BPD. LPSTK sebagai lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan RPTK, dalam tugasnya selalu berkonsultasi dengan Kepala Desa, Motivator Desa dan BPD. Tiga institusi tersebut membantu LPSTK dalam pengambilan kebijakan program apabila LPSTK memerlukan bantuan pemikiran. Dalam melaksanakan tugasnya LPSTK bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan kepada PMU. Dalam melaksanakan kegiatan di tingkat masyarakat sasaran, LPSTK dibantu oleh Pokmas UEP khususnya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan LKM adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi menghimpun, mengelola, dan menyalurkan *seed fund*/ dana bergulir yang diterima dari program COREMAP Fase II. LKM bertugas mengadakan verifikasi, menyalurkan dana dan melakukan koordinasi dengan LPSTK, Kepala Desa, FD, MD, dan masyarakat dalam menyalurkan dana ke pokmas-pokmas.

- *Kegiatan COREMAP Fase II di Desa Kojadoi*

Kegiatan COREMAP Fase II dilihat dari dokumen RPTK baru diselesaikan pada bulan Nopember 2007, maka kegiatannya sampai penelitian ini dilakukan (2008) baru dilaksanakan kurang dari satu tahun. Kegiatan sebelumnya masa persiapan pelaksanaan COREMAP Fase II yang secara formal telah dimulai 3 tahun sebelumnya (2004) di Kabupaten Sikka. Kegiatan yang dilakukan

sebelum tersusunnya RPTK sifatnya persiapan, sosialisasi tujuan COREMAP Fase II dan pembentukan pokmas dan LPSTK sebagai pelaksana kegiatan COREMAP Fase II.

Kegiatan ekonomi produktif seperti koperasi simpan pinjam dan kios serta budi daya rumput laut merupakan kegiatan lanjutan yang telah dirintis sejak dari COREMAP Fase I. Kegiatan setelah disusunnya RPTK adalah sosialisasi RPTK kepada masyarakat luas. Dari dokumen yang ada beberapa kegiatan COREMAP Fase II tahun 2007/2008 antara lain : kegiatan pemanfaatan dana *Village Grant* di 34 desa sasaran tahun 2007 (PMU Kab Sikka, 2007). Kegiatan tersebut untuk Desa Kojadoi berupa :

1. Pengadaan dan pemasangan mesin listrik 1 unit (komplit) dengan kapasitas 10 Kw Merk Dongfeng 34 Hp. Kegiatan tersebut ditempatkan di Dusun Koja Besar, dan dana yang disediakan sebesar Rp.18.000.000,- dan dari partisipasi masyarakat sebesar 11.350.000,-
2. Pembangunan fasilitas MCK di Dusun Margayong (4 unit) dengan dana masing masing Rp.6.000.000,- jumlah seluruhnya Rp. 24.000.000,-
3. Pengadaan unit *reverse osmosis* (Komplit) dengan dana sebesar Rp.30.000.000,-
4. Pengadaan perahu motor desa 1 unit dengan kapasitas 3 ton dan mesin 22 PK, dengan dana sebesar Rp. 11.000.000,-

Dari dokumen tersebut dapat diketahui bahwa setelah tersusunnya RPTK terdapat bantuan dari *Village Grant* dengan jumlah dana sebesar Rp. 83.000.000,-. Kegiatan tersebut tidak terkonsentrasi di satu dusun, tetapi tersebar di tiga dusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing dusun. Menurut hasil wawancara dengan masyarakat kegiatan yang sudah dilaksanakan pada saat ini dari dana *Village Grant* adalah pengadaan alat transportasi motor laut desa di Dusun Koja Besar, pengadaan listrik di Koja Besar, pipanisasi air bersih di Dusun Kojadoi dan 4 unit MCK di Dusun Margayong.

Beberapa kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pipanisasi air bersih di Dusun Kojadoi adalah

pengadaan bahan. Bahan yang berasal dari luar desa, seperti mesin, besi dan pipa harus didatangkan dari Surabaya. Kegiatan tersebut memerlukan biaya yang besar dan memerlukan waktu panjang. Untuk mengatasi masalah biaya yang besar tersebut, masyarakat mencoba untuk menekan ongkos tukang dan meningkatkan swadaya masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 adalah pembangunan Pondok Informasi. Menurut dokumen dari PMU Kabupaten Sikka untuk Desa Kojadoi pembangunan Pondok Informasi tersebut baru mencapai 75 persen. Dalam hal ini diharapkan partisipasi masyarakat adalah sebesar Rp.2.500.000. Pada bulan Januari 2008 dana tersebut baru bisa dicairkan dan pembangunan dimulai pada bulan Februari 2008 setelah diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaatnya Pondok Informasi. Kendala yang dihadapi adalah pada bulan Februari musim ombak dan angin besar, sehingga pembangunan dihentikan sementara dan baru bulan Maret dilanjutkan dan bulan April selesai dibangun. Menurut masyarakat pada saat ini Pondok Informasi sudah dapat diselesaikan 100 persen dan sudah mulai berfungsi. Pondok Informasi dilengkapi dengan buku-buku tentang terumbu karang dari PMU. Selain buku-buku di Pondok Informasi juga dilengkapi dengan poster dan struktur pengurus LPSTK. Buku mulok (muatan lokal) juga disediakan di Pondok Informasi namun jumlahnya masih terbatas.

Muatan lokal dengan materi khusus tentang terumbu karang ditujukan pada siswa SD kelas I sampai kelas VI. Untuk keperluan pendidikan para siswa diberi kesempatan meminjam buku dan membaca di Pondok Informasi dengan jadwal yang telah disiapkan. Hal ini dilakukan karena jumlah buku sangat terbatas. Buku-buku tersebut pada saat ini masih disimpan di rumah MD, karena Pondok Informasi belum dilengkapi dengan lemari buku.

Kegiatan Pokmaswas Desa Kojadoi selama ini antara lain telah melakukan monitoring dan penyadaran masyarakat. Pengawasan langsung ke laut belum dapat dilakukan, karena mereka belum mempunyai fasilitas kapal motor untuk patroli. Radio panggil untuk komunikasi dengan pihak keamanan laut belum dimiliki, sehingga

bila ada peristiwa kejadian di laut (misalnya pengeboman di wilayah terumbu karang), maka fasilitas *handphone* pribadi yang digunakan. Menurut pihak MCS dalam anggaran yang akan datang di coba untuk memfasilitasi dengan kapal motor dan alat radio panggil. Selama ini baru ada 3 desa dari 34 desa binaan yang mendapatkan fasilitas tersebut.

Fasilitas kapal motor dan radio panggil dibutuhkan karena Pokmaswas harus bertugas untuk mengawasi DPL yang kondisi batas-batasnya telah rusak dimakan usia. Batas DPL yang dibuat dari tali plastik banyak putus mengakibatkan batas DPL tidak jelas. Batas DPL pada saat ini masih menggunakan batas yang ditentukan pada program COREMAP Fase I, pembaharuan batas sementara baru akan dibuat oleh pihak pemerintah saat ini.

Beberapa pelatihan telah diadakan oleh COREMAP Fase II . Namun pelatihan tersebut masih terbatas untuk para pengurus. Pelatihan tersebut antara lain berupa pelatihan penguatan manajemen kelembagaan untuk pengurus LPSTK dan Pokmas. Pelatihan penyusunan Perdes yang diikuti oleh BPD dan pelatihan ekonomi produktif khususnya budi daya rumput laut yang diikuti oleh MD. Budi daya rumput bagi masyarakat sudah banyak diketahui masyarakat karena kegiatan memelihara rumput laut sudah lama dilakukan, yaitu terutama sejak COREMAP Fase I. Sebetulnya masyarakat Desa Kojadoi memerlukan pelatihan tentang pengolahan rumput laut, agar mereka dapat mendapatkan nilai tambah dari kegiatan tersebut. Masyarakat juga berharap dapat dibangun pabrik pengolahan rumput laut sehingga akan menguntungkan masyarakat banyak, baik keuntungan untuk pemasaran hasil maupun terbukanya peluang kerja bagi masyarakat desa.

3.1.4. Pengelolaan dan kegiatan COREMAP Fase II Kawasan Daratan (Desa Nawangkewa)

- *Pembentukan dan kinerja kelembagaan di Desa Namangkewa*

Pembentukan pengurus LPSTK Desa Nawangkewa sebagai pelaksanaan kegiatan COREMAP di tingkat desa baru terbentuk pada

bulan Juli tahun 2006. Pada waktu itu panitia pembentukan LPSTK mengundang para tokoh masyarakat dan aparat pemerintah desa untuk mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut telah berhasil menunjuk ketua, sekretaris dan bendahara LPSTK. Di sini LPSTK bertugas sebagai pelaksana kegiatan COREMAP Fase II dan diharapkan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa.

Kelompok masyarakat (Pokmas) juga telah terbentuk di Desa Namangkewa. Pokmas berfungsi sebagai pelaksana kegiatan COREMAP sesuai dengan bidangnya. Menurut informasi dari MD hasil identifikasi Pokmas pada bulan April 2006 di Desa Nawangkewa terdapat 18 Pokmas. Nama Pokmas tersebut antara lain: Pokmas Bintang Laut, Pokmas Bunga Mawar, Pokmas Perkumpulan Keluarga Berencana, Pokmas CU Rhena Rosary dan sebagainya. Pokmas di Desa Nawangkewa tidak hanya untuk kelompok nelayan tetapi juga untuk kelompok lain sesuai dengan mata pencaharian atau keinginannya. Pokmas di Desa Namangkewa terdiri dari 5 unit CU (Credit Union) dan 13 unit Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sampai pada saat penelitian dilakukan Pokmas di Desa Namangkewa merasa belum pernah ada kegiatan dari COREMAP Fase II. Mereka merasa bosan menunggu, karena COREMAP Fase II hanya membentuk kelompok, belum ada kegiatan pembinaan dan memberi kegiatan pada kelompok. Kegiatan Pokmas selama ini bukan berasal dari COREMAP, tetapi dari program lain, yaitu PPK (Program Pengembangan Kecamatan).

Motivator Desa (MD) berasal dari masyarakat setempat di angkat pada bulan Agustus 2006, terdiri dari seorang Motivator Desa laki-laki dan seorang perempuan. Dalam proses pemilihan Motivator Desa diserahkan kepada Aparat Desa, LPSTK dan Pokmas. Dalam proses pemilihan para calon MD harus menyampaikan persentasi dihadapan tim. Kemudian tim memilih dan menentukan siapa yang akan diangkat sebagai MD.

Setelah terbentuknya LPSTK dan Pokmas (identifikasi pokmas yang ada) maka kegiatan kelembagaan adalah mengadakan diskusi dengan masyarakat untuk mengkaji kondisi desa dan menetapkan masalah dihadapi dan potensi yang dapat dikembangkan.

Metode yang dipakai dalam kajian keadaan desa seperti di Desa Kojadoi sesuai dengan sosialisasi dari pihak PMU adalah PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Metode ini dipilih karena dapat mengajak masyarakat secara bersama memikirkan dan mengkaji keadaan desanya (masalah dan potensi) untuk kemudian dicarikan alternatif penyelesaiannya. Dengan metode ini diharapkan masyarakat dapat mengenali masalah desanya dan potensi yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraannya. Hasil dari pengkajian ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang) sebagai pedoman untuk pembangunan desanya. PRA telah dilaksanakan pada bulan Nopember 2007 dengan mengundang 30 orang masyarakat yang terdiri dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, pokmas, kaum perempuan, kadus, petani, nelayan, pengusaha jasa, tenaga medis, tokoh pendidik, aparat desa dan BPD. Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dibentuk tim PRA dari unsur masyarakat dan Fasilitator Desa. Sedang Motivator Desa berperan sebagai pendamping. Hasil dari PRA akan dipakai sebagai bahan untuk menyusun RPTK ditambah dengan data lain yang diperlukan.

Diskusi bersama dengan tim RPTK Desa Nawangkewa dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 25 November 2007. Penyusunan RPTK diperlukan partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi oleh SETO dan CF, sehingga hasil RPTK diharapkan benar-benar berisi kondisi riil masyarakat desa. Materi yang dipakai untuk penyusunan RPTK adalah dari hasil kajian cepat (PRA), hasil kajian partisipatif melalui metode PRA, hasil studi base-line data dan monitoring CRITC dan referensi yang relevan untuk pembuatan RPTK baik dari aspek legal maupun teknis. Tim penyusunan dokumen RPTK Desa Namangkewa terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Unsur BPD, unsur LPSTK, unsur LKM, unsur tokoh masyarakat, Pokmaswas, MD dan CF yang difasilitasi langsung oleh SETO dan PMU Kabupaten Sika.

Menurut dokumen RPTK program COREMAP Fase II Desa Nawangkewa isu-isu pokok yang ada dan berkembang adalah :

1. Bidang Konservasi : (a). terumbu karang rusak; (b). setiap tahun terjadi sedimentasi karena sering terjadi banjir yang masuk ke laut; dan (c). praktek masyarakat dalam penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
2. Bidang Usaha Ekonomi Produktif: (a). pendapatan masyarakat Desa Nawangkewa rendah; (b). sekitar 80 persen penduduk adalah petani dan sisanya nelayan (20 orang), pengusaha, PNS dan usaha lainnya; dan (c). Pendapatan rata rata rendah yaitu Rp.450.000,-/bln.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan : Tingkat pendapatan rendah, karena keterbatasan modal, kurang kemampuan serta ketrampilan mengelola usaha.
4. Bidang Sarana dan Prasarana : Tingkat kesehatan rendah, karena lingkungan kurang bersih, kurang tersedianya air bersih, kurangnya pelayanan kesehatan dan tingkat kesadaran masyarakat tentang kesehatan rendah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka misi program COREMAP Fase II adalah: *Pertama*, meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan menjaga kelestarian sumber daya pesisir dan laut. *Kedua*, meningkatkan pendapatan masyarakat. *Ketiga*, meningkatkan pengetahuan/skill dan manajemen usaha bagi perempuan. *Keempat*, meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan isu pokok, dan misi program COREMAP Fase II di Desa Nawangkewa, maka telah ditetapkan 15 sasaran program. Dengan sasaran inilah kemudian disusun RPTK yang berisi strategi, kegiatan, waktu pelaksanaan, biaya, dan penanggung jawab program.

Organisasi pelaksanaan RPTK yang telah dibuat bersama , selanjutnya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* yang ada di desa tersebut. Di Namangkewa LPSTK merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program COREMAP Fase II. Dalam menjalankan tugasnya LPSTK berkoordinasi dengan Kepala Desa, Fasilitator Desa, BPD dan Motivator Desa. Kepala desa ikut mendorong masyarakat untuk aktif

dalam program dan menjadi penengah yang obyektif bila terjadi perselisihan dalam masyarakat berhubungan dengan pelaksanaan program. Dalam melaksanakan kegiatan program, LPSTK dibantu oleh LKM khususnya berkaitan dengan program yang berasal dari dana *seed fund*/ dana bergulir. Dalam pelaksanaan pengawasan laut dibantu oleh Pokmaswas yang bertugas untuk mengawasi lingkungan laut agar tidak terjadi pengrusakan yang mengancam pelestarian terumbu karang. Kegiatan program yang berkaitan penguatan ekonomi masyarakat, LPSTK dibantu oleh Pokmas Bidang Usaha Ekonomi Produktif, pengelolaan laut dengan Pokmas Konservasi dan peningkatan peranan wanita di bidang ekonomi keluarga dengan Pokmas Pemberdayaan Perempuan.

- *Kegiatan COREMAP Fase II Desa Namangkewa*

Kegiatan program COREMAP Fase II di Desa Nawangkewa berpedoman pada RPTK. Kegiatan tersebut baru mulai berjalan sejak terbitnya dokumen RPTK pada bulan Desember 2007. Dengan demikian sebelumnya (3 tahun sejak 2004) kegiatan yang dilakukan masih bersifat persiapan seperti pembentukan pengurus LPSTK, Pokmas, PRA, dan penyusunan RPTK. Kegiatan lapangan antara lain identifikasi Pokmas yang ada sejak COREMAP Fase I oleh MD, identifikasi penghasilan nelayan dan pelatihan untuk pengurus dan MD.

Kegiatan yang mendasarkan dana dari COREMAP Fase II antara lain adalah dari *Village Grant*. Dana tersebut diberikan Desa Nawangkewa untuk kegiatan pembangunan penampungan air bersih dan pipanisasi di Dusun Napungseda. Biaya yang disediakan sebesar RP.75.000.000,- dan swadaya masyarakat sebesar Rp.11.500.000,-. Peletakan batu pertama pembangunan bak penampungan dilaksanakan pada bulan Januari 2008 dan sampai sekarang pipanisasi belum dapat diselesaikan. Pembangunan bak penampungan di Dusun Napungseda dianggap tidak tepat oleh sebagian masyarakat desa, karena air bersih tidak dapat menjangkau dusun lain yang juga membutuhkan terutama dusun yang terletak di tepi pantai.

Kegiatan COREMAP Fase II juga membangun Pondok Informasi di Desa Nawangkewa. Biaya yang diberikan sebesar Rp.10.000.000,-. Pada kesepakatan pertama dengan masyarakat Pondok Informasi akan dibangun dengan merehabilitasi Pos Pengamanan Laut, dan menambah WC dan sumur. Sehubungan adanya bencana ombak besar beberapa tahun yang lalu kantor KAMLA tersebut mengalami rusak berat. Kemudian Pondok Informasi dialihkan ke lokasi yang agak jauh dari pantai dengan merehabilitasi bekas Kantor BPD. Kondisi Pondok Informasi belum dilengkapi dengan buku-buku dan poster-poster karena rehabilitasi baru saja selesai. Dengan demikian Pondok Informasi belum berfungsi.

Kegiatan lain dari program COREMAP belum ada, sehingga menurut MD banyak masyarakat mulai bosan dengan program COREMAP Fase II, karena terkesan tidak merata dan sangat lambat. Pokmas sudah terbentuk tetapi kegiatan belum ada dan tidak diberikan dana. Harapan masyarakat hendaknya COREMAP Fase II merealisasikan programnya, seperti yang pernah disosialisasikan sebelumnya. Masyarakat mendengar kabar bahwa dana UEP akan segera turun melalui LKM tetapi sampai sekarang kelihatannya belum ada perencanaan pelaksanaannya. Perhitungan beberapa masyarakat dana itu bila tiba tidak dapat mencukupi untuk penambahan modal. Bila dana dibagikan untuk modal anggota pokmas, masing-masing anggota hanya akan menerima sekitar Rp 100.000,-. Jumlah ini oleh masyarakat dianggap sangat kecil untuk modal usaha.

Kegiatan UEP di Desa Namangkewa memang ada, yaitu kios dan CU (Credit Union) tetapi ini merupakan kegiatan yang dirintis masyarakat sendiri. Kegiatan koperasi yang dibentuk oleh program COREMAP Fase II belum ada. CU di Desa Namangkewa berkembang baik dapat menolong anggotanya yang memerlukan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari atau anak sekolah.

Kegiatan Pokmaswas untuk pengawasan laut belum berjalan karena peralatan (seperti armada kapal dan radio panggil) belum ada. Pos Kamla (sudah rusak) dan armada kapal laut merupakan warisan

program COREMAP Fase I juga sudah rusak. Selama COREMAP Fase II, ini belum ada penggantian fasilitas untuk pengawasan laut.

Dalam pelaksanaan kegiatan program COREMAP Fase II banyak keluhan yang disampaikan oleh para pelaksana. Keluhan tersebut antara lain : tidak tersedianya biaya operasional untuk kegiatan LPSTK dan MD. Honor untuk petugas juga terlambat turun bahkan sering sampai tiga bulan tidak terima. Kondisi yang tidak jelas ini dapat mempengaruhi pencapaian tujuan COREMAP Fase II di Desa Namangkewa.

Tabel 3.1. Implementasi Program COREMAP Fase II di Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka Sampai Mei 2008*)

Indikator		Desa	
		Kojadoi	Namangkewa
(1)		(2)	(3)
LPSTK		Dibentuk November 2006	Dibentuk Januari 2006
RPTK		Disusun November 2007 Kegiatan sosialisasi Desember 2007	Disusun November 2007 Kegiatan sosialisasi Desember 2007
Pokmas	Konservasi	Sudah terbentuk, tetapi kegiatan belum ada	Sudah terbentuk, tetapi kegiatan belum ada
	Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Sudah terbentuk, tetapi kegiatan belum ada karena dana bergulir untuk penguatan modal belum dicairkan	Sudah terbentuk, tetapi kegiatan belum ada karena dana bergulir untuk penguatan modal belum dicairkan
	Wanita/ Jender	Sudah terbentuk, tetapi kegiatan belum ada	Sudah terbentuk, tetapi kegiatan belum ada
	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah terbentuk, dan telah dibekali dengan pelatihan Sismaswas (Sistem Pengawasan Masyarakat) ▪ Kegiatan pengawasan masih terbatas dan dilakukan secara mandiri, karena sarana operasional (perahu motor dan radio komunikasi) belum ada) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah terbentuk, dan telah dibekali dengan pelatihan Sismaswas (Sistem Pengawasan Masyarakat) ▪ Kegiatan pengawasan masih terbatas dan dilakukan secara mandiri, karena sarana operasional (perahu motor dan radio komunikasi) belum ada)

	Rumput Laut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah terbentuk dan pernah mendapatkan berbagai pelatihan sejak Coremap Fase I 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada
Program/ Kegiatan	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana <i>village grant</i> tahun anggaran 2007 digunakan untuk pengadaan sarana mesin listrik dan perahu motor (Dusun Koja Besar), fasilitas MCK (Dusun Margajong) dan pipanisasi air bersih (Dusun Kojadoi) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana <i>village grant</i> tahun anggaran 2007 digunakan untuk pembangunan penampungan air dan pipanisasi di Dusun Napungseada
	Pondok Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pondok informasi dibangun awal 2008 dan sudah dilengkapi dengan pengadaan buku-buku, tetapi belum dilengkapi sarana pendukung (lemari dan ATK) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pondok informasi dibangun awal 2008 dan sudah dilengkapi dengan pengadaan buku-buku, tetapi belum dilengkapi sarana pendukung (lemari dan ATK)

Catatan : - Dalam penyusunan RPTK di Kojadoi dilakukan tgl 12-13 Januari 2007 dan 16 April 2007 dan di Namangkewa tgl 29 Maret 2007 dan 16 November 2007 dengan menggunakan metode PRA.

*) laporan implementasi program COREMAP sampai pertengahan Mei 2008 (sampai saat penelitian dilakukan)

3.2. PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN COREMAP

Pada dasarnya program COREMAP adalah berusaha untuk membangun masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam peningkatan kesejahteraan kehidupannya. Tujuan tersebut akan berhasil jika ada keterlibatan masyarakat secara aktif terutama bagi masyarakat nelayan pulau dan pesisir. Mereka harus dilibatkan dari semua tahapan kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi. Oleh karena itu, sumber informasi sebagai wahana peningkatan pengetahuan masyarakat menjadi hal yang *urgent* dalam kegiatan program COREMAP. Kemudian pada fase II program COREMAP di Kabupaten Sikka didahului dengan kegiatan sosialisasi kepada desa-desa yang menjadi sasaran COREMAP. Hal ini karena diyakini dengan mendasarkan kepada partisipasi warga masyarakat, mereka menjadi paham terhadap tujuan program. Hal ini

akan membuat semakin memudahkan untuk mencapai keberhasilan program. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas tentang pengetahuan dan partisipasi masyarakat di dua kawasan kajian.

3.2.1. Kawasan pulau-pulau kecil (Desa Kojadoi)

Masyarakat Desa Kojadoi umumnya telah mengerti dan memahami tentang COREMAP. Hal ini disebabkan program ini telah lama (hampir dua fase) masuk ke desa tersebut. Kemudian kawasan pemukiman penduduk di desa ini cukup mengelompok. Di samping pemukiman penduduk mengelompok, mereka telah saling mengenal dan memiliki kegiatan ekonomi yang hampir sama. Mayoritas penduduk desa ini memiliki mata pencaharian utama usaha budi daya rumput laut. Ada sebagian penduduk yang masih memiliki kegiatan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan lauk rumah tangga sendiri. Sebagian yang lain bertani untuk sekedar penambah pendapatan atau untuk memenuhi kebutuhan sayuran atau bahan makanan untuk rumah tangga sendiri, seperti ubi kayu dan jagung.

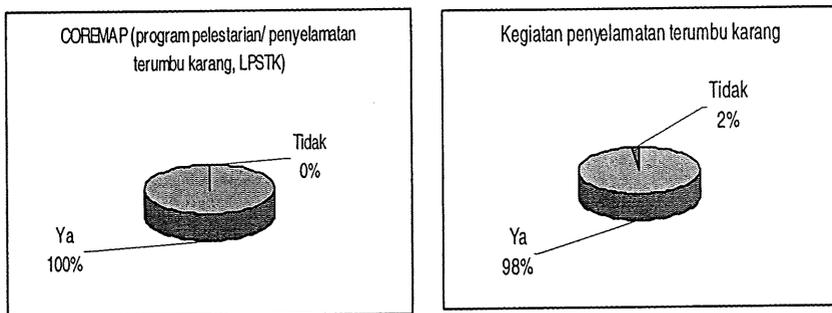
Tingkat pendidikan mayoritas penduduk masih rendah, tetapi penduduk di Kojadoi memiliki pengetahuan tentang laut dan keterampilan pada kegiatan di laut yang cukup. Ini berarti bahwa penduduk desa ini memiliki pengetahuan tentang kehidupan laut. Karena dalam program COREMAP Fase I telah dikembangkan usaha budi daya rumput laut, maka mereka umumnya telah mengerti program COREMAP tersebut. Bahkan sebagian besar telah terlibat dalam kegiatan atau sebagai anggota suatu kelompok kegiatan (Pokmas) yang mendapat binaan dan bantuan dari COREMAP.

- *Pengetahuan dan partisipasi penduduk dalam COREMAP*

Pengetahuan responden tentang COREMAP di Desa Kojadoi menunjukkan bahwa ternyata semuanya telah mengetahui dan mengerti tentang adanya kegiatan COREMAP di desanya. Hal ini ditunjukkan secara mutlak dari semua responden (100 persen) yang diwawancarai. Namun ketika ditanyakan kaitannya dengan kegiatan penyelamatan terumbu karang masih ada 2 persen responden yang

mengaku tidak mengetahui kegiatan penyelamatan tersebut (Diagram 3.1). Ada 98 persen responden yang mengetahui tentang kegiatan penyelamatan terumbu karang. Mereka yang tidak mengetahui kegiatan penyelamatan tersebut apabila ditelusuri ternyata adalah responden yang sudah berusia tua (di atas 70 tahun) dan perempuan. Hal tersebut wajar jika tidak mengetahui, atau ragu dalam menjawab tentang kegiatan penyelamatan terumbu karang yang ada di dalam program COREMAP di desanya, karena mereka tidak pernah mengetahui atau melakukan kegiatan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan COREMAP.

Diagram 3.1. Pengetahuan Responden tentang COREMAP, Desa Kojadoi, 2008 (Persentase, N=100)



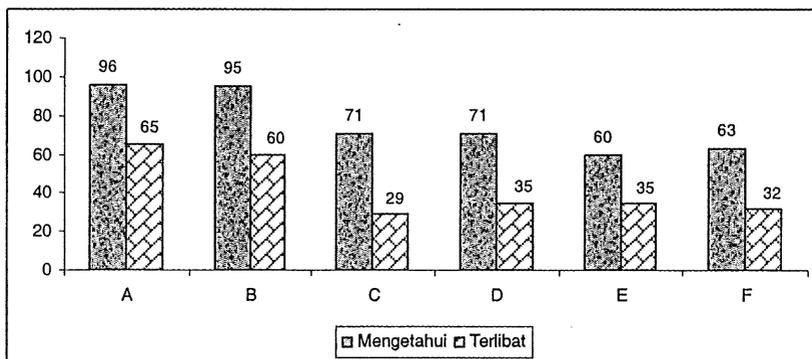
Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Demikian halnya dalam kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian terumbu karang, hampir semua responden (96 persen) di Desa Kojadoi mengaku telah mengetahui. Namun dari sejumlah responden yang telah mengetahui tersebut, ternyata hanya sekitar 68 persen yang turut terlibat dalam kegiatan (Diagram 3.2). Kemudian ada sekitar 32 persen responden yang mengaku mengetahui, tapi tidak pernah ikut dalam kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang, karena ada berbagai alasan antara lain kegiatan mata pencaharian mereka tidak berkaitan langsung dengan pemanfaatan

sumber daya laut, sudah tua tidak bekerja sehingga tidak pernah ikut dalam kegiatan COREMAP, sakit-sakitan dll.

Kemudian dalam hal kegiatan perlindungan/ pengawasan pesisir dan laut, ada sekitar 95 persen responden di Kojadoi telah mengetahui adanya kegiatan tersebut. Ada sekitar 63 persen responden yang mengaku telah terlibat dalam kegiatan tersebut. Dilihat dari proporsi mereka yang terlibat, hal tersebut menunjukkan gambaran yang cukup bagus dan positif. Ini berarti sebagian besar dari masyarakat desa kajian telah ikut dalam kegiatan usaha perlindungan/ pengawasan pesisir dan laut. Hal ini penting mengingat perlindungan dan pengawasan pesisir dan laut harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi masyarakat pesisir/ pulau yang kehidupannya sangat tergantung pada sumber daya laut.

Diagram 3.2. Pengetahuan dan Keterlibatan Responden dalam Kegiatan COREMAP, Desa Kojadoi, 2008 (N=100)



Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Keterangan:

- A Peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya pelestarian terumbu karang
- B Perlindungan/pengawasan pesisir dan laut
- C Pembentukan LPSTK
- D Pelatihan UEP
- E Pendampingan UEP
- F Penyusunan RPTK

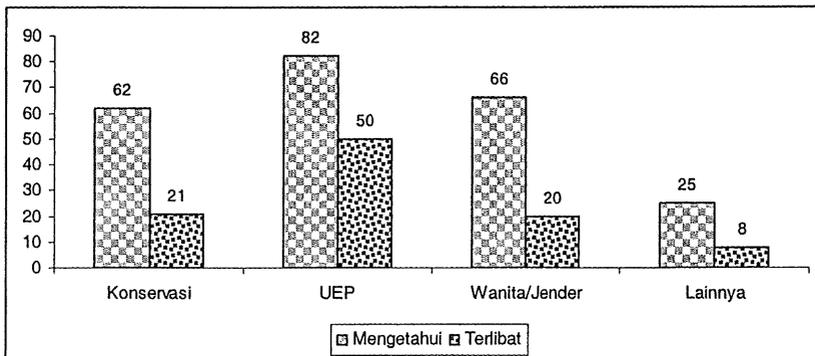
Dalam kegiatan pembentukan LPSTK ternyata tidak semua responden di Desa Kojadoi mengetahuinya, hanya 71 persen yang mengetahui kegiatan tersebut. Dari sejumlah responden yang mengetahui kegiatan pembentukan LPSTK tersebut ternyata hanya sekitar 41 persen yang terlibat dalam kegiatan pembentukan. Ini berarti ada sekitar 59 persen atau hampir dua per tiga responden merasa tidak pernah terlibat atau ikut serta dalam pembentukan LPSTK. Responden yang tidak terlibat dalam pembentukan LPSTK tersebut disebabkan antara lain mungkin memang tergolong mereka yang tidak diundang. Alasan lainnya mereka diundang, tapi tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut karena alasan-alasan tertentu.

Dalam kegiatan pelatihan untuk usaha ekonomi produktif (UEP) ada 71 persen responden yang mengaku mengetahuinya. Namun hanya kurang dari separohnya (49 persen) yang dapat ikut dalam kegiatan pelatihan. Hal tersebut mungkin hanya anggota masyarakat terpilih atau memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diikuti. Sementara untuk kegiatan pendampingan, ternyata hanya 60 persen responden yang mengatakan mengetahuinya. Mungkin hanya mereka yang menjadi pendamping dan yang merasa mendapatkan pendampingan yang mengetahuinya. Dari sejumlah responden yang mengetahui adanya pendampingan tersebut sekitar 58 persen yang pernah terlibat dalam kegiatan. Sebagian dari mereka kemungkinan para responden yang pernah berperan dalam pendampingan dalam kegiatan UEP dan responden anggota UEP yang pernah merasa didampingi..

Bagaimana dengan kegiatan penyusunan rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK)? Ada sekitar 63 persen responden di Desa Kojadoi yang mengetahui adanya kegiatan penyusunan RPTK tersebut. Dari sejumlah responden yang mengetahui adanya kegiatan tersebut, hanya 51 persen yang mengaku pernah terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah para pengurus yang terlibat kegiatan COREMAP, pengurus dan anggota Pokmas serta para aparat desa yang diundang dan hadir dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan penyusunan RPTK.

Kemudian bagaimana tentang pengetahuan dan keterlibatan responden di Desa Kojadoi dalam kegiatan Pokmas (kelompok masyarakat)? Secara umum sebagian besar responden mengetahui adanya kegiatan Pokmas di desanya, terutama Pokmas UEP, Pokmas Perempuan/Jender dan Pokmas Konservasi. Namun mereka yang terlibat dalam kegiatan Pokmas tersebut umumnya masih belum banyak (Diagram 3.3).

Diagram 3.3. Pengetahuan dan Keterlibatan Responden dalam Kegiatan Pokmas, Desa Kojadoi, 2008 (N=100)



Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Di antara beberapa Pokmas tersebut nampaknya yang paling populer adalah kegiatan Pokmas Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Kegiatan ini yang paling banyak diketahui oleh para responden (82 persen). Kemungkinan kegiatan Pokmas ini yang paling memberi manfaat langsung untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Di antara Pokmas yang lain Pokmas UEP ini yang paling banyak anggota masyarakat terlibat. Dari 82 persen responden yang mengetahui adanya kegiatan Pokmas UEP, ternyata 61 persen pernah terlibat dalam kegiatan. Hal ini sangat wajar karena tujuan utama kegiatan COREMAP adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan atau yang menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya laut.

Kegiatan Pokmas yang juga masih cukup dikenal responden adalah Pokmas Perempuan/ Jender. Ada sekitar 66 persen responden yang mengetahui adanya kegiatan Pokmas Perempuan. Sesuai dengan namanya kelompok ini khusus untuk kegiatan usaha para perempuan/ibu-ibu. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan Pokmas ini di Desa Kojadoi? Hanya sekitar 30 persen dari responden yang mengaku mengetahui tersebut yang anggota rumah tangganya/ isterinya ikut serta dalam Pokmas Perempuan/ Jender, sebab jumlah anggota Pokmas ini sangat terbatas terutama pada para perempuan yang telah memiliki usaha di desanya.

Bagaimana dengan kegiatan Pokmas Konservasi? Ada sekitar 62 persen responden ternyata telah mengetahui adanya kegiatan Pokmas Konservasi. Indikasi yang cukup baik bahwa sosialisasi tentang Pokmas Konservasi sudah meluas, meskipun belum 100 persen. Namun dari mereka yang mengetahui hanya sekitar 34 persen yang mengaku terlibat. Hal ini wajar sebab anggota Pokmas Konservasi tidak memerlukan anggota masyarakat yang banyak seperti Pokmas UEP. Namun Pokmas ini penting dan perlu ditingkatkan masyarakat yang terlibat untuk menjaga pelestarian sumber daya laut dan keberlangsungan pendapatan masyarakat dari sumber daya laut.

Pokmas lainnya adalah Pokmaswas, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro. Namun masih sedikit dikenal oleh responden dan masih sedikit yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Khusus untuk koperasi di Kojadoi telah ada Koperasi Serba Usaha (KSU) yang dibentuk sejak COREMAP Fase I. Kegiatannya meliputi simpan pinjam, membuka toko dan membeli hasil rumput laut. Anehnya banyak responden mengaku tidak mengetahui apa kegiatannya. Sebagai petunjuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Desa Kojadoi secara umum agar mereka dapat ikut memanfaatkan peran koperasi yang ada di desanya.

- *Manfaat COREMAP untuk kehidupan ekonomi penduduk*

Dalam pembahasan tentang manfaat COREMAP untuk kehidupan ekonomi penduduk berdasarkan pada jawaban pertanyaan

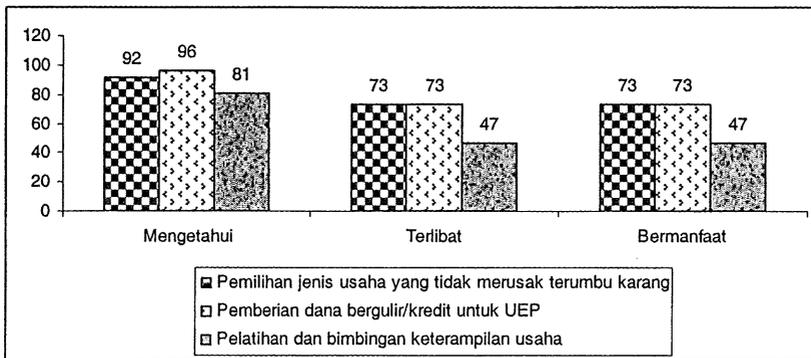
tentang pengetahuan dan keterlibatan responden dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan COREMAP. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah : (1). Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang; (2). Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif (UEP) masyarakat; (3). Pelatihan dan bimbingan tentang ketrampilan untuk meningkatkan usaha (seperti usaha ternak itik, ayam, lele, keramba ikan, pembuatan kue, minyak kelapa, pengolahan hasil laut dsb); dan (4). Lainnya, apabila ada. Dari jenis-jenis kegiatan tersebut selanjutnya ditanyakan kepada responden sebagai berikut : (1) Apakah mengetahui kegiatan tersebut; (2). Jika, ya, sumber informasi dari mana; (3) Apakah terlibat dalam kegiatan tersebut; dan (5). Jika terlibat, apakah merasa bermanfaat.

Mengenai jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan COREMAP di Desa Kojadoi hanya ada 3 kegiatan, kegiatan lainnya tidak muncul dalam wawancara. Dalam kegiatan pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang, ternyata mayoritas responden (92 persen) telah mengetahuinya (Diagram 3.4). Umumnya (95,7 persen) mereka mendapatkan informasi tersebut dari fasilitator/motivator/ pengurus COREMAP di desa. Sebagian kecil yang lain mengaku mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang terlibat dalam COREMAP. Kemudian mengenai keterlibatannya, ternyata sebagian besar (79,3 persen) dari mereka mengaku terlibat dalam kegiatan. Bagaimana tentang manfaat yang dirasakan dalam kegiatan tersebut?. Semua responden ternyata mengaku cukup bermanfaat bagi dirinya.

Dalam kegiatan pemberian dana bergulir/ kredit untuk pengembangan UEP masyarakat, hampir semua responden (96 persen) menyatakan mengetahui. Mengenai sumber informasi kegiatan tersebut mayoritas (93,4 persen) melaporkan dari fasilitator/motivator/pengurus COREMAP di desa dan sebagian kecil yang lain dari anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan COREMAP. Sebagian besar (76 persen) dari mereka yang melaporkan mengetahui adanya kegiatan tersebut, mereka pernah terlibat dalam kegiatan. Semua yang pernah mengaku terlibat menyatakan adanya manfaat dari kegiatan tersebut. Bagi sebagian

besar responden Desa Kojadoi dengan adanya dana bergulir telah membantu permodalan untuk meningkatkan usaha budi daya rumput laut.

Diagram 3.4. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan, Keterlibatan dan Manfaat dalam Kegiatan Ekonomi COREMAP, Desa Kojadoi, 2008 (N=100)



Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan tentang ketrampilan untuk meningkatkan usaha dari COREMAP, polanya hampir sama dengan jawaban kegiatan-kegiatan sebelumnya hanya persentasenya lebih rendah. Kemungkinan hal tersebut disebabkan ada masyarakat nelayan yang tidak pernah mengetahui adanya kegiatan pelatihan dan bimbingan tentang ketrampilan untuk meningkatkan usaha dari COREMAP, namun mereka mendapatkan pengetahuan dari orang lain (famili, tetangga, teman dsb.) yang pernah mendapatkan bimbingan dan ketrampilan. Sekitar 81 responden pernah mengetahui adanya kegiatan pelatihan dan bimbingan tentang ketrampilan untuk meningkatkan usaha. Sumber informasi mayoritas (90,1 persen) diperoleh dari fasilitator/motivator/pengurus COREMAP. Namun kemudian hanya 58 persen yang mengaku terlibat dalam kegiatan tersebut dan hal yang menggembirakan ternyata juga semuanya mengaku kegiatan tersebut bermanfaat. Dalam kegiatan usaha budi

daya rumput laut, mereka dapat memperoleh pelatihan dan bimbingan cara menanam dan memelihara rumput laut yang benar.

- *Pengetahuan dan keterlibatan penduduk mengenai jenis usaha*

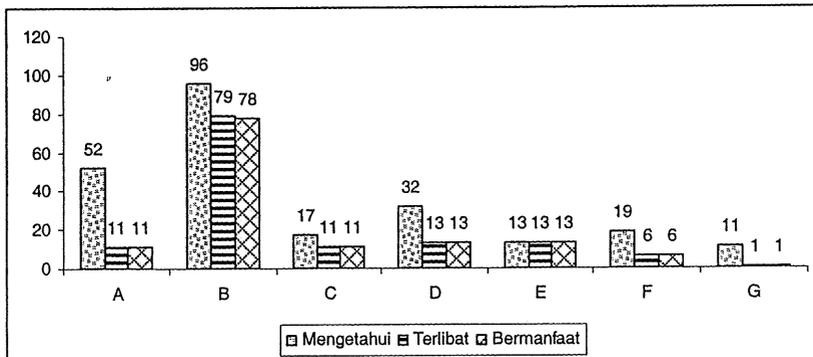
Dalam kajian ini juga ditanyakan tentang jenis-jenis usaha yang pernah dilakukan masyarakat/ Pokmas yang mendapat fasilitas/ bimbingan dan atau dana bergulir/kredit dari program COREMAP di daerah ini. Kepada responden ditanyakan apakah : (1). Mengetahui jenis usaha tersebut; (2). Jika ya, apakah terlibat dalam kegiatan; dan (3). Jika terlibat, apakah merasa bermanfaat. Jenis-jenis usaha yang ada di Desa Kojadoi adalah usaha perdagangan/warung, usaha budi daya rumput laut, usaha perikanan tangkap, usaha ternak, usaha pengolahan, dan usaha kerajinan/ *souvenir*. Diagram 3.5 menunjukkan bahwa dari 6 jenis usaha yang terdapat di Desa Kojadoi, hanya jenis usaha budi daya rumput laut yang paling banyak (98 persen) diketahui oleh responden. Juga jumlah reponden yang terlibat dalam kegiatan usaha paling tinggi (82,3 persen) adalah usaha budi daya rumput laut. Hampir semua responden merasa manfaatnya program COREMAP tersebut.

Urutan berikutnya adalah jenis usaha untuk perdagangan/warung, ada sekitar 53 persen responden yang melaporkan mengetahui. Namun tidak sampai separohnya (21,2 persen) yang pernah terlibat atau pernah mendapat fasilitas/ bimbingan atau dana bergulir/ kredit dari program COREMAP. Jumlah tersebut dapat dimungkinkan karena jumlah penduduk yang memiliki usaha/ memiliki kemampuan perdagangan di Desa Kojadoi tidak banyak. Namun semuanya melaporkan bermanfaat dengan adanya program tersebut.

Jenis usaha ternak merupakan usaha yang tidak banyak (32,7 persen) diketahui mendapatkan bimbingan/fasilitas atau dana bergulir/ kredit dari program COREMAP. Ternak yang memungkinkan di Desa Kojadoi hanyalah ayam dan itik. Dari jumlah responden tersebut hanya sekitar 40 persen yang mengaku terlibat atau mendapat bantuan dari program COREMAP. Kemudian dari semua mereka yang terlibat mengatakan bermanfaat adanya program

tersebut. Sementara jenis usaha lainnya (usaha perikanan tangkap, usaha pengolahan dan usaha kerajinan masing-masing hanya kurang dari 20 persen responden yang mengetahuinya.

Diagram 3.5. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan, Keterlibatan dan Manfaat dalam Jenis Usaha yang Pernah Dilakukan COREMAP, Desa Kojadoi, 2008 (N=100)



Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Keterangan:

- A Perdagangan/warung
- B Budidaya: kerambah ikan/udang/kepiting/biota laut lain (termasuk rumput laut)
- C Perikanan tangkap: pembelian armada dan alat tangkap
- D Ternak ayam/bebek/itik/kambing/lele/babi
- E Pembuatan makanan/kue/minyak kelapa
- F Pengolahan hasil laut/ikan asin/asap/pindang/kerupuk
- G Kerajinan/souvenir

Dalam kajian ini responden juga diminta untuk membandingkan kondisi ekonomi rumah tangganya sekarang dengan sebelum adanya program COREMAP masuk di Desa Kojadoi. Sebagian besar responden (93 persen) ternyata melaporkan kondisi ekonomi sekarang lebih baik dibandingkan dengan kondisi ekonomi sebelum program COREMAP masuk desa ini. Hal tersebut terungkap

dari keterangan beberapa informan bahwa sebelum adanya program COREMAP di desa ini penghasilan utama penduduk hanya dari usaha penangkapan ikan. Penghasilan dari usaha penangkapan ikan ini sangat tidak menentu karena sangat tergantung pada kondisi musim. Pada musim gelombang kuat kadang-kadang tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Apalagi dengan adanya kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap penghasilan dari tangkapan, karena biaya produksi menjadi cukup tinggi. Dengan adanya program COREMAP masuk desa ini, banyak penduduk Desa Kojadoi yang beralih ke usaha budi daya rumput laut. Dari beberapa informan mengatakan bahwa dengan beralihnya ke usaha budi daya rumput laut penghasilan rumah tangga lebih meningkat, lebih teratur dan stabil sepanjang tahun serta tidak tergantung pada musim dan harga BBM. Di samping itu, usaha budi daya rumput laut ini telah membuka kesempatan kerja bagi seluruh anggota rumah tangga, yakni suami, istri, anak-anak dan orang-orang tua. Sementara penangkapan ikan hanya dapat dilakukan oleh para laki-laki dewasa saja. Dalam penelitian ini ada 7 persen responden yang menyatakan kondisi sekarang tidak memberikan kehidupan yang lebih baik dibanding sebelum adanya program COREMAP. Mereka itu ternyata responden yang sudah berusia tua dan kemampuan fisiknya sudah tidak produktif lagi.

Kondisi yang dirasakan lebih baik oleh sebagian besar responden tersebut, apabila pertanyaan dirubah dengan membandingkan kondisi ekonomi rumah tangga sekarang (COREMAP Fase II) dengan kondisi pada masa COREMAP Fase I mungkin jawabnya akan lain. Hal ini mengingat dalam setahun terakhir di Desa Kojadoi sedang dilanda hama rumput laut, kondisi iklim dan musim tidak kondusif untuk tanaman rumput laut akibatnya produksi rumput laut sangat menurun. Penurunan produksi rumput laut tersebut mengakibatkan penghasilan nelayan selama setahun terakhir juga mengalami penurunan. Hal ini akan dibahas dalam bab IV di belakang.

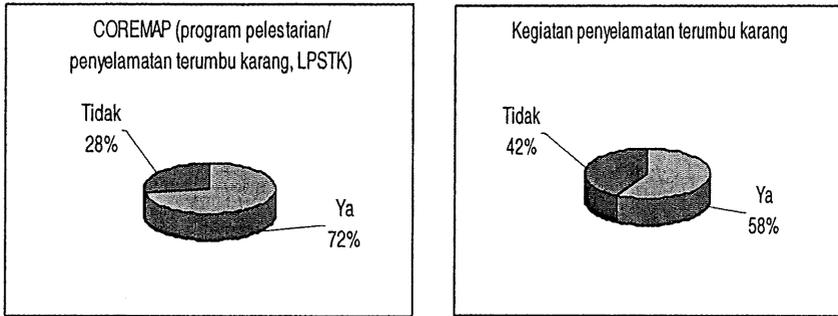
3.2.2. Kawasan daratan (Desa Namangkewa)

Seperti halnya di Desa Kojadoi program COREMAP di Desa Namangkewa juga telah dimulai sejak tahun 2000/2001 atas bantuan Aus-AID. Oleh karena itu, program COREMAP telah dikenal oleh sebagian masyarakat. Popularitas COREMAP tersebut tidak lepas dari peran para fasilitator, motivator dan pengurus COREMAP desa yang telah lama mensosialisasikan ke masyarakat. Desa Namangkewa hanya memiliki wilayah pantai yang sempit dan penduduk yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya laut hanya kurang dari 20 persen. Jadi sebagian besar penduduk Desa Namangkewa adalah bukan nelayan yang tidak menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya laut. Sementara misi utama COREMAP pengelolaan dan pelestarian terumbu karang dan lingkungan laut, maka tampaknya tidak semua penduduk Desa Namangkewa mengenal atau mengetahui adanya kegiatan penyelamatan terumbu karang, apalagi terlibat dalam kegiatannya.

- *Pengetahuan dan partisipasi penduduk dalam COREMAP*

Diagram 3.1a menunjukkan bahwa di Desa Namangkewa ada 72 persen responden menyatakan telah mengetahui adanya program COREMAP. Data ini memperlihatkan secara jelas bahwa belum semua responden di Namangkewa mengetahui program COREMAP karena tidak semua penduduk menggantungkan hidupnya dari sumber daya laut dan menerima sosialisasi program. Hal ini dapat tercermin dalam heterogenitas lapangan pekerjaan di desa ini. Secara geografis letak desa ini berdekatan dengan Pasar Desa Geliting dan jalan raya Maumere – Larantuka, yang penduduknya sudah mengarah pada kehidupan keperkotaan. Fakta lain yang membuktikan bahwa tidak semua responden Desa Namangkewa berorientasi terhadap lingkungan laut adalah hanya 58 persen responden yang mengetahui terhadap kegiatan penyelamatan terumbu karang. Hampir separoh (42 persen) responden ternyata tidak mengetahui adanya kegiatan penyelamatan terumbu karang. Alasan yang wajar mengingat mereka tidak pernah menggantungkan kehidupannya pada sumber daya laut, sehingga kurang peduli terhadap kondisi sumber daya laut.

Diagram 3.1a. Pengetahuan Responden tentang COREMAP, Desa Namangkewa, 2008 (Persentase, N=100)



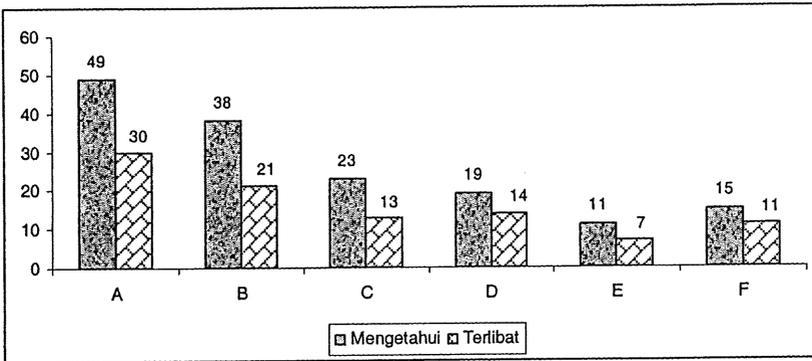
Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

- *Pengetahuan dan keterlibatan penduduk dalam COREMAP.*

Pengetahuan dan keterlibatan responden dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan COREMAP di Desa Namangkewa tercermin pada Diagram 3.2a. Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengetahuan responden terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan COREMAP selama ini masih rendah. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan COREMAP tidak satupun yang telah diketahui oleh responden sampai mencapai 50 persen.

Di antara kegiatan-kegiatan tersebut persentase tertinggi adalah kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya pelestarian terumbu karang. Diagram 3.2a menunjukkan sebesar 49 persen responden yang mengetahuinya. Sebaliknya lebih dari separoh (51 persen) ternyata tidak pernah mengetahui bahwa ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya terumbu karang di desanya selama ini. Namun dari mereka yang mengetahui tersebut sebagian besar (61,2 persen) ternyata telah terlibat dalam kegiatan tersebut.

Diagram 3.2a. Pengetahuan dan Keterlibatan Responden dalam Kegiatan COREMAP, Desa Namangkewa, 2008 (N=100)



Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Keterangan:

- A Peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya pelestarian terumbu karang
- B Perlindungan/pengawasan pesisir dan laut
- C Pembentukan LPSTK
- D Pelatihan UEP
- E Pendampingan UEP
- F Penyusunan RPTK

Kemudian adanya kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir/laut, hanya 38 persen responden yang melaporkan mengetahuinya. Ini berarti sebagian besar dari responden (62 persen) tidak pernah mengetahui adanya kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir/ laut. Dari mereka yang mengaku mengetahui adanya kegiatan perlindungan/ pengawasan pesisir/laut tersebut hanya 55,3 persen yang pernah terlibat dalam kegiatan. Mereka kemungkinan memang betul-betul nelayan yang peduli terhadap sumber daya laut dan kemungkinan lain anggota Pokmas yang mendapat tugas terhadap pengamanan laut (Pokmaswas).

Dalam kegiatan pembentukan LPSTK, ternyata hanya sebagian kecil responden (23 persen) yang mengetahui. Mayoritas responden (77 persen) tidak mengetahui adanya kegiatan pembentukan LPSTK. Dari mereka yang mengetahui adanya

pembentukan LTSTK tersebut ternyata hanya 56,5 persen yang terlibat dalam kegiatan. Kemungkinan mereka yang diundang dan hadir dalam pertemuan-pertemuan dalam rangka pembentukan LPSTK. Kemungkinan besar mereka-mereka itu adalah anggota pengurus LPSTK dan anggota Pokmas yang biasa diundang pertemuan.

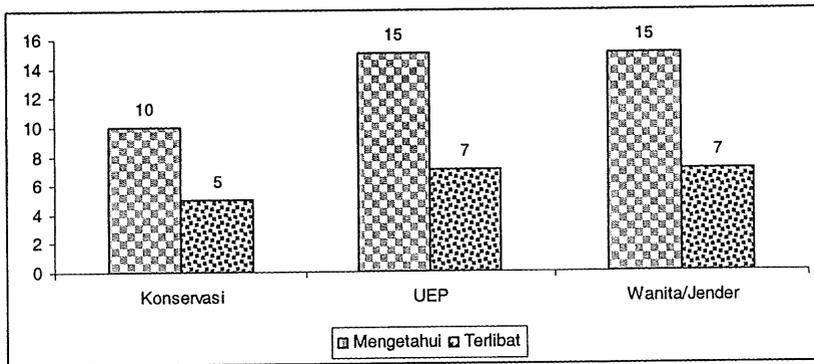
Dalam kegiatan pelatihan untuk usaha ekonomi produktif (UEP), hanya 19 persen responden yang mengetahuinya. Namun sebagian besar (73,7 persen) dari yang mengetahui tersebut ternyata mereka yang terlibat dalam kegiatan pelatihan. Mereka yang terlibat tersebut dapat dipastikan adalah para anggota Pokmas UEP yang memang pernah mendapatkan pelatihan untuk UEP pada program COREMAP fase I. Kemudian dalam kegiatan pendampingan untuk UEP, hanya 11 persen responden yang mengetahui adanya kegiatan tersebut. Sementara yang terlibat dalam kegiatan pendampingan mencapai 63,6 persen.

Dalam kegiatan penyusunan RPTK hanya 15 persen responden yang mengaku mengetahui kegiatan tersebut. Sebagian besar dari mereka (73,3 persen) terlibat dalam kegiatan, dapat dipastikan mereka adalah para pengurus LPSTK dan para pengurus Pokmas yang diundang dalam pertemuan dalam kegiatan penyusunan RPTK.

Bagaimana dengan pengetahuan dan keterlibatan yang terkait dengan kegiatan Pokmas? Kegiatan Pokmas yang teridentifikasi dalam survei hanya 3 Pokmas, yaitu Pokmas UEP, Pokmas Perempuan dan Pokmas Konservasi. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa ternyata hanya sebagian kecil responden yang mengetahui adanya kegiatan Pokmas-Pokmas di Desa Namangkewa. Untuk kegiatan Pokmas UEP hanya 15 persen responden yang mengetahui (Diagram 3.3a). Dari mereka tersebut hanya 46,7 persen yang terlibat atau ikut serta dalam kegiatan Pokmas tersebut. Jadi sebagian besar responden selama ini tidak pernah mengetahui adanya kegiatan Pokmas UEP. Dalam kegiatan Pokmas Perempuan, ada sekitar 15 persen yang mengetahuinya. Mereka yang ikut serta dalam kegiatan tersebut hanya 46,7 persen. Mereka adalah para anggota Pokmas

Perempuan yang membutuhkan pembinaan dari COREMAP. Selanjutnya dalam kegiatan Pokmas Konservasi, hanya dalam proporsi paling kecil (10 persen) yang mengatakan mengetahui kegiatan tersebut. Separoh dari mereka pernah ikut serta dalam kegiatan Pokmas Konservasi, dapat dipastikan mereka anggota Pokmas Konservasi yang terkena sampel.

Diagram 3.3a. Pengetahuan dan Keterlibatan Responden dalam Kegiatan Pokmas, Desa Namangkewa, 2008 (N=100)



Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

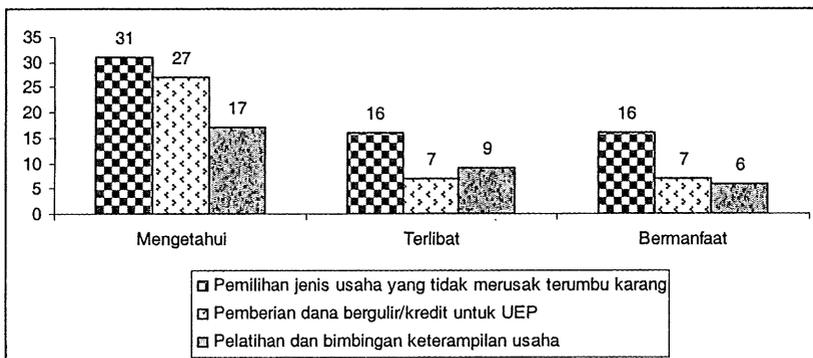
- *Manfaat COREMAP dalam kehidupan ekonomi penduduk*

Ada 3 kegiatan ekonomi yang dilakukan program COREMAP di Desa Namangkewa, yaitu : (1). Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang; (2). Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat; dan (3). Pelatihan dan bimbingan tentang ketrampilan untuk meningkatkan usaha.

Diagram 3.4a menunjukkan bahwa ada 3 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh program COREMAP di desa ini, namun hanya sedikit jumlah responden yang mengetahuinya. Kurang dari sepertiga jumlah responden yang mengetahui kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam kegiatan pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang, sekitar 31 persen responden telah mengetahui adanya

kegiatan tersebut. Berarti sebagian besar tidak pernah mengetahui kegiatan tersebut. Dari mana sumber pengetahuan tersebut, mayoritas mereka mengatakan sumber informasi dari fasilitator/motivator/pengurus COREMAP di desa. Dalam proporsi yang sangat kecil dari aparat desa, peserta COREMAP dan anggota masyarakat lain. Separoh mereka yang mengetahui kegiatan tersebut pernah ikut serta dalam kegiatan pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang. Semua yang terlibat tersebut mengatakan bahwa kegiatan tersebut cukup bermanfaat.

Diagram 3.4a. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan, Keterlibatan dan Manfaat dalam Kegiatan Ekonomi COREMAP, Desa Namangkewa, 2008 (N=100)



Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Dalam kegiatan pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat hanya 27 persen responden yang mengetahui kegiatan tersebut. Rendahnya responden yang mengetahui kegiatan tersebut berarti sosialisasi terhadap kegiatan tersebut masih sangat kurang. Sumber informasi kegiatan tersebut umumnya masih terbatas berasal dari fasilitator/fasilitator/ pengurus COREMAP yang ada di desa. Oleh karena itu, mereka yang terlibat atau ikut serta dalam kegiatan juga sangat terbatas (sekitar 26 persen). Dari semua yang ikut serta dalam kegiatan telah merasakan manfaatnya. Hal ini disebabkan mereka ikut merasakan menerima

dana bergulir, meskipun tidak selalu terkait dengan kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha tergantung kemampuan usaha, pendampingan usaha dan jumlah modal yang diberikan.

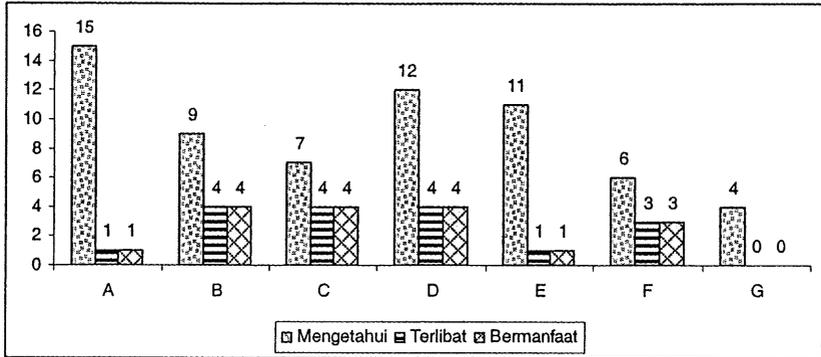
Dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan tentang ketrampilan untuk meningkatkan usaha, sayang sangat kecil responden yang mengetahuinya. Hal ini juga akibat kurang sosialisasi mengenai kegiatan tersebut. Sumber informasi utama kegiatan tersebut juga masih terbatas dari fasilitator/motivator/ pengurus COREMAP di desa. Sekitar 50 persen responden yang mengetahui tersebut telah ikut serta dalam kegiatan. Meskipun tidak semuanya (66,7 persen) merasakan manfaatnya kegiatan pelatihan dan bimbingan tentang ketrampilan untuk meningkatkan usaha tersebut. Hal ini disebabkan karena kurang diberikan pinjaman modal usaha yang cukup, seperti yang selama sering dikeluhkan oleh sebagian masyarakat.

- *Pengetahuan dan keterlibatan responden mengenai jenis usaha*

COREMAP adalah merupakan program yang bersifat nasional dan regional dan lokal. Bersifat nasional karena program ini berlaku menyeluruh di setiap kawasan Indonesia. Kemudian secara regional pemerintah daerah juga melakukan koordinasi bersama dengan pelaksanaan program tersebut. Di tingkat desa program ini juga menjadi wilayah pelaksanaan dari pemerintah desanya.

Mengenai pengetahuan dan keterlibatan terhadap jenis-jenis usaha yang pernah dilakukan masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapat bimbingan/ pelatihan/dana bergulir/kredit dari program COREMAP. Ada 6 jenis usaha yang disebut-sebut responden di Desa Namangkewa, yaitu: (1). usaha perdagangan/ warung; (2). usaha budi daya (rumput laut/ keramba); (3). usaha perikanan tangkap; (4). usaha ternak (ayam, itik, babi); (5). usaha pengolahan (minyak goreng, hasil laut); dan (6). kerajinan (tenun ikat). Secara umum pengetahuan respondens terhadap jenis-jenis usaha tersebut dapat dikatakan cukup kecil, yaitu hanya sepertiga ke bawah. Juga mengenai keterlibatan mereka terhadap jenis-jenis usaha tersebut juga sangat kecil (Diagram 3.5a).

Diagram 3.5a. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan, Keterlibatan dan Manfaat dalam Jenis Usaha yang Pernah Dilakukan COREMAP, Desa Namangkewa, 2008 (N=100)



Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Keterangan:

- A Perdagangan/warung
- B Budidaya: kerambah ikan/udang/kepiting/biota laut lain (termasuk rumput laut)
- C Perikanan tangkap: pembelian armada dan alat tangkap
- D Ternak ayam/bebek/itik/kambing/lele/babi
- E Pembuatan makanan/kue/minyak kelapa
- F Pengolahan hasil laut/ikan asin/asap/pindang/kerupuk
- G Kerajinan/souvenir

Dalam hal bimbingan/bantuan untuk jenis usaha perdagangan/ warung hanya sekitar 36 persen yang mengetahuinya. Mereka yang pernah ikut serta dalam jenis usaha tersebut hanya satu responden dan menurut pendapat mereka bimbingan dan bantuan dari COREMAP cukup bermanfaat. Rendahnya mereka yang mengaku terlibat/ ikut serta dalam jenis usaha tersebut, kemungkinan memang jumlah dana terbatas dan kemungkinan lain tidak terkena sampel..

Mengenai bimbingan/bantuan untuk jenis usaha budi daya (rumput laut/keramba), di desa ini ada sekitar 23 persen responden mengetahui. Dari jumlah tersebut hanya 4 responden (44,4 persen) yang mengaku pernah ikut dalam kegiatan tersebut. Menurut

pengakuannya, kegiatan tersebut cukup bermanfaat karena dapat bimbingan dan bantuan secara cuma-cuma.

Mengenai bimbingan/bantuan untuk usaha perikanan tangkap (bantuan armada/ alat tangkap), hanya 17,1 persen responden yang mengetahui. Namun hanya 4 responden yang melaporkan pernah ikut dalam kegiatan tersebut. Semua responden mengaku cukup bermanfaat dengan adanya kegiatan yang terkait dengan usaha penangkapan ikan.

Sebagai alternatif lain dalam kegiatan jenis usaha ternak (ayam, itik, babi), ada 29,1 persen responden yang mengetahuinya. Namun ternyata hanya 4 responden yang pernah ikut serta kegiatan, hanya semua responden tersebut merasakan ada manfaatnya ikut dalam kegiatan tersebut. Juga kegiatan jenis usaha pengolahan minyak goreng mengingat di daerah tersebut cukup potensi kelapa, ada sekitar 27 persen responden yang mengetahui. Namun hanya ada seorang responden yang mengaku ikut serta dalam kegiatan dan menurut pengakuannya kegiatan tersebut bermanfaat. Kegiatan jenis usaha pengolahan hasil laut, hanya 14,6 persen responden yang mengetahui. Namun hanya 3 orang responden yang kebetulan ikut serta dalam kegiatan dalam bimbingan/menerima dana bergulir/kredit untuk pengembangan usaha. Semua responden tersebut mengaku ada manfaatnya ikut dalam kegiatan tersebut.

BAB IV

PENDAPATAN PENDUDUK DAN PERUBAHANNYA

Sebagaimana telah diungkapkan dalam bab pendahuluan, salah satu tujuan khusus dalam penelitian ini adalah mengkaji perubahan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di desa-desa program COREMAP. Perubahan pendapatan tersebut dimaksudkan untuk memantau dampak COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat/ rumah tangga di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam hal ini pendapatan rumah tangga digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemajuan ekonomi rumah tangga, daerah dan tingkat keberhasilan program yang masuk di suatu desa sasaran. Apabila pendapatan rumah tangga di desa-desa kajian ada kecenderungan meningkat, berarti ekonomi mereka makin meningkat dan berarti pula program COREMAP yang diberikan di desa tersebut termasuk berhasil. Namun dalam pembahasan perlu hati-hati untuk mengatakan ada peningkatan ekonomi rumah tangga yang berarti telah ada peningkatan pendapatan masyarakat di desa kajian. Peningkatan pendapatan rumah tangga mungkin tidak hanya disebabkan oleh masuknya program peningkatan pendapatan rumah tangga dari kegiatan COREMAP, namun juga ada kontribusi program-program peningkatan pendapatan dari institusi/ lembaga lain yang masuk desa tersebut. Program-program tersebut kemungkinan program dari UKM, program dari lembaga swasta (LSM) dan lain-lain. Di samping itu, juga perlu diperhatikan faktor inflasi, kenaikan harga dan lain-lain. Dalam kajian juga perlu dilihat dalam lapangan pekerjaan yang mana yang mengalami peningkatan, bisa terjadi justru lapangan pekerjaan yang menerima program COREMAP tidak mengalami peningkatan. Agar peran program COREMAP lebih jelas, maka dalam bagian ini juga dibahas tentang perubahan pendapatan pada rumah tangga khusus

kenelayanan dan perubahan pendapatan khusus pada rumah tangga anggota Pokmas. Bagian terakhir dari bab ini disajikan beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya dan perubahan pendapatan, terutama pendapatan dari kegiatan kenelayanan.

4.1. PENDAPATAN PENDUDUK KAWASAN PULAU-PULAU KECIL (DESA KOJADOI)

Secara makro pendapatan daerah Kabupaten Sikka berasal dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dengan mendasarkan harga konstan tahun 2000, pada tahun 2003 telah mencapai sebesar Rp 643 609 394,- dan pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 726 098 046,- atau terjadi pertumbuhan 4,1 persen/ tahun. Dari besarnya pendapatan Kabupaten Sikka pada tahun 2003 tersebut, sebesar Rp 292 876 098,- (45,5 persen) merupakan kontribusi sektor pertanian. Pada tahun 2006 kontribusi sektor pertanian tersebut sebesar Rp 317 298 192,- (43,7 persen). Jadi secara proposional ada sedikit penurunan dari kontribusi sektor pertanian. Kemudian dari kontribusi sektor pertanian tersebut, pada tahun 2003 hanya sebesar Rp 38 091 621,- (5,9 persen) berasal dari subsektor perikanan. Pada tahun 2006 ternyata kontribusi subsektor perikanan menjadi Rp 46 722 767,- atau 6,43 persen. Meskipun proporsinya kecil tetapi secara makro masih ada peningkatan pendapatan di subsektor perikanan mencapai 7 persen/ tahun. Sayangnya data untuk tahun 2007 dan 2008 belum tersedia, sehingga gambaran pertumbuhan makro sampai tahun terakhir tidak dapat disajikan.

Pendapatan regional perkapita secara makro di Kabupaten Sikka ada peningkatan dari tahun 2003-2006. Pada tahun 2003 pendapatan regional perkapita sebesar Rp 2 261 537,-. Kemudian telah meningkat menjadi Rp 2 484 230,- pada tahun 2006 atau hanya terjadi sedikit peningkatan sekitar 1,4 persen/ tahun . Sayangnya gambaran pendapatan perkapita untuk sektor pertanian dan subsektor perikanan tidak dapat disajikan, karena keterbatasan data. Dalam pembahasan berikut akan disajikan pendapatan rumah tangga penduduk dari sampel desa penelitian (secara mikro). Pembahasan meliputi rata-rata pendapatan rumah tangga perbulan, pendapatan

perkapita, pendapatan menurut lapangan kerja, pendapatan khusus rumah tangga kenelayanan dan pendapatan khusus bagi penduduk sampel yang pernah menjadi anggota kelompok masyarakat (Pokmas) COREMAP.

4.1.1. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita di Desa Kojadoi

Pendapatan perkapita penduduk Desa Kojadoi pada tahun 2006 adalah Rp 181.850,-/ bulan dan hampir tidak ada peningkatan hanya menjadi Rp 182.400,-/bulan pada tahun 2008. Namun dengan mendasarkan dari besarnya garis kemiskinan Kabupaten Sikka tahun 2006 sebesar Rp 144.485,-/bulan, rata-rata pendapatan perkapita di Desa Kojadoi tersebut masih berada di atas garis kemiskinan. Bagi Desa Kojadoi pendapatan rumah tangga selama 12 bulan terakhir merupakan kondisi yang tidak menggembirakan. Sebagian besar penduduk Desa Kojadoi dalam beberapa tahun terakhir telah menggantungkan kehidupannya (mata pencaharian utama) pada usaha budi daya rumput laut. Produksi rumput laut tersebut terus meningkat sampai tahun 2006. Sehingga penghasilan rumah tangga di desa ini terus meningkat dan bahkan makin mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk mampu menyekolahkan anak-anaknya (Daliyo, Soewartoyo, YB. Widodo dan John Haba, 2007). Namun sayang selama 12 bulan terakhir (2007/2008) sebagai dampak dari perubahan musim dan adanya hama (penyakit *ice-ice* yang ditandai batang rumput laut busuk) menyebabkan produksi budi daya rumput laut terus menurun. Kondisi ini sangat dirasakan oleh sebagian besar rumah tangga di Desa Kojadoi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum rata-rata pendapatan rumah tangga di desa kajian selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan (Tabel 4.1a). Rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan telah mengalami penurunan dari Rp 756.503,33 pada tahun 2006 turun menjadi Rp 624.245,28 pada tahun 2008. Dalam dua tahun terakhir rata-rata per tahun telah mengalami penurunan 10,1 persen. Hal ini juga tercermin pada median pendapatan rumah tangga per bulan yang menurun dari Rp 556.250,00 menjadi Rp 438.515,63 atau telah mengalami

penurunan 12,6 persen. Pendapatan minimum rumah tangga mengalami penurunan 64,1 persen dan pendapatan maksimum rumah tangga juga mengalami penurunan 36,3 persen.

Tabel 4.1a. Statistik Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga dan Per Kapita, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, 2006 dan 2008.

Pendapatan/ Bulan	Jumlah		
	Tahun 2006 (dalam Rp)	Tahun 2008 (dalam Rp)	Tingkat Pertambahan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
Per kapita	181.850	182.400	+ 0,15
Rata-rata rumah tangga	756.503	624.245	- 10,1
Median	556.250	438.515	- 12,6
Minimum rumah tangga	113.333	16.250	- 64,1
Maksimum rumah tangga	6.500.000	3.500.000	- 36,3

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

Penurunan pendapatan rumah tangga tersebut apabila dilihat menurut kelompok pendapatan, ternyata menunjukkan bahwa kelompok pendapatan terendah (< Rp 500.000,00) meningkat cukup tajam (Tabel 4.2a). Peningkatan jumlah rumah tangga pada kelompok pendapatan terbawah tersebut dari 39 persen menjadi 57 persen atau naik 18 persen. Hal ini berarti makin banyak proporsi jumlah rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah. Sebaliknya jumlah rumah tangga pada kelompok pendapatan di atasnya semua mengalami penurunan persentase atau ada kecenderungan makin kecil proporsi jumlah rumah tangga yang berpendapatan tinggi.

Tabel 4.2a. Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Kelompok/ Kategori Pendapatan, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, 2006 dan 2008.

Kelompok/kategori pendapatan/bulan (dalam rupiah)	Frekuensi (Persen)		
	Tahun 2006	Tahun 2008	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
< 500.000	39,0	57,0	+ 18,0
500.000 – 999.000	42,0	27,0	- 15,0
1.000.000 – 1.499.000	12,0	10,0	- 02,0
1.500.000 ke atas	7,0	6,0	- 01,0
Jumlah	100,0	100,0	-
Pendapatan rata-rata (Rp)	756.503	624.245	132.258 (- 17,5 %)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP Fase II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

4.1.2. Pendapatan/ bulan menurut lapangan pekerjaan di Desa Kojadoi

Bagian ini membahas tentang rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan menurut jenis lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga di Desa Kojadoi. Dengan asumsi bahwa jenis lapangan pekerjaan kepala rumah tangga tersebut merupakan sumber utama pendapatan rumah tangga. Penurunan rata-rata pendapatan rumah tangga di Desa Kojadoi tersebut di atas (subbab 4.1.1) apabila dibandingkan menurut lapangan pekerjaan kepala rumah tangga nampak semakin jelas, di mana letak sumber rendahnya pendapatan rumah tangga. Ternyata rata-rata pendapatan rumah tangga dari lapangan pekerjaan perikanan tangkap (Tabel 4.3a) telah mengalami penurunan. Penurunan pendapatan dari perikanan tangkap ini dibahas lebih rinci dalam subbab 4.1.3 di belakang. Untuk di Desa Kojadoi sudah banyak nelayan tangkap yang beberapa tahun terakhir sudah beralih ke usaha budi daya rumput laut. Hal ini disebabkan pengembangan usaha budi daya rumput laut yang diperkenalkan dalam program COREMAP Fase I dan dirasakan cukup prospektif

dan sekaligus mengurangi ketergantungan nelayan untuk eksploitasi biota laut di kawasan terumbu karang di sekitarnya.

Penurunan pendapatan rumah tangga yang sangat dirasakan di Kojadoi akhir-akhir ini utamanya dari usaha budi daya rumput laut, sebab usaha ini yang paling banyak dilakukan oleh penduduk Desa Kojadoi. Pada tahun 2006 rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan dari usaha budi daya rumput laut sebesar Rp 493.155. Namun pada tahun 2008 ternyata mengalami penurunan menjadi Rp 328.608 atau rata-rata per tahun mengalami penurunan 22,5 persen (Tabel 4.2a). Padahal harga produksi rumput laut di pasaran selama periode 2006 – 2008 terus mengalami kenaikan. Penurunan pendapatan tersebut sebagai akibat jumlah hasil panen rumput laut mengalami penurunan yang cukup besar, terutama selama setahun terakhir. Kondisi ini sangat memukul kehidupan rumah tangga budi daya rumput laut di Desa Kojadoi. Bagi sebagian besar penduduk desa tersebut usaha budi daya rumput laut sudah merupakan satu-satunya sumber utama kehidupan rumah tangga mereka. Sebab selama ini dengan adanya usaha budi daya rumput laut ini seluruh anggota rumah tangga dapat berpartisipasi, dari kepala rumah tangga, isteri sampai anak-anaknya, bahkan orang-orang tua ikut membantu atau dapat bekerja sebagai upahan untuk menyiapkan media untuk menanam rumput laut, memetik hasil panen, membersihkan dan penjemuran.

Sayang penurunan jumlah hasil panen rumput laut tersebut telah ditanggapi oleh sebagian nelayan dengan penggunaan pupuk yang disebut GT (*Green Tonic*). Dengan penggunaan pupuk tersebut ternyata memang produksi rumput laut meningkat, besarnya batang rumput laut semakin gemuk. Namun demikian juga belum mampu meningkatkan pendapatan para nelayan. Di samping itu, penggunaan GT disinyalir telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dari wawancara dengan beberapa informan kunci (tokoh masyarakat) dan para pengelola COREMAP di Desa Kojadoi bahwa mereka telah mengamati adanya kecenderungan negatif yang terjadi selama ini, yaitu setelah banyak nelayan budi daya rumput laut yang menggunakan GT. Kejadian-kejadiannya adalah sebagai berikut :

1. Ikan-ikan karang sudah semakin habis.
2. Lumut semakin banyak, semakin banyaknya lumut telah mengganggu pertumbuhan dan kesehatan rumput laut serta menutup/ mengganggu pertumbuhan terumbu karang.
3. Penggunaan GT telah menyebabkan ikan-ikan pemakan lumut sudah tidak mau memakan lumut-lumut di kawasan tanaman rumput laut.
4. Ada penampung rumput laut yang sudah tidak mau lagi membeli hasil rumput laut dari nelayan yang menggunakan GT.

Oleh karena itu, di desa kajian saat ini masyarakat nelayan budi daya rumput laut terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok nelayan pengguna GT dan kelompok nelayan yang bertahan tak mau menggunakan GT. Sayang sebagian besar nelayan telah ikut-ikutan menggunakan GT dan hanya sekitar 40 rumah tangga yang tidak mau menggunakan GT. Para nelayan yang tak mau menggunakan GT pada umumnya para aparat desa dan para pengurus COREMAP di Desa Kojadoi. Mereka pada umumnya tak menyetujui penggunaan GT tersebut dan tunduk pada himbauan yang telah dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka. Mereka sadar bahwa penggunaan GT akan merusak lingkungan. Meskipun selama ini belum ada kajian fisik dari para ahli yang berkompeten bahwa penggunaan pupuk tersebut telah merusak lingkungan dan menurunkan kualitas hasil panen rumput laut. Para informan bukan pengguna GT sangat menunggu hasil-hasil kajian para ahli, sebab menurut keyakinan mereka penggunaan GT pasti merusak lingkungan. Hal ini mengingat bahwa GT adalah semacam pestisida yang hanya digunakan untuk tanaman di darat bukan di laut. Penggunaan GT di laut akan mudah tersebar ke segala arah mengikuti arus laut, sehingga semakin luas perairan yang terkontaminasi GT tersebut. Kejadian tersebut tidak akan terjadi apabila diterapkan untuk tanaman di darat. Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya, Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor: 4222/DPE/PB.440?2007 telah membuat larangan penggunaan pupuk (*green tonic*) untuk tanaman rumput laut. Surat dari Direktorat Jenderal tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, Nomor RC.220/SD1.234/2007K, tertanggal 18 September 2007 yang ditujukan baik kepada para nelayan budi daya rumput laut, para pengumpul dan pengusaha yang memperdagangkan (membeli, menyimpan, menampung, mengangkut dan menjual), yang menggunakan, menjual dan menyediakan pupuk *Green Tonic*. Alasan pelarangan adalah :

1. Mutu rumput laut menjadi turun
2. Harga rumput laut tidak stabil
3. Ketersediaan bibit unggul dan alami menjadi kurang
4. Masa panen kurang dari 45 hari.

Namun demikian sebagian nelayan masih tetap menggunakan pupuk GT. Mereka menganggap dengan pupuk tersebut batang rumput laut menjadi lebih besar-besar dan usianya lebih pendek. Pupuk tersebut disediakan dengan mudah oleh para pengumpul di desanya. Mereka tanpa mempertimbangkan munculnya hama yang makin semarak dan mutu hasil panen akan semakin menurun.

Pendapatan rumah tangga pada lapangan pekerjaan jasa memang mengalami peningkatan. Namun rata-rata pendapatan mereka per bulan cukup rendah, yaitu pada tahun 2006 sebesar Rp 379.306/bulan dan pada tahun 2008 sebesar Rp 431.021/bulan. Jumlah kasus rumah tangga yang pendapatannya dari lapangan pekerjaan jasa ini cukup kecil, hanya kurang dari 5 rumah tangga. Pendapatan rumah tangga yang berasal dari perdagangan juga mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir (2006-2008). Bagi perdagangan seperti kios/warung sembako penurunan tersebut disebabkan karena daya beli masyarakat semakin menurun, sehingga tingkat konsumsi mereka juga menurun. Hasil pengamatan peneliti di beberapa warung/ kios (Mei 2008) menunjukkan jumlah dan jenis barang dagangan mereka semakin berkurang dibandingkan pada pengamatan peneliti tahun 2006. Alasan yang diberikan oleh pemilik warung/kios adalah kekurangan modal dan jumlah pembeli semakin berkurang, karena pendapatan penduduk dari rumput laut semakin

lesu. Bagi pedagang pengumpul hasil rumput lautpun juga ikut mengalami penurunan pendapatan (baca ilustrasi berikut).

Ilustrasi :

SH salah seorang pengumpul rumput laut (pedagang rumput laut) di Desa Kojadoi. Sebagai pengumpul rumput laut telah dijalaninya selama satu tahun. Ada sekitar 25 keluarga yang sering memasok rumput laut ke SH. Asal para pemasok berasal dari Desa Kojadoi sendiri, Desa Darbila dan Desa Perumaan. Pengumpulan rumput laut rata-rata selama dua minggu bisa mencapai 1 ton atau 2 ton per bulan. Harga 6 bulan yang lalu beli dari petani seharga Rp 5.500,00/ kg kering kemudian dijual ke penampung seharga Rp 6000,-/ kg, sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp 500,00/ kg. Akhir-akhir ini harga rumput telah meningkat karena ada penurunan produksi dari para nelayan. Harga terakhir membeli dari nelayan Rp 8.500,00 kering dan dijual ke penampung seharga Rp 8.800, jadi ada keuntungan Rp 300,00/ kg. Keuntungan yang dapat diterima per bulan antara Rp 600.000,00 sampai Rp 1.000.000,00. Modal usaha mendapat pinjaman dari penampung (di Maumere) tanpa bunga. Jumlah pinjaman tak terbatas, apabila sisa pinjaman tinggal Rp 500,00 atau kurang, mereka dapat meminjam lagi. Uang yang berada di pengumpul tersebut dapat dipinjamkan ke para nelayan (sebagai ijon) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan biaya operasional usaha budi daya rumput laut. Konsekuensinya mereka harus membayar saat panen rumput laut dan harus menjual hasil panen ke pengumpul yang telah meminjami modal. Harga jual rumput laut sangat ditentukan oleh pengumpul dan penampung, tidak ada tawar menawar. Persaingan harga antar pengumpul sering terjadi, perbedaan harga biasanya hanya sekitar Rp 200,00/ kg. Kualitas rumput laut yang bagus biasanya cukup kering, warna coklat dan bersih dari kotoran. Selama terjadi penurunan produksi rumput laut dari nelayan menurun, kuantitas rumput laut yang dikumpulkan tidak mengalami penurunan, sebab pengumpulan tidak hanya dari nelayan lokal tapi juga dari desa-desa sekitar. Harga jual rumput laut terus mengalami kenaikan.

Tabel 4.3a. Distribusi Pendapatan Menurut Lapangan Pekerjaan (Sektor), Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, 2006 dan 2008.

Lapangan Pekerjaan Utama	Rata-rata Pendapatan/ Bulan		
	Tahun 2006 (dalam Rp)	Tahun 2008 (dalam Rp)	Tingkat Pertambahan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perikanan tangkap	638.080	226.483	
Perikanan budi daya rumput laut	493.155	328.608	- 22,5
Pertanian (tanaman pangan/ keras)	323.160	54.396	- 143,7
Perdagangan	1.307.333	294.027	- 110,8
Jasa (bengkel, tukang urut dsb)	379.306	431.021	+ 6,6
Industri pengolahan	223.697	125.416	- 12,5
Lainnya	-	194.166	-

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP Fase II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

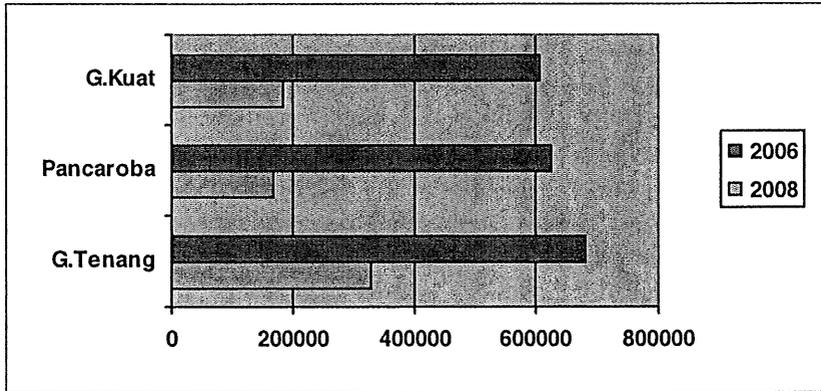


Gambar 4.1
Kerajinan Tenun Kain Tradisional di Desa Kojadoi

4.1.3. Pendapatan rumah tangga kenelayanan menurut musim di Desa Kojadoi

Di Kojadoi jumlah rumah tangga yang salah satu anggotanya memiliki usaha kenelayanan hanya sekitar 35 rumah tangga. Dibandingkan dengan tahun 2006 jumlah rumah tangga nelayan hampir tidak mengalami perubahan, yakni hanya sekitar 34 – 35 rumah tangga. Rata-rata pendapatan rumah tangga dari tahun 2006 sampai tahun 2008 tidak mengalami peningkatan, bahkan boleh dikatakan mengalami penurunan. Penurunan pendapatan tersebut terjadi baik pada musim gelombang tenang, musim pancaroba maupun musim gelombang kuat. Penurunan pendapatan bahkan telah mencapai lebih dari 50 persen. Alasan penurunan diakibatkan oleh tiga sebab, yakni ; *Pertama*, makin menurunnya kinerja nelayan tangkap untuk melaut tak menginginkan hasil tangkapan yang banyak. Mereka kembali sebagai nelayan *subsistence* yang hasil tangkapannya hanya untuk konsumsi sendiri tidak ada lagi yang dijual. Untuk mendapatkan uang tunai sudah menggantungkan dari hasil produksi budi daya rumput laut yang telah mereka rasakan selama ini, sehingga penangkapan ikan di laut hanya sebagai sumber pendapatan tambahan. Sebab yang *kedua* adalah potensi sumber daya laut di perairan sekitar Kojadoi telah mengalami penurunan, sehingga hasil tangkapannya sudah menurun. Sebagai akibat penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang tidak/ kurang ramah lingkungan pada tahun-tahun yang lalu dan penangkapan ikan yang berlebihan kurang memperhatikan pelestariannya. *Ketiga*, makin meningkatnya harga BBM menyebabkan nelayan makin mengurangi frekuensi kegiatan menangkap ikan setiap bulannya. Sebagai akibatnya rata-rata pendapatan dari perikanan tangkap makin menurun.

Diagram 4.1. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Kegiatan Kenelayanan, di Desa Kojadoi Kab. Sikka, 2006 - 2008



Tabel 4.4a. Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Tahun 2006 – 2008 Menurut Musim, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka

Pendapatan	Musim	Rata-rata Pendapatan/ Bulan		
		Tahun 2006 (dalam Rp)	Tahun 2008 (dalam Rp)	Tingkat Penurunan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rata-rata	Gelomb tenang	682.625	328.500	51,8
	Pancaroba	625.492	166.875	73,3
	Gelomb. kuat	606.125	184.074	69,6
Median	Gelomb. tenang	698.333	200.000	71,4
	Pancaroba	664.125	75.000	88,7
	Gelomb. kuat	609.125	30.000	95,1
Minimum	Gelomb. tenang	100.000	10.000	90,0
	Pancaroba	130.000	10.000	92,3
	Gelomb. kuat	100.000	10.000	90,0
Maksimum	Gelomb. tenang	1.446.666	1.500.000	Naik 3,7
	Pancaroba	1.376.666	1.000.000	27,4
	Gelomb. kuat	1.376.000	1.000.000	27,4
Jumlah RT nelayan (N)	Gelomb. tenang	34	35	
	Pancaroba	34	32	
	Gelomb. kuat	34	27	

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP Fase II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

Penurunan pendapatan rumah tangga nelayan tersebut apabila dilihat dari kelompok pendapatan (Tabel 4.5a) makin memperlihatkan gambaran yang semakin jelas. Tabel 4.5a. tersebut menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang berpendapatan rendah (di bawah Rp 500.000,00) ternyata meningkat tajam. Dari hanya sekitar 32 persen - 38 persen menjadi sekitar 82 persen - 87 persen. Kelompok pendapatan di bawah Rp 500.000,00 tersebut pada pada musim ombak tenang tahun 2006 sebesar 32,4 persen, namun pada tahun 2008 meningkat drastis menjadi 82,9 persen. Pada musim pancaroba, pada tahun 2006 sebesar 38,2 persen meningkat menjadi 87,5 persen pada tahun 2008. Demikian juga pada musim ombak kuat, pada tahun 2006 sebesar 35,3 persen meningkat menjadi 85,2 persen pada tahun 2008. Sebaliknya pada kelompok pendapatan di atasnya, hampir di semua kelompok mengalami penurunan persentase. Kondisi ini menyebabkan jumlah rumah tangga yang berpendapatan rendah makin meningkat dan jumlah rumah tangga yang berpendapatan tinggi makin menurun cukup signifikan.

Tabel 4.5a. Distribusi Persentase Rumah Tangga Nelayan Menurut Kelompok Pendapatan dan Musim, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, 2006 dan 2008.

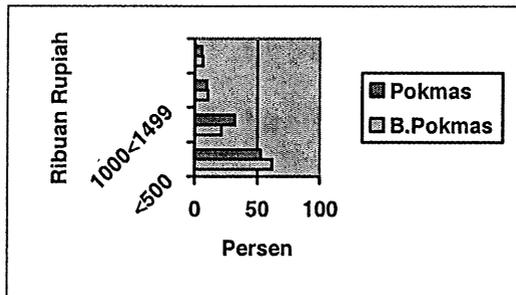
Pendapatan/ bulan (000 Rp)	Musim					
	Ombak Tenang		Pancaroba		Ombak Kuat	
	Th. 2006	Th. 2008	Th. 2006	Th. 2008	Th. 2006	Th. 2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 500	32,4	82,9	38,2	87,5	35,3	85,2
500 - 999	47,1	8,6	50,0	9,4	50,0	11,1
1.000 - 1.499	20,6	2,9	11,8	3,1	14,7	3,7
1.500 - 1.999	-	5,7	-	-	-	-
2.000 +	-	-	-	-	-	-
Jumlah (N)	100,0 (34)	100,0 (35)	100,0 (34)	100,0 (32)	100,0 (34)	100,0 (27)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP Fase II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

4.1.4. Pendapatan Anggota Pokmas (Kelompok Masyarakat) di Desa Kojadoi.

Anggota Pokmas yang diambil dalam sampel di Desa Kojadoi ini meliputi semua jenis Pokmas, yaitu Pokmas UEP, Pokmaswas, dan Pokmas Perempuan. Secara umum ada perbedaan rata-rata pendapatan pada rumah tangga yang anggotanya pernah/ sedang menjadi anggota Pokmas dan rumah tangga yang anggotanya tidak pernah menjadi anggota Pokmas. Rata-rata pendapatan rumah tangga yang ada anggotanya menjadi anggota Pokmas adalah Rp 653.066,76/bulan, sementara yang bukan anggota Pokmas adalah Rp 591.744,46/bulan atau ada perbedaan sekitar 10 persen. Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan karena bagi anggota Pokmas mendapatkan bantuan/ pinjaman modal dan bimbingan/pelatihan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif. Untuk rumah tangga nelayan di Desa Kojadoi dana pinjaman tersebut telah digunakan untuk menambah modal budi daya rumput laut dan telah dirasakan manfaatnya bagi sebagian warga. Meskipun pada tahun terakhir sedang mengalami penurunan produksi dan penurunan pendapatan dari usaha budi daya rumput laut. Sebagaimana telah diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya, karena faktor musim yang kurang bersahabat bagi pertumbuhan rumput laut dan adanya hama bagi tanaman rumput laut.

Diagram 4.2. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas dan Bukan Anggota Pokmas di Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), 2008



Dibedakan menurut kelompok pendapatan, persentase jumlah rumah tangga yang ada anggota Pokmasnya pada kelompok pendapatan terbawah (< Rp 500.000) jauh lebih rendah dari pada jumlah rumah tangga yang tak ada anggota Pokmasnya (52,8 persen dan 61,7 persen). Sebaliknya persentase jumlah rumah tangga yang ada anggota Pokmasnya pada pendapatan menengah ke atas (Rp 500.000 ke atas) lebih tinggi dibandingkan pada jumlah rumah tangga yang tidak ada anggota Pokmasnya (47,2 persen dan 38,3 persen). Nampaknya peningkatan pendapatan tersebut banyak terjadi pada kelompok pendapatan menengah (Rp 500.000 – Rp 999.000). Jadi nampaknya ada sedikit pengaruh program COREMAP terhadap pendapatan warga yang terlibat dalam Pokmas. Dalam hal ini peran COREMAP dalam membantu usaha ekonomi produktif terutama usaha rumput laut cukup dirasakan. Hal ini terutama dirasakan sebelum munculnya hama rumput laut (sebelum tahun 2007).

Tabel 4.6a. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Ada Tidaknya ART Anggota Pokmas, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, 2008

Kelompok Pendapatan/ bulan (000 Rp)	Ada anggota Pokmas	Tak ada anggota Pokmas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
< 500	52,8	61,7	57,0
500 – 999	32,1	21,3	27,0
1.000 – 1.499	9,4	10,6	10,0
1.500 +	5,7	6,4	6,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(n)	(53)	(47)	(100)
Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga	653.066,76	591.744,46	624.245,28

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP Fase II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

4.2. PENDAPATAN PENDUDUK KAWASAN DARATAN (DESA NAMANGKEWA)

4.2.1. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita di Desa Namangkewa

Pendapatan perkapita penduduk Desa Namangkewa berbeda dengan di Desa Kojadoi, pada tahun 2006 adalah Rp 246.316,-/ bulan dan ternyata menurun menjadi Rp 172.331,-/bulan pada tahun 2008 atau menurun -19,5 persen. Meskipun besarnya pendapatan per kapita tersebut dibandingkan dengan besarnya garis kemiskinan Kabupaten Sikka yang tahun 2006 sebesar Rp 144.485,-/bulan, rata-rata pendapatan perkapita di Desa Namangkewa tersebut masih berada di atas garis kemiskinan. Namun kondisi rata-rata pendapatan perkapita yang kurang menggembirakan tersebut nampaknya juga terjadi pada rata-rata pendapatan rumah tangga. Rata-rata pendapatan rumah tangga dari tahun 2006 sampai tahun 2008 ternyata mengalami penurunan (Tabel 4.1b). Rata-rata pendapatan rumah tangga menurun 14,5 persen/ tahun. Penurunan rata-rata pendapatan rumah tangga tersebut juga tercermin pada penurunan pendapatan minimum rumah tangga maupun pendapatan maksimum rumah tangga. Penurunan pendapatan tersebut nampaknya sangat dirasakan oleh rumah tangga yang berpendapatan menengah ke bawah.

Tabel 4.1b. Statistik Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga dan Per Kapita, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka, 2006 dan 2008.

Pendapatan	Jumlah		
	Tahun 2006 (dalam Rp)	Tahun 2008 (dalam Rp)	Tingkat Pertambahan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
Per kapita	246.316,48	172.331,90	- 19,5
Rata-rata rumah tangga.	1.115.437,70	850.324,90	- 14,5
Median	500.000,00	533.333,30	+ 3,28
Minimum rumah tangga	20.000,00	3.333,33	- 144,9
Maksimum rumah tangga	7.370.000,00	4.985.250,00	- 21,6

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP Fase II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

Tabel 4.2b. Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Kelompok/ Kategori Pendapatan, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka, 2006 dan 2008.

Kelompok/kategori pendapatan/ bulan (dalam rupiah)	Frekuensi (Persen)		
	Tahun 2006	Tahun 2008	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
< 500.000	50,0	45,5	- 4,5
500.000 – 999.000	31,3	26,3	- 5,0
1.000.000 – 1.499.000	7,1	10,1	+ 3,0
1.500.000 – 1.999.000	4,0	7,1	+ 3,1
2.000.000 – 2.499.000	3,0	5,1	+ 2,1
2.500.000 – 2.999.000	1,0	2,0	+ 1,0
3.000.000 – 3.499.000	1,0	1,0	0,0
3.500.000 +	2,0	3,0	+ 1,0
Jumlah	100,0	100,0	
Pendapatan rata-rata (Rp)	1.115.437	850.324	- 265.112 (- 23,7 %)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP Fase II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

4.2.2. Pendapatan/bulan menurut lapangan pekerjaan di Desa Namangkewa

Pendapatan penduduk dibedakan menurut lapangan pekerjaan memberikan gambaran yang makin jelas, bahwa lapangan pekerjaan atau sektor yang menurunkan pendapatan di sampel kawasan daratan (Desa Namangkewa) adalah perikanan budi daya. Mereka adalah lapangan usaha budi daya utamanya rumput laut, seperti yang terjadi di kawasan pulau-pulau kecil. Nampaknya pengaruh kondisi iklim dalam satu tahun terakhir yang tidak kondusif terhadap tanaman rumput laut, telah berpengaruh terhadap tanaman rumput laut di kawasan Teluk Maumere. Hasil dari wawancara dengan beberapa informan juga menyebutkan bahwa hasil panen setahun terakhir kurang baik yang disebabkan oleh banyak hama, sehingga jumlah produksi terus menurun. Para nelayan belum mengetahui nama hama tersebut dan belum mengetahui cara membasminya, hanya biasanya apabila mengetahui terkena hama cepat-cepat dipanen sebelum rusak

semua, meskipun umur tanaman belum cukup. Ciri-ciri tanaman rumput laut yang terkena hama adalah batangnya ada warna putih-putihnya dan kemudian batang tersebut busuk.

Penurunan pendapatan tersebut ternyata tidak terjadi pada lapangan pekerjaan yang lain. Pendapatan pada perikanan tangkap ternyata mengalami kenaikan, meskipun kenaikannya tidak begitu besar, yaitu dari Rp 497.709,60 tahun 2006 menjadi Rp 554.651,16 tahun 2008 atau hanya 5,6 persen per tahun. Pendapatan pada pertanian (tanaman pangan dan tanaman keras/perdagangan) meningkat dari Rp 85.168,65 menjadi Rp 166.407,65 atau 39,8 persen per tahun. Kenaikan yang cukup menonjol adalah perdagangan, yakni telah meningkat dari Rp 353.546,30 menjadi Rp 743.636,36 atau mengalami kenaikan 45 persen per tahun. Bagi perdagangan kondisi iklim bagaimanapun nampaknya tetap dapat memanfaatkan peluang, baik pedangang ikan, pedangang rumput laut maupun pedangang kebutuhan rumah tangga/ kios sembako. Pendapatan di lapangan jasa memang juga ikut naik, meskipun tidak begitu tinggi kenaikannya. Mereka termasuk para guru, para pegawai negeri dan swasta dan tenaga jasa umum lainnya. Mereka mengalami kenaikan dari Rp 647.785,71 menjadi Rp 775.000,- atau naik 9,4 persen per tahun. Pendapatan pada lapangan industri pengolahan juga naik cukup lumayan, yaitu dari Rp 181.892,86 menjadi Rp 231.216,67 atau naik 12,7 persen per tahun. Industri pengolahan ini untuk Desa Namangkewa adalah para usaha pengrajin tenun tradisional dan kerajinan pembuatan minyak goreng kelapa.

Tabel 4.3b. Distribusi Rata-rata Pendapatan Menurut Lapangan Pekerjaan, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka, 2006 dan 2008

Lapangan Pekerjaan	Rata-rata Pendapatan/ Bulan		
	Tahun 2006 (dalam Rp)	Tahun 2008 (dalam Rp)	Tingkat Peningkatan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perikanan tangkap	497.709,60	554.651,16	+ 5,6
Perikanan budi daya	625.000,00	169.763,89	- 91,8
Pertanian (tanaman pangan/keras)	85.168,65	166.407,65	+ 39,8
Perdagangan	353.546,30	743.636,36	+ 45,0
Jasa (guru, peg. dll)	647.785,71	775.000,00	+ 9,4
Industri pengolahan	181.892,86	231.216,67	+ 12,7
Lainnya	501.875,00	680.000,00	+ 16,4

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP Fase II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

4.2.3. Pendapatan rumah tangga kenelayanan menurut musim di Desa Namangkewa

Sebagaimana telah diungkapkan pada pendapatan pada perikanan tangkap atau kegiatan dalam kenelayanan (tidak termasuk usaha budi daya rumput laut) masih mengalami peningkatan meskipun kenaikannya hanya kecil hanya 5,6 persen per tahun. Namun apabila dibedakan menurut musim memperlihatkan gambaran yang kurang menggembirakan. Ternyata kenaikan pendapatan pada kegiatan kenelayanan tangkap ini hanya terjadi pada musim-musim gelombang kuat. Sementara pada musim gelombang tenang dan musim pancaroba dari tahun 2006 ke tahun 2008 mengalami penurunan. Pada musim gelombang tenang rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan perikanan tangkap ini menurun dari Rp 1.311.690,50 menjadi Rp 1.046.279,07 atau menurun 11,9 persen per tahun. Sedangkan pada musim pancaroba penurunannya lebih besar lagi, yaitu dari Rp 757.407,41 menjadi Rp 372.500,00 atau menurun 42,6 persen per tahun. Namun pada musim gelombang kuat ternyata justru ada peningkatan rata-rata pendapatan, yaitu dari Rp 247.619,05 menjadi Rp 516.875,00 atau mengalami peningkatan 44,5 persen per

tahun. Mengapa pada musim gelombang kuat justru ada peningkatan pendapatan rumah tangga? Hal ini dapat dipastikan bahwa mereka adalah rumah tangga nelayan yang bermodal besar dengan armada mesin yang lebih besar, sehingga mampu menangkap ikan di laut yang lebih dalam. Di mana di laut yang lebih dalam hanya nelayan yang dengan perahu dan mesin yang lebih besar, alat tangkap lebih modern serta modal lebih besar juga. Sebab yang lain pada musim gelombang kuat sedikit nelayan yang melaut, jumlah ikan terbatas sehingga harga ikan naik atau lebih mahal dibanding musim gelombang tenang dan musim pancaroba yang pada umumnya ikan di pasaran melimpah. Karena semua nelayan melaut untuk menangkap ikan. Kenaikan harga ikan tersebut hanya dinikmati oleh nelayan kaya atau nelayan yang bermodal. Apalagi dengan adanya kenaikan harga BBM akhir-akhir tidak semua nelayan mampu untuk melaut setiap saat.

Tabel 4.4b. Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Tahun 2006 – 2008 Menurut Musim, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka

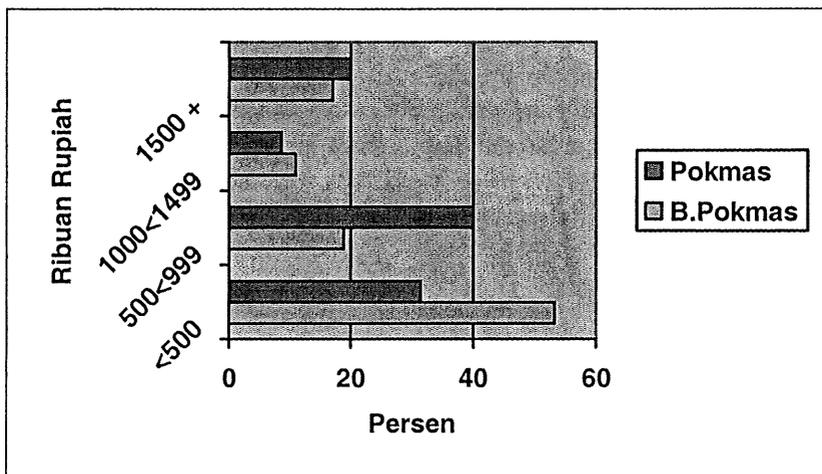
Pendapatan	Musim	Rata-rata Pendapatan/ Bulan		
		Tahun 2006 (dalam Rp)	Tahun 2008 (dalam Rp)	Tingkat Pertambahan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rata-rata	Gelombang tenang	1.311.690	1.046.279	- 11,9
	Pancaroba	757.407	372.500	- 42,6
	Gelombang kuat	247.619	516.875	+ 44,5
Median	Gelombang tenang	490.000	560.000	+ 6,9
	Pancaroba	212.500	210.000	- 0,6
	Gelombang kuat	30.000	95.000	+ 77,9
Minimum	Gelombang tenang	16.000	10.000	- 26,5
	Pancaroba	10.000	30.000	+ 73,2
	Gelombang kuat	10.000	10.000	0,0
Maksimum	Gelombang tenang	15.000.000	12.000.000	+ 11,8
	Pancaroba	13.600.000	2.300.000	
	Gelombang kuat	3.000.000	6.000.000	+ 41,4
Jumlah RT nelayan (N)	Gelombang tenang	65	43	
	Pancaroba	65	38	
	Gelombang kuat	65	24	

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP Fase II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

4.2.4. Pendapatan anggota Pokmas (Kelompok Masyarakat) di Desa Namangkewa

Di Desa Namangkewa juga ada perbedaan rata-rata pendapatan pada rumah tangga yang anggotanya pernah dan sedang menjadi anggota Pokmas dengan rumah tangga yang anggotanya tidak pernah menjadi anggota Pokmas. Rata-rata pendapatan pada rumah tangga yang anggotanya menjadi anggota Pokmas lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang tak ada anggotanya menjadi anggota Pokmas. Rata-rata pendapatan rumah tangga yang ada anggotanya menjadi anggota Pokmas adalah Rp 966.014,28/ bulan, sedangkan yang tidak ada anggota Pokmasnya adalah Rp 787.057,29/bulan atau ada perbedaan sekitar 22,7 persen. Alasan perbedaan tersebut kemungkinan sama dengan yang terjadi di Desa Kojadoi, yakni disebabkan karena bagi anggota Pokmas mendapatkan bantuan/ pinjaman modal untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif. Untuk rumah tangga nelayan dana pinjaman tersebut dapat digunakan untuk menambah modal usaha sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan anggota Pokmas dan telah dirasakan sebagian warga pemanfaatannya. Meskipun pada tahun terakhir sedang mengalami penurunan produksi dan penurunan pendapatan dari usaha budi daya rumput laut. Sebagaimana telah diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya, karena faktor musim yang kurang bersahabat bagi pertumbuhan rumput laut dan adanya hama bagi tanaman rumput laut. Bagi sampel rumah tangga di Namangkewa, memang sebagian dari rumah tangga memiliki usaha budi daya rumput laut, namun rumah tangga tersebut juga memiliki usaha-usaha lain yang tidak begitu terpengaruh oleh musim. Usaha tersebut antara lain perdagangan, usaha jasa dan industri kecil dan kerajinan (pembuatan minyak kelapa, usaha tenun tradisional). Usaha lain yang masih dilakukan adalah usaha tangkap ikan dengan armada perahu dengan mesin yang lebih besar, sehingga mampu melaut dalam ombak yang agak besar dan mampu menangkap ikan di laut dalam.

Diagram 4.3. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas dan Bukan Anggota Pokmas di Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), 2008



Apabila diperinci menurut kelompok pendapatan, persentase jumlah rumah tangga yang ada anggota Pokmasnya pada kelompok pendapatan terbawah (< Rp 500.000) jauh lebih rendah dari pada jumlah rumah tangga yang tak ada anggota Pokmasnya (31,4 persen dan 53,2 persen). Sebaliknya persentase jumlah rumah tangga yang ada anggota Pokmasnya pada pendapatan menengah ke atas (Rp 500.000 ke atas) lebih tinggi dibandingkan pada jumlah rumah tangga yang tidak ada anggota Pokmasnya (68,6 persen dan 46,8 persen). Sebagaimana yang terjadi di Desa Kojadoi, nampaknya peningkatan pendapatan tersebut banyak terjadi pada kelompok pendapatan menengah (Rp 500.000 – Rp 999.000) terutama pada rumah tangga yang anggotanya pernah menjadi anggota Pokmas.

Tabel 4.5b. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Ada Tidaknya ART Anggota Pokmas, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka, 2008 (Persen)

Kelompok Pendapatan/ Bulan (dalam Rp)	Ada anggota Pokmas	Tak ada anggota Pokmas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
< 500.000	31,4	53,2	45,5
500.000 – 999.000	40,0	18,8	26,3
1.000.000 – 1.499.000	8,6	10,9	10,1
1.500.000 +	20,0	17,1	18,1
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(35)	(64)	(100)
Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga (dalam Rp)	966.014,28	787.057,29	850.324,91

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP Fase II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

4.3. FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN

4.3.1. Program COREMAP

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya bahwa COREMAP masuk ke Sikka tahun 1999/2000 yang dikenal dengan COREMAP Fase I bantuan dari *AusAID*. Pada waktu itu sasaran program hanya 6 desa termasuk Desa Kojadoi dan Namangkewa.. Pada program COREMAP Fase II telah dikembangkan menjadi 34 desa. Dengan pengembangan wilayah tersebut akan berdampak terhadap peningkatan dana dan tenaga yang akan mengelola program tersebut. Salah satu kegiatan COREMAP yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat mengurangi tekanan masyarakat pesisir terhadap pemanfaatan sumber daya laut utamanya di kawasan terumbu karang adalah program usaha ekonomi produktif atau disingkat program UEP.

Dalam pelaksanaannya di berbagai daerah program usaha ekonomi produktif melalui pemberian dana bergulir. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih menghadapi berbagai hambatan. Di mana kondisi di masing-masing lokasi berbeda-beda, tergantung kondisi geografis, motivasi para pengelola dan ketepatan penentuan lokasi dan sasaran masyarakat yang tepat. Jenis kegiatan UEP yang dikembangkan di masing-masing lokasi juga berbeda-beda sesuai dengan potensi wilayah.

Kawasan pulau-pulau kecil (Desa Kojadoi)

Tahun 2002 pada program COREMAP Fase I telah menerima dana bergulir sebanyak Rp 80 juta. Dana tersebut dikelola lewat koperasi, yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Koja Jaya. Dana tersebut dipinjamkan kepada seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan untuk usaha budi daya rumput laut, ternak ayam, ternak kambing dan kios. Dana tersebut masih terus bergulir sampai sekarang dan merupakan salah satu modal usaha koperasi.

Pada program COREMAP Fase II (2004 – 2009) tahun 2007 telah dibentuk LPSTK dan Pokmas-Pokmasnya termasuk Pokmas UEP yang baru. Kemudian RPTK sudah tersusun dan sudah disosialisasikan ke masyarakat. Namun menurut para pengurusnya belum ada dana bantuan COREMAP yang baru untuk menambah permodalan usaha ekonomi masyarakat. Dana yang telah terkumpul melalui Koperasi Koja Jaya kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selama ini para pengurus mengharapkan segera ada kucuran dana dari COREMAP Fase II. Selama ini kegiatannya baru sekedar sosialisasi program-program COREMAP Fase II ke masyarakat melalui pertemuan-pertemuan warga.

Kawasan daratan (Desa Namangkewa)

Sebagaimana di Desa Kojadoi, di Desa Namangkewa dalam program COREMAP Fase I tahun 2002 juga mendapatkan kucuran dana bergulir. Walaupun pernah dibentuk KSU untuk mengelola dana bergulir, namun nampaknya tidak berjalan dengan baik. Koperasi yang dalam COREMAP Fase I telah dibentuk, ternyata telah berhenti

kegiatannya. Dana yang telah dipinjamkan ke masyarakat tidak bergulir atau macet. Sebagaimana telah diungkap dalam bab-bab sebelumnya bahwa pemilihan desa ini sebagai sasaran COREMAP kurang tepat. Sebab pendekatan COREMAP selama ini masih menggunakan pendekatan batas administrasi, bukan pendekatan kawasan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan pada pemanfaatan sumber daya laut. Dalam hal ini penunjukan sasaran COREMAP untuk Desa Namangkewa kurang cocok mengingat jumlah masyarakat/ rumah tangga nelayan di desa ini sangat kecil, hanya sekitar 20 persen dan bahkan pada program COREMAP Fase II ini hanya sekitar 10 persen rumah tangga nelayan (karena pemekaran wilayah desa). Sehingga pada waktu COREMAP Fase I yang lalu sebagian besar dana yang turun dipinjamkan kepada rumah tangga yang bukan nelayan. Sebagian peminjam menganggap dana tersebut sebagai dana hibah, oleh karena itu dana tidak dapat bergulir lagi. Apalagi koperasi yang dibentuk tidak berjalan, maka dana yang diharapkan bergulir ternyata macet.

Dalam COREMAP Fase II di desa ini telah dibentuk LPSTK dengan Pokmas-Pokmasnya pada tahun 2007. Namun belum ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pokmas-Pokmasnya, masih menunggu dana turun untuk operasional kegiatan dan menambah penguatan modal usaha. Tahap yang dilakukan masih sebatas sosialisasi program, itupun masih terbatas pada pengurus-pengurusnya. Jadi program COREMAP di Desa Namangkewa selama ini dapat dikatakan belum berhasil.

4.3.2. Program pemerintah dan lembaga lain

Di Desa Kojadoi sebagaimana telah diungkapkan di muka ada beberapa program di luar COREMAP yang telah masuk, namun tidak semuanya ada pengaruh langsung terhadap pendapatan penduduk.

Program-program tersebut adalah :

1. Penguatan modal koperasi – berasal dari Dinas Koperasi sebanyak Rp 10 juta, berupa pinjaman yang harus lunas selama 2

tahun. Sekarang dana pinjaman tersebut telah lunas. Pengaruh program ini terhadap pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga masih sangat kecil, sebab dana yang dipinjamkan sangat kecil dibandingkan jumlah rumah tangga yang membutuhkan.

2. Program bantuan pembuatan gorong-gorong dari Pemerintah Daerah sebanyak Rp 2,5 juta, untuk membuat gorong-gorong sebanyak 10 buah. Biaya per gorong-gorong memakan biaya Rp 250.000,-. Pengaruh langsung pembuatan gorong-gorong terhadap pendapatan dan kesejahteraan juga kecil, namun dapat memperlancar arus lalu lintas darat antar dusun. Lalu lintas melalui jalan laut sebetulnya tidak ada masalah di Desa Kojadoi.
3. Program Pengembangan Produksi (UPP – Unit Pengembangan Produksi) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka – dalam program ini tiap anggota Pokmas mendapat pinjaman Rp 4 juta untuk penguatan modal budi daya rumput laut. Satu kelompok yang beranggotakan 30 orang. Dalam satu kelompok dapat pinjaman sebanyak Rp 360 juta. Namun dana tersebut dikelola langsung oleh Unit Pengembangan DKP Kabupaten Sikka. Pinjaman dana ini sebetulnya memiliki dampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga budi daya rumput laut. Namun sayang pada 12 bulan terakhir tanaman rumput laut sedang terkena hama, akibatnya jumlah produksi rumput laut menurun dan pendapatan rumah tanggapun juga menurun.
4. Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dana dikucurkan tahun 2005, dana yang dikeluarkan untuk penguatan :
 - o Pengembangan fisik, di Kojadoi digunakan untuk
 - o membangun dermaga di Kojagete. Secara langsung memperlancar lalu lintas barang dan penumpang. Lalu lintas yang lancar akan ikut meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan.
 - o Penguatan modal kios yang ada
 - o Penguatan pengembangan budi daya rumput laut
 - o Pertanian.
5. Program Subsidi BBM, namun digunakan untuk pembuatan turap (jalan floor setapak, sebagai penghubung antar dusun).

Di Desa Namangkewa, selain COREMAP Fase I dan COREMAP Fase II ada beberapa program masuk dari instansi/ lembaga lain. Pertama, keberadaan CU (*Credit Union*) yang ada di Desa Namangkewa cukup membantu pinjaman uang untuk permodalan usaha-usaha ekonomi rumah tangga, hanya di sini diberikan kepada seluruh rumah tangga yang membutuhkan. Kedua, ada program dari PLAN yang memberikan permodalan untuk usaha bagan berjalan. Program ini telah berjalan 3 tahun dan telah dirasakan oleh sebagian nelayan bagan berjalan.

4.3.3. Faktor-faktor lain yang berpengaruh

Faktor internal :

- *Sumber pendapatan*

Sumber pendapatan utama penduduk Desa Kojadoi sebagian besar masih berasal dari sumber daya laut, yakni dari usaha budi daya rumput laut. Sumber pendapatan lainnya adalah usaha pertanian, kegiatan tangkap ikan dan perdagangan. Usaha pertanian dilakukan di lahan kering (tegalan) yang berada di perbukitan Pulau Besar (Pulau Kojagete). Jenis tanaman yang ditanam adalah jagung, ubi kayu dan sayur-sayuran. Umumnya hasil dari usaha pertanian tersebut masih terbatas untuk konsumsi sendiri dan belum ada yang dijual ke tetangga. Oleh karena itu, kebutuhan sayur-sayuran bagi banyak warga yang masih harus mendatangkan atau berbelanja ke Pasar Geliting di Kewapante atau di Maumere. Kegiatan tangkap ikan hanya dilakukan beberapa nelayan yang harus dijual. Sebagian besar yang lain hanya secara kecil-kecilan dan hasil tangkapan umumnya hanya untuk konsumsi sendiri. Namun demikian kegiatan tersebut menurut konsep pendapatan juga merupakan sumber pendapatan rumah tangga, hanya langsung dikonsumsi sendiri tidak ada yang dipasarkan. Sumber pendapatan dari perdagangan dilakukan oleh beberapa rumah tangga saja. Seperti pengumpul rumput laut ada 6 rumah tangga dan usaha kios ada sekitar 5 rumah tangga. Usaha kios umumnya menjual bahan-bahan kebutuhan rumah tangga, seperti

beras, minyak goreng, gula, mie, sabun mandi/ cuci, rokok, minyak tanah dsb.

Di Desa Namangkewa sumber pendapatan utama sebagian besar adalah usaha pertanian, yaitu usaha tanaman jagung, ubi, kelapa, pisang dan sayuran. Kegiatan di laut meliputi usaha tangkap ikan dan sebagian yang lain usaha budi daya rumput laut. Di daerah penelitian ini sebetulnya rumah tangga yang menggantungkan pada kegiatan di laut cukup kecil. Berbeda dengan di Kojadoi, di sini masih banyak yang melakukan usaha penangkapan ikan di laut dalam dan usaha bagan apung dan bagan berjalan (bantuan dari PLAN). Sumber pendapatan lain adalah pembuatan minyak kelapa dan menenun kain tradisional (tenun ikat). Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kaum wanita dan hasilnya dijual ke pasar.

▪ *Teknologi alat tangkap/produksi & wilayah tangkap*

Untuk Desa Kojadoi alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan hanya alat-alat yang sederhana. Sebab bagi nelayan Kojadoi tidak mengharapkan ikan-ikan yang besar dan berharga mahal untuk dijual. Ikan hanya untuk konsumsi sendiri. Alat tangkap yang digunakan umumnya hanya pancing dan armada yang digunakan kebanyakan hanya sampan dan beberapa motor tempel. Wilayah tangkap biasanya hanya di sekitar pulau dan di laut dangkal. Untuk usaha budi daya rumput laut, bahan utama bibit rumput laut, tali (tambang) plastik, tali rapia, pelampung (dari gabus, botol plastik), pemberat, alat angkut yang digunakan sampan/ motor tempel. Usaha rumput laut dilakukan di perairan laut dangkal sekitar pulau Kojadoi.

Di Namangkewa alat tangkap yang banyak digunakan adalah pukot dan jala, sebagian yang lain pancing. Banyak nelayan di desa ini menggunakan bagan jalan. Armada yang digunakan perahu/ sampan, motor tempel dan kapal motor. Wilayah tangkap masih terbatas dilakukan di Teluk Maumere.

Untuk sebagian besar nelayan budi daya rumput laut baik di Desa Kojadoi maupun Desa Namangkewa belum menggunakan

armada yang modern (sampan atau motor tempel kecil). Alat yang digunakan untuk menyiapkan penanaman, pemeliharaan dan pemanenan juga masih cukup sederhana.

▪ *Biaya produksi*

Bagi para nelayan tangkap yang menggunakan kapal motor baik di Desa Kojadoi maupun di Namangkewa dengan adanya kebijakan kenaikan BBM sangat terpuuk. Kebijakan kenaikan harga BBM tahun 2004 yang lalu sudah sangat dirasakan oleh para nelayan tangkap. Kemudian disusul dengan kenaikan harga BBM bulan April 2008 makin membuat sengsara para nelayan. Harga minyak solar di Kojadoi sebelum ada kenaikan bulan April 2008 seharga Rp 5.500,00/ liter, saat ini telah mencapai Rp 6.500,00/ liter. Bagi para nelayan untuk membeli BBM merupakan pengeluaran yang paling penting dan paling besar untuk bisa melaut. Dengan kenaikan harga BBM tersebut telah berpengaruh terhadap frekuensi melaut dan lama melaut. Mereka mengurangi frekuensi dan lama melaut. Akibatnya sangat berpengaruh terhadap jumlah hasil tangkapan dan jumlah pendapatan para nelayan.

▪ *Kualitas SDM*

Tingkat pendidikan masyarakat nelayan baik di Desa Kojadoi maupun Namangkewa umumnya masih rendah. Rendahnya pendidikan menyulitkan masyarakat untuk melakukan diversifikasi usaha dan penggunaan teknologi baru. Hal ini menghambat untuk meningkatkan pendapatan. Masalah etos kerja yang rendah, terlihat dari kegiatan penangkapan ikan yang cenderung subsisten, terutama di Kojadoi dan sebagian di Namangkewa. Mereka cenderung tidak ada kemauan untuk menangkap ikan lebih banyak. Mereka sudah cukup puas apabila sudah mendapatkan ikan untuk sekedar dijual di pasar desa terdekat (Desa Geliting) atau dijual di pinggir jalan raya.

Faktor eksternal :

○ *Pemasaran (harga dan pemasaran) dan permintaan pasar*

Di Kojadoi produk utamanya adalah rumput laut, pemasaran pada umumnya hanya di lokasi sendiri. Mereka menjual ke pengumpul lokal dan ke koperasi (KSU – Koperasi Serba Usaha) di desa sendiri. Harga rumput laut ditentukan oleh pembeli/ pengumpul berdasarkan harga di tingkat pengumpul di Kota Maumere/ Surabaya. Harga rumput laut memang terus naik, harga dua tahun yang lalu hanya sekitar Rp 4 000,-/kg, saat ini telah mencapai Rp 8 000,-/kg. Pemasaran selama ini masih mudah atau prospektif. Namun jumlah produksi panen budi daya rumput laut akhir-akhir ini (12 bulan terakhir) dari Desa Kojadoi menurun, sehingga pasokan juga menurun, akhirnya harga terus naik. Permintaan pasar rumput laut terus meningkat, namun tak dapat terpenuhi.

Di Namangkewa produk yang utama untuk perikanan adalah ikan, baik ikan karang maupun ikan laut dalam. Pemasaran ikan dijual dalam bentuk ikan segar dan ikan kering, umumnya cukup dijual ke pasar desa di desa sebelah, yaitu Pasar Geliting. Ikan segar sebagian dijual langsung di pinggir jalan melalui *papalele* (istilah lokal yang artinya pedagang pengecer). Permintaan pasar terhadap ikan laut masih cukup besar selama ini. Kondisi pemasaran hasil budi daya rumput laut di Namangkewa hampir sama dengan di Desa Kojadoi, yaitu dijual ke pengumpul lokal saja, sebab koperasi yang dibentuk pada masa COREMAP Fase I sudah tidak berjalan lagi. Harga produksi rumput laut juga tidak berbeda dengan di Kojadoi.

○ *Musim iklim*

Dalam satu tahun terakhir musim/ iklim sedang tidak bersahabat terhadap usaha budi daya rumput laut. Banyak hama dan pertumbuhan rumput laut kurang bagus, sehingga produksinya terus menurun. Hal ini terjadi baik di Desa Kojadoi maupun di Namangkewa (termasuk Waiara). Bagi nelayan tangkap jumlah produksi dan jenis ikan sangat tergantung kondisi musim. Pada ombak kuat biasanya produksi menurun, sebab jumlah kegiatan

melaut menurun. Kegiatan melaut paling banyak pada musim ombak tenang, sehingga produksi/hasil tangkapan paling banyak pada bulan gelombang tenang.



Gambar 4.2
Hasil panen rumput laut yang terkena hama,
batang memutih terus membusuk, di Namangkewa

o *Degradasi sumber daya pesisir & laut*

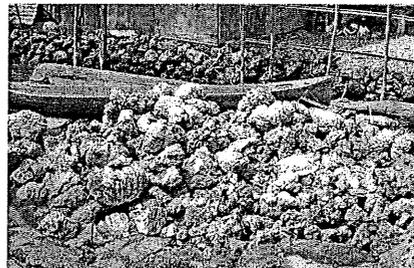
Sumber daya laut dan pesisir di daerah kajian untuk Desa Kojadoi dan sekitar berupa terumbu karang, tanaman bakau dan biota laut. Hutan bakau belum ada penanaman kembali, sementara penebangan pohon untuk bahan bakar rumah tangga terus berlangsung. Pelestarian hutan bakau di wilayah ini telah terancam. Hutan bakau yang masih ada terletak di Dusun Kojagete dan Dusun Markajong, sedangkan di Dusun Kojadoi sudah habis. Padahal menurut sejarahnya area Dusun Kojadoi dahulu merupakan area hutan bakau, karena kebutuhan untuk permukiman yang mendesak, terpaksa ditimbun menjadi permukiman penduduk. Bahan timbunan untuk permukiman diambil dari batu karang. Nampaknya sampai saat ini untuk penimbunan pondasi bangunan penduduk, jalan umum lingkungan dan antar dusun masih menggantungkan bahan batu karang. Sebab bahan timbunan dari batu kali dan lainnya tidak

tersedia di desa ini. Oleh karena itu, kelestarian terumbu karang juga masih terancam meskipun ketergantungan penduduk terhadap biota laut termasuk yang hidup di terumbu karang telah sangat menurun. Mereka telah banyak yang beralih ke usaha budi daya rumput laut. Makin sedikit penduduk yang mempunyai mata pencaharian utama dari penangkapan biota laut. Panangkapan ikan hanya sekedar untuk konsumsi sendiri sebagai lauk pauk. Dengan adanya kasus penggunaan GT untuk pupuk rumput laut dan kondisi musim yang membuat arus laut lambat telah membuat pertumbuhan lumut sangat cepat dan ikan tidak mau lagi memakan lumut. Sehingga akhir-akhir makin jarang ikan yang mau berkeliaran di dalam area tanaman rumput laut.



Gambar 4.3

Penggunaan kayu bakau untuk bahan bakar memasak mengancam pelestarian hutan *mangrove*, Kojadoi, 2008



Gambar 4.4

Penggunaan batu karang untuk pondasi rumah dan jalan lingkungan mengancam pelestarian terumbu karang, Kojadoi, 2008

Di Desa Namangkewa dan sekitarnya potensi sumber daya pesisir dan laut yang ada adalah terumbu karang dan biota laut, sementara tanaman bakau yang diharapkan berperan sebagai pelindung pantai sudah habis. Akhir-akhir ini penduduk yang memiliki usaha budi daya rumput laut di kawasan sekitar Namangkewa makin meningkat. Hal ini dimungkinkan tekanan terhadap biota laut termasuk yang di kawasan terumbu karang menurun. Dengan tidak adanya pelindung pantai, seperti tanaman bakau di pantai sekitar Desa Namangkewa pemukiman penduduk dan bangunan di pesisir mengalami kerusakan. Tahun terakhir (2007)

pernah terjadi ombak laut besar dan telah merusak kantor desa, Pos Kamla dan kantor COREMAP serta perumahan penduduk yang kebetulan dibangun tidak jauh dari pantai. Masalah lingkungan lain yang ada di perairan depan Desa Namangkewa adalah adanya endapan lumpur (pelumpuran) dari sungai-sungai yang bermuara di Teluk Maumere. Hal ini akibat penggundulan/ penebangan kayu yang ada di sekitar sungai terutama di bagian hulu. Endapan lumpur tersebut telah mencemari terumbu karang dan mencemari tanaman rumput laut di perairan Teluk Maumere.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Program COREMAP Fase I di Desa Kojadoi dan Namangkewa sudah masuk sejak tahun 1999/2000 dan berakhir pada tahun 2003. Berbagai masalah dan keberhasilan telah muncul di desa-desa kajian. Program tersebut kemudian dilanjutkan pada COREMAP Fase II yang berlangsung dari tahun 2004 – 2009. Pada saat kajian dilakukan (pertengahan tahun 2008) COREMAP Fase II telah menginjak tahun yang ke empat. Beberapa program kegiatan telah dilakukan, namun juga banyak program yang belum berjalan karena adanya beberapa masalah dan kendala.

Mengenai implementasi program COREMAP Fase II di Desa Kojadoi dan Namangkewa sampai pertengahan tahun 2008 belum berjalan sebagaimana mestinya. Namun kegiatan pembedakan LPSTK dan pembentukan Pokmas-Pokmas sudah dilakukan pada tahun 2006 (di Kojadoi bulan November 2006 dan di Namangkewa bulan Januari 2006). Penyusunan RPSTK baik di Kojadoi dan Namangkewa telah dilakukan November 2007 serta telah disosialisasikan pada Desember 2007. Pembentukan Pokmas-Pokmas sudah dilakukan tahun 2007, namun sebagian besar Pokmas tersebut belum mempunyai kegiatan yang maksimal. Hal tersebut disebabkan berbagai kendala seperti : masih kurangnya pelatihan-pelatihan untuk kegiatan Pokmas, belum turunnya dana operasional dan belum cairnya dana bergulir untuk penguatan modal usaha dari COREMAP Fase II.

Kegiatan COREMAP Fase II yang pertama direalisasikan adalah berupa program *Village Grant*. Program tersebut menggunakan dana tahun anggaran 2007. Program tersebut khusus untuk membantu pembangunan fisik desa yang sesuai dengan aspirasi penduduk. Masing-masing desa mendapat bantuan sebesar Rp 75

juta. Realisasi penggunaan dana *Village Grant* tersebut di Kojadoi pada awal 2008 yang digunakan untuk membangun MCK, sarana air bersih dan mesin listrik. Hasil dari kegiatan pembangunan fisik dari COREMAP Fase II ini pada saat kajian dilakukan telah dapat dirasakan oleh sebagian penduduk Desa Kojadoi. Dalam tahun anggaran yang sama (2007) COREMAP Fase II juga memberikan dana Rp 10 juta untuk membangun pondok informasi. Realisasi penggunaan dan pembangunan pondok informasi di Kojadoi pada awal tahun 2008. Namun perlengkapan pondok informasi (inventaris meja, kursi, buku-buku, pamlet) masih sangat kurang. Sedangkan program yang lain yang lain termasuk Pokmas-Pokmas baru dibentuk dalam COREMAP Fase II belum ada kegiatan, kecuali Pokmaswas yang secara mandiri sudah mulai ada kegiatan pengawasan DPL.

Sebagaimana di Desa Kojadoi, program COREMAP Fase II yang telah direalisasikan dari program *Village Grant* yang dananya dari tahun anggaran 2007. Program tersebut juga berupa pembangunan fisik, namun jenis pembangunannya berupa pembuatan bak penampungan air bersih dan pipanisasi air bersih. Jumlah dana yang dikucurkan juga sebanyak Rp 75 juta. Sampai pertengahan 2008 pembangunan bak penampungan air sudah dibangun, sementara pipanisasi belum selesai. Oleh karena itu, hasil pembangunan fisik yang berupa bak penampungan dan pipanisasi air bersih sampai saat kajian dilakukan belum bisa dinikmati oleh penduduk. Kemudian mengenai pondok informasi pada awal 2008 di Desa Namangkewa sudah terbangun. Namun perlengkapan pondok informasi masih sangat kurang juga. Kemudian Pokmas-Pokmas juga sudah terbentuk namun belum ada kegiatan yang dilakukan.

Realisasi kegiatan program COREMAP Fase II tersebut apabila dilihat dari pendapatan dengan membandingkan kajian tahun 2006 dengan tahun 2008 dapat dikatakan belum berhasil. Kegiatan program COREMAP Fase II yang berkaitan pengembangan ekonomi belum ada. Selanjutnya pendapatan rumah tangga secara umum selama 2 tahun terakhir (2006-2008) justru telah mengalami penurunan, baik di Desa Kojadoi maupun di Desa Namangkewa. Penurunan tersebut utamanya dipengaruhi oleh penurunan

pendapatan dari usaha budi daya rumput laut. Usaha budi daya rumput laut merupakan kegiatan UEP andalan dari program COREMAP yang selama ini telah menunjukkan keberhasilannya. Namun pendapatan dari budi daya rumput laut tersebut ternyata mengalami penurunan drastis pada 12 bulan terakhir (2007/2008). Hal tersebut disebabkan karena pengaruh musim yang tidak kondusif dan hama tanaman rumput laut yang melanda kawasan Teluk Maumere setahun terakhir. Adanya hama tersebut telah menurunkan hasil panen dan pendapatan rumah tangga nelayan dalam satu tahun terakhir.

Mengenai pengetahuan/pemahaman tentang COREMAP bagi penduduk Desa Kojadoi sudah cukup baik, hampir semua penduduk telah memahami. Sebagian besar dari mereka pernah terlibat dalam kegiatan COREMAP dan merasakan manfaat setelah adanya COREMAP. Hal tersebut cukup mereka rasakan setelah adanya kegiatan pengembangan usaha budi daya rumput laut. Meskipun pada satu tahun terakhir sedang dilanda bencana hama tanaman rumput laut yang mengakibatkan turunnya pendapatan rumah tangga.

Di Namangkewa menunjukkan gambaran yang berbeda, sebagian penduduk belum memahami tentang COREMAP. Sebagian besar dari mereka tidak pernah terlibat dalam kegiatan COREMAP dan merasakan manfaat dari program COREMAP. Sebagian penduduk kurang peduli terhadap COREMAP karena kegiatan ekonomi mereka tidak ada kaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya laut. Sebagian besar dari mereka sumber mata pencariannya dari usaha di darat. Namun demikian ada sebagian penduduk Desa Namangkewa yang bertempat tinggal jauh dari pantai juga dimasukkan sebagai anggota Pokmas. Mereka sebetulnya juga perlu diberikan pemahaman yang luas tentang COREMAP dan program-programnya. Mengingat kerusakan terumbu karang di Teluk Maumere di samping oleh penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, juga disebabkan oleh adanya sedimentasi (endapan lumpur). Material sedimentasi tersebut dibawa air sungai ketika banjir terjadi. Dalam hal ini peran khusus anggota Pokmas dan penduduk pada umumnya yang tinggal di sekitar sungai di

Namangkewa harus juga disadarkan untuk ikut melestarikan hutan atau tanaman pelindung di sekitar sungai.

Rata-rata pendapatan perkapita baik di Desa Kojadoi maupun di Desa Namangkewa, baik untuk tahun 2006 maupun tahun 2008 masih berada di atas garis kemiskinan. Namun rata-rata pendapatan rumah tangga sampel pada tahun 2006-2008 secara umum justru terjadi penurunan, baik di Desa Kojadoi maupun di Desa Namangkewa. Di Kojadoi terjadi penurunan dari Rp 756.503,-/ bulan menjadi Rp 624.245,-/ bulan atau terjadi penurunan sebesar 10,1 persen. Sementara di Namangkewa mengalami penurunan dari Rp 1.115.437,- menjadi Rp 850.324,- atau terjadi penurunan 14,5 persen. Faktor penyebab penurunan rata-rata pendapatan rumah tangga tersebut sangat dipengaruhi oleh penurunan pendapatan dari kegiatan usaha budi daya rumput laut. Di mana pada tahun terakhir (2007/2008) tanaman rumput laut sedang dilanda bencana hama. Sehingga hasil panen pada tahun terakhir sangat menurun, akibatnya pendapatan rumah tangga usaha rumput laut sangat menurun.

5.2. Rekomendasi

Dari beberapa permasalahan yang terkait dengan implementasi program COREMAP, pemahaman dan keterlibatan dalam program COREMAP dan perkembangan pendapatan rumah tangga di daerah kajian ada beberapa alternatif saran/ rekomendasi yang dapat dikemukakan, yakni :

- Berbagai kegiatan COREMAP termasuk Pokmas belum banyak kegiatannya, karena masih menunggu dana operasional dan dana bergulir untuk penguatan modal usaha belum dicairkan sampai saat kajian dilakukan. Oleh karena itu, mengingat program COREMAP Fase II segera akan berakhir (tahun 2009), maka seyogyanya dana-dana tersebut segera dicairkan dan diberikan kepada anggota Pokmas yang membutuhkan. Dengan demikian diberikan pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang memadai untuk menunjang usaha ekonomi produktif. Namun juga diperlukan adanya pendampingan dalam pengelolaan/

manajemen usaha (dari penanaman sampai panen dan pemasaran) agar setelah modal usaha kembali tetap ada peningkatan hasil usaha, agar tidak kembali lagi seperti sebelum mendapat pinjaman dana bergulir. Bagi penduduk Desa Kojadoi dan Namangkewa terutama untuk meningkatkan kembali pendapatan rumah tangga mereka yang pada tahun terakhir sempat terpuruk. Bagi Kojadoi dan Namangkewa pembuatan kembali tanda-tanda DPL harus segera dilakukan, agar para nelayan terutama nelayan luar tidak sembarangan memasuki wilayah DPL.

- Perlu meningkatkan pemahaman tentang COREMAP dan program-programnya bagi penduduk Desa Namangkewa, khususnya yang telah masuk dalam anggota Pokmas dan penduduk pada umumnya. Meskipun mereka tidak tinggal di pinggir pantai, namun tinggal di sekitar sungai yang airnya mengalir ke Teluk Maumere mereka diharapkan ikut menjaga pelestarian hutan/ tanaman pelindung di sekitar sungai agar tidak terus terjadi penggundulan lahan, erosi tanah sekitar sungai. Sehingga ketika hujan tiba, tidak terjadi banjir dan tidak membawa material-material dan tidak menghasilkan endapan di pantai yang berpotensi mencemari serta merusak terumbu karang dan tanaman rumput laut yang selama ini telah dirasakan.
- Pendapatan rumah tangga di daerah kajian (Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa) dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan disebabkan penurunan penghasilan dari usaha rumput laut sebagai akibat terserang hama tanaman. Program COREMAP di masa mendatang harus mampu membantu para rumah tangga usaha budi daya rumput laut untuk mengatasi hama. Dalam hal ini diperlukan adanya kajian/penelitian yang mendalam terkait dengan hama tanaman rumput laut. Di samping itu, perlu diperhatikan lembaga pemasaran untuk memasarkan produksi rumput laut. Dalam hal ini peran koperasi (seperti Koperasi Koja Jaya di Desa Kojadoi) harus dikembangkan dan menjadi contoh untuk memasarkan produksi rumput laut. Dalam hal ini penting agar harga rumput laut tidak dipermainkan oleh para tengkulak yang akan merugikan para petani. Hal-hal tersebut sangat perlu

mengingat banyak rumah tangga di dua desa penelitian sudah sangat menggantungkan hidupnya dari budi daya rumput laut, agar penghasilan rumah tangga dari usaha budi daya rumput laut dapat meningkat lagi. Kemudian juga perlu diupayakan bahan/obat pembrantas hama yang ramah lingkungan. Ketergantungan rumah tangga nelayan ke usaha budi daya rumput laut, telah membantu program pelestarian terumbu karang karena mereka sudah tidak lagi mengganggu wilayah terumbu karang. Usaha budi daya ikan di rumpon dan penangkapan ikan di bagan berjalan dapat terus dikembangkan, karena tidak merusak kawasan terumbu karang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda dan BPS Kabupaten Sikka (2007)
Sikka Dalam Angka 2006/2007. Maumere: BPS Kabupaten Sikka.
- BPS (2007)
Peta Indeks Kecamatan per Desa 2007: Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jakarta: BPS.
- BPS Kabupaten Sikka (2007)
Kecamatan Kewapante Dalam Angka 2006/2007. Maumere: BPS Kabupaten Sikka.
- BPS Kabupaten Sikka (2007)
Kecamatan Maumere Dalam Angka 2006/2007. Maumere: BPS Kabupaten Sikka.
- CRITC – COREMAP FASE II – LIPI (2007)
Monitoring Ekologi Sikka. Jakarta: COREMAP Fase II – LIPI.
- COREMAP AusAID bekerja sama dengan masyarakat Kojadoi (2003) *Rencana Kerja – Desa Koja Doi*. Maumere: COREMAP Fase I Kabupaten Sikka.
- COREMAP – LIPI (2006)
Studi Baseline Ekologi Perairan Maumere Kabupaten Sikka. Jakarta: COREMAP Fase II – LIPI.
- CV Konindo (2006)
Laporan Akhir Penelitian Tingkat Kabupaten: Survey Kondisi Terumbu Karang Kabupaten Sikka 2006. Maumere: CRITC – COREMAP Fase II – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka.

- Daliyo, Soewartoyo, YB Widodo dan John Haba (2007)
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP FASE II: Kasus Kabupaten Sikka. Jakarta: CRITC – COREMAP Fase II – LIPI.
- Dir. Jen. Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP (2005)
'Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang'
 ----- (2007)
'Penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK)'.
 ----- (2007a)
'Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat COREMAP Fase II'
- Lute, Maria Margaretha (2007)
Dokumen Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) Desa Kojadoi Kecamatan Alok Timur. Maumere: COREMAP Fase II Kabupaten Sikka.
- Lute, Maria Margaretha (2007)
Laporan Pelaksanaan Kegiatan PRA (Participatory Rural Appraisal) Desa Kojadoi Kecamatan Maumere. Maumere: COREMAP Fase II Kabupaten Sikka.
- Pare, Paulus (2007)
Dokumen Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) Program COREMAP Fase II Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante. Maumere: COREMAP Fase II Kabupaten Sikka.
- Pemerintahan Desa Kojadoi (2005)
Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan: Desa Kojadoi Kecamatan Maumere Tahun 2005. Maumere: Pemerintahan Desa Kojadoi.
- Pemerintahan Desa Namangkewa (2006)
Profil Desa Namangkewa Kecamatan Kewapante Tahun 2006. Maumere: Pemerintahan Desa Namangkewa.

PMU – COREMAP Kab. Sikka (2005)

‘Gambaran Umum Desa Pesisir Binaan COREMAP Fase I dan Calon Binaan COREMAP Fase II di Kab. Sikka, dalam Base Line Studi dilakukan PMU – COREMAP Kab. Sikka bekerjasama dengan Konsultan Jasa Patria Nusa Perkasa.

PT Patria Jasa Nusaprakarsa (2005)

Laporan Akhir Survey Sosial Ekonomi (Baseline Study) di Kabupaten Sikka. Maumere: COREMAP Fase II Kabupaten Sikka.

Suharsono (2005)

www.COREMAP.or.id

Yayasan Kasih Insani (2006)

Laporan Pemantauan Kondisi Terumbu Karang Kabupaten Sikka Tahun 2006. Maumere: CRITC – COREMAP Fase II – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka.

Yayasan Pengembangan Perikanan Rakyat (2005)

Laporan Kegiatan Sosialisasi Program COREMAP Tingkat Desa (20 Desa Binaan COREMAP Fase II Kabupaten Sikka). Maumere: COREMAP Fase II Kabupaten Sikka.

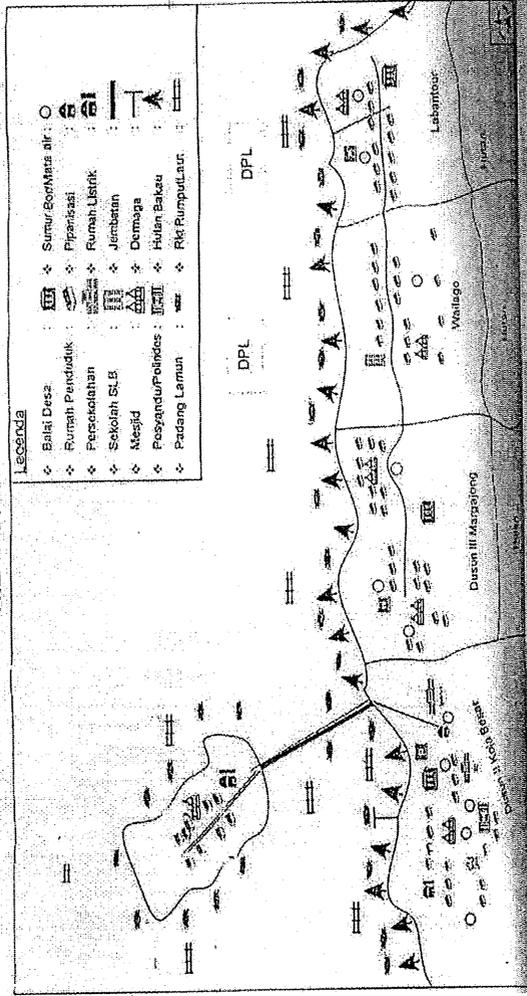
Yayasan Spektranusa (2006)

Laporan Kegiatan Survey Cepat tentang Sosial Ekonomi pada 34 Desa/Kelurahan Binaan COREMAP Fase II. Maumere: COREMAP Fase II Kabupaten Sikka.

LAMPIRAN

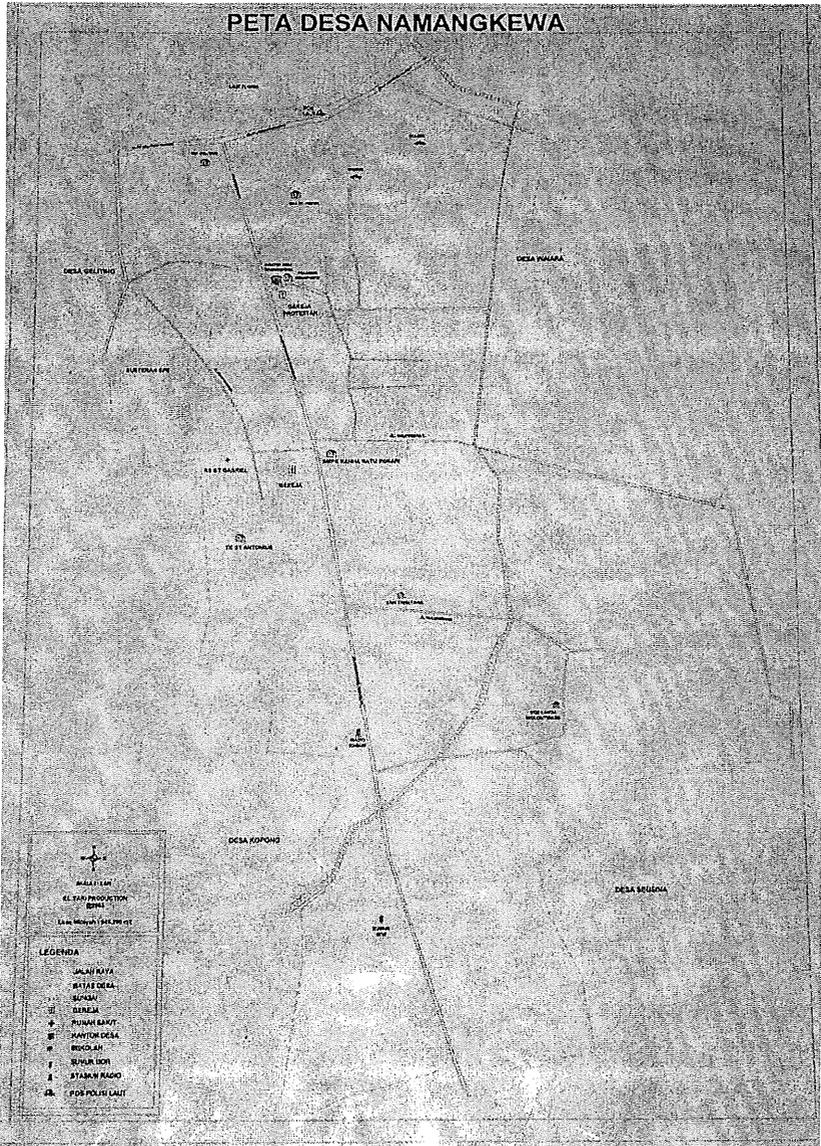
Lampiran 1:

PETA WILAYAH KOJA DOI



Sumber: Lute, 2007.

Lampiran 2:



Sumber: Pemerintahan Desa Namangkewa, tanpa tahun

Lampiran 3: Kalender Musim Desa Kojadoi

Kegiatan/ Peristiwa	Bulan	Partisipasi		Masalah	Potensi
		L	P		
1. Budidaya rumput Laut	3-9	xxx	xxx	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang produktif pada bulan 10, 11 dan 12 - Lemah dalam proses pengolahan - Menjadi putih dan rontok - Penyakit ais-ais - Angin dan gelombang 	<ul style="list-style-type: none"> - Arealnya luas dan cocok - Tenaga kerja - Bibit cukup - Ada sarana pendukung - Ada tenaga penyuluh dari DKP
2. Penangkapan ikan	4-12	xxx	x	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil tangkapan kurang - Lokasi penangkapan jauh - Alat penangkapan kurang memadai, masih berupa pancing dengan sampan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kerja - Pemasaran terjamin - Lahan
3. Berkebun					
a. Pembersihan Lahan	8-10	xxx	xxx	<ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan garapan terbatas - Kekurangan alat 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kerja - Lahan
b. Penanaman	11-12	xx	x	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bibit 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tenaga kerja
c. Panen	3-5	xxx	xxx	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil panen tidak cukup - Tidak diberi pupuk - Bukan bibit unggul 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tenaga

Kalender Musim Desa Kojadoi (lanjutan)

Kegiatan/ Peristiwa	Bulan	Partisipasi		Masalah	Potensi
		L	P		
4. Hujan	1-4			- Curah hujan	
5. Angin dan Gelombang	1-2 6-7			- Nelayan tidak bisa melaut - Merusak rumput laut	
6. Abrasi	1-2			- Merusak rumah penduduk yang berbatasan langsung dengan pantai - Pohon pelindung pantai banyak yang rusak	
7. Surut jauh	10-11			- Merusak rumput laut	

Sumber: Lute, 2007

Lampiran 4:

Tabel 3.2.1.
Pengetahuan Responden Tentang COREMAP,
Desa Kojadoi, 2008

Pengetahuan	Persen
(1)	(2)
1. Mengetahui adanya COREMAP : • Ya • Tidak Jumlah (N)	100,0 0,0 100,0 (100)
2. Mengetahui adanya kegiatan penyelamatan terumbu karang : • Ya • Tidak Jumlah (N)	98,0 2,0 100,0 (100)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

Lampiran 5:

Tabel 3.2.2.

Pengetahuan dan Keterlibatan Responden dalam Kegiatan COREMAP,
Desa Kojadoi, 2008

No.	Kegiatan COREMAP	Pengetahuan	Keterlibatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang : <ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak Jumlah (N)	96,0 4,0 100,0 (100)	67,7 32,3 100,0 (96)
2.	Perlindungan/pengawasan pesisir dan laut : <ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak Jumlah (N)	95,0 5,0 100,0 (100)	63,2 36,8 100,0 (95)
3.	Pembentukan lembaga pengelola sumber daya terumbu karang (LPSTK) : <ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak Jumlah (N)	71,0 29,0 100,0 (100)	40,8 59,2 100,0 (71)
4.	Pelatihan dan/atau pendampingan untuk UEP:		
	a. Pelatihan : <ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak Jumlah (N)	71,0 29,0 100,0 (100)	49,3 50,7 100,0 (71)
	b. Pendampingan : <ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak Jumlah (N)	60,0 40,0 100,0 (100)	58,3 41,7 100,0 (60)

5.	Penyusunan rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK) :		
	• Ya	63,0	50,8
	• Tidak	37,0	49,2
	Jumlah (N)	100,0 (100)	100,0 (63)
6.	Kegiatan kelompok masyarakat (Pokmas):		
	a. Pokmas Konservasi :		
	• Ya	62,0	33,9
	• Tidak	38,0	66,1
	Jumlah (N)	100,0 (100)	100,0 (62)
	b. Pokmas UEP :		
	• Ya	82,0	61,0
	• Tidak	18,0	39,0
	Jumlah (N)	100,0 (100)	100,0 (82)
	c. Pokmas Perempuan/Jender :		
	• Ya	66,0	30,3
	• Tidak	34,0	69,7
	Jumlah (N)	100,0 (100)	100,0 (66)
	d. Pokmas Lainnya (Koperasi, Pokmaswas) :		
	• Ya	25,0	32,0
	• Tidak	75,0	68,0
Jumlah (N)	100,0 (100)	100,0 (25)	
7.	Lainnya (LKM / Lembaga Keuangan Mikro) :		
	• Ya	1,0	100,0
	• Tidak	99,0	0,0
	Jumlah (N)	100,0 (100)	100 (1)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

Lampiran 6 :

Tabel 3.2.3.

Distribusi Reponden Menurut Pengetahuan, Sumber Informasi, Keterlibatan dan Manfaat Kegiatan Dalam COREMAP, di Desa Kojadoi

Keterangan	Pemilihan jenis usaha yang tidak merusak TK (%)	Pemberian dana bergulir/ kredit untuk mengembangkan UEP (%)	Pelatihan dan bimbingan tentang ketrampilan untuk meningkatkan usaha (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengetahuan ttg kegiatan :			
Ya	92,0	96,0	81,0
Tidak	8,0	4,0	19,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(100)	(100)	(100)
Sumber informasi tentang kegiatan :			
Fas/Motivator/Pengurus COREMAP	95,7	93,8	90,1
Kep/aparat desa/dusun/RW/RT	-	-	1,2
Pimpinan informal desa/pulau/dusun	-	-	-
Anggota masy terlibat COREMAP	4,3	5,2	8,6
Anggota masy. Lain	-	1,0	-
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(92)	(96)	(81)
Keterlibatan dalam kegiatan :			
Ya	79,3	76,0	58,0
Tidak	20,7	24,0	42,0
Jumlah	100	100	100
(N)	(92)	(96)	(81)
Manfaat kegiatan :			
Ya	100,0	100,0	100,0
Tidak	0,0	0,0	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(73)	(73)	(47)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

Lampiran 7 :

Tabel 3.2.4.
Pengetahuan dan Keterlibatan Responden mengenai Jenis Usaha yang Pernah Dilakukan COREMAP di Desa Kojadoi, 2008

Jenis Usaha	Pengetahuan	Keterlibatan	Manfaat Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perdagangan/warung :			
Ya	53,1	21,2	100,0
Tidak	46,9	78,8	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(98)	(52)	(11)
Budi daya: kerambah ikan/ udang/kepiting/biota laut lain (termasuk rumput laut) :			
Ya			
Tidak	98,0	82,3	98,7
Jumlah	2,0	17,7	1,3
(N)	100,0	100,0	100,0
	(98)	(96)	(79)
Perikanan tangkap: pembelian armada dan alat tangkap :			
Ya	17,3	64,7	100,0
Tidak	82,7	35,3	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(98)	(17)	(11)
Ternak ayam/bebek/ itik/ kambing/lele/babi :			
Ya	32,7	39,4	100,0
Tidak	67,3	60,6	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(98)	(33)	(13)
Pembuatan makanan/kue/ minyak kelapa :			
Ya	33,7	40,6	100,0
Tidak	66,3	59,4	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(98)	(32)	(13)

Pengolahan hasil laut/ikan asin/asap/pindang/kerupuk			
Ya	19,4	31,6	100,0
Tidak	80,6	68,4	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N	(98)	(19)	(6)
Kerajinan/souvenir :			
Ya	11,2	9,1	100,0
Tidak	88,8	90,9	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N	(98)	(11)	(1)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

Lampiran 8:

Tabel 3.2.1a.
Distribusi Reponden Menurut Pengetahuan tentang COREMAP,
Di Desa Namangkewa

Pengetahuan	Persentase
(1)	(2)
1. Mengetahui adanya COREMAP :	
• Ya	72,0
• Tidak	28,0
Jumlah	100,0
(N)	(100)
2. Mengetahui adanya kegiatan penyelamatan terumbu karang :	
• Ya	58,0
• Tidak	42,0
Jumlah	100,0
(N)	(100)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

Lampiran 9 :

Tabel 3. 2.2a.
Distribusi Responden Menurut Pengetahuan dan Keterlibatan dalam Kegiatan COREMAP Desa Namangkewa

No.	Kegiatan COREMAP	Pengetahuan	Keterlibatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang :		
	• Ya	49,0	61,2
	• Tidak	51,0	38,8
	Jumlah (N)	100,0 (100)	100,0 (49)
2.	Perlindungan/pengawasan pesisir dan laut :		
	• Ya	38,0	55,3
	• Tidak	62,0	44,7
	Jumlah (N)	100,0 (100)	100,0 (38)
3.	Pembentukan lembaga pengelola sumber daya terumbu karang (LPSTK) :		
	• Ya	23,0	56,5
	• Tidak	77,0	43,5
	Jumlah (N)	100,0 (100)	100,0 (23)
4.	Pelatihan dan/atau pendampingan untuk UEP:		
	a. Pelatihan :		
	• Ya	19,0	73,7
	• Tidak	81,0	26,3
	Jumlah (N)	100,0 (100)	100,0 (19)
	b. Pendampingan :		
• Ya	11,0	63,6	
• Tidak	89,0	36,4	
Jumlah (N)	100,0 (100)	100,0 (11)	

5.	Penyusunan rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK) :		
	• Ya	15,0	73,3
	• Tidak	85,0	26,7
	Jumlah (N)	100,0 (100)	100,0 (15)
6.	Kegiatan kelompok masyarakat (Pokmas):		
	a. Pokmas Konservasi :		
	• Ya	10,0	50,0
	• Tidak	90,0	50,0
	Jumlah (N)	100,0 (100)	100,0 (10)
	b. Pokmas UEP :		
	• Ya	15,0	46,7
	• Tidak	85,0	53,3
	Jumlah (N)	100 (100)	100,0 (15)
	c. Pokmas Perempuan/Jender :		
• Ya	15,0	46,7	
• Tidak	85,0	53,3	
Jumlah (N)	100,0 (100)	100,0 (15)	

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Lampiran 10 :

Tabel 3.2.3a.
Distribusi Responden Menurut Pengetahuan, Sumber Informasi,
Keterlibatan dan Manfaat dalam Kegiatan COREMAP
Desa Namangkewa

Keterangan	Pemilihan jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif (UEP) masyarakat	Pelatihan dan bimbingan tentang ketrampilan untuk meningkatkan usaha
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengetahuan :			
Ya	31,0	27,0	17,0
Tidak	69,0	73,0	83,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(100)	(100)	(100)
Sumber informasi :			
-Fas/Motiv/Peng. COREMAP	77,4	70,4	70,6
-Aparat desa/kampung /RT/RW	9,7	7,4	23,5
-Pimpinan informal	-	-	-
-Peserta COREMAP	6,5	11,1	-
-Masy. Lain	3,2	11,1	-
-Lainnya	3,2	-	5,9
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(31)	(27)	(17)
Keterlibatan :			
Ya	51,6	25,9	52,9
Tidak	48,4	74,1	47,1
Jumlah	100,0	100,0	100
(N)	(31)	(27)	(17)
Manfaat kegiatan :			
Ya	100,0	100,0	66,7
Tidak	0,0	0,0	33,3
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(16)	(7)	(9)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Lampiran 11:

Tabel 3.2.4a.
Distribusi Responden Menurut Pengetahuan dan Keterlibatan mengenai
Jenis Usaha yang Pernah Dilakukan COREMAP
di Desa Namankewa

Jenis Usaha	Pengetahuan	Keterlibatan	Manfaat Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perdagangan/warung :			
Ya	36,6	6,7	100,0
Tidak	63,4	93,3	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(41)	(15)	(1)
Budi daya: kerambah ikan/ udang/kepiting/biota laut lain (termasuk rumput laut)			
Ya	22,0	44,4	100,0
Tidak	78,0	55,6	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(41)	(9)	(4)
Perikanan tangkap seperti pembelian armada dan alat tangkap :			
Ya	17,1	57,1	100,0
Tidak	82,9	42,9	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(41)	(7)	(4)
Ternak ayam/bebek/ itik/ kambing/lele/babi :			
Ya	29,3	33,3	100,0
Tidak	70,7	66,7	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(41)	(12)	(4)
Pembuatan makanan/kue/ minyak kelapa :			
Ya	26,8	9,1	100,0
Tidak	73,2	90,9	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100
(N)	(41)	(11)	(1)

Pengolahan hasil laut/ikan asin/asap/pindang/kerupuk			
Ya	14,6	50,0	100,0
Tidak	85,4	50,0	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(41)	(6)	(3)
Kerajinan/souvenir :			
Ya	9,9	0,0	-
Tidak	90,2	100,0	-
Jumlah	100,0	100,0	-
(N)	(41)	(4)	-
Lainnya :			
Ya	4,9	100,0	50,0
Tidak	95,1	0,0	50,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(41)	(2)	(2)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

Lampiran 12 :

Tabel 4.1.
Komposisi Penduduk Sampel Menurut Umur,
Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008
(Persentase)

Umur	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Kojadoi)	Kawasan Daratan (Namangkewa)	Jumlah
(1)	(3)	(5)	(7)
0 – 4	9,8	8,2	8.9
5 – 9	11,3	13,1	12.3
10 – 14	9,0	11,7	10.5
15 – 19	9,5	13,1	11.5
20 – 24	10,8	7,6	9.0
25 – 29	9,0	5,0	6.8
30 – 34	10,1	5,6	7.6
35 – 39	5,7	8,2	7.1
40 – 44	7,2	5,4	6.2
45 – 49	3,9	9,7	7.1
50 – 54	4,9	3,6	4.2
55 – 59	3,1	2,2	2.6
60 – 64	2,1	1,6	1.8
65 +	3,6	4,8	4.3
Jumlah (N)	100,0 (388)	100,0 (497)	100,0 (885)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II,
Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Lampiran 13 :

Tabel 5.1.
Distribusi Penduduk Sampel menurut Lapangan Pekerjaan Utama,
Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008
(Persentase)

Lapangan Pekerjaan Utama	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Kojadoi)	Kawasan Daratan (Namangkewa)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Perikanan tangkap	0,9	25,9	12,9
Perikanan budidaya (rumput laut)	91,4	1,5	48,1
Pertanian pangan	0,5	29,8	14,6
Perdagangan	2,3	13,7	7,7
Jasa	2,7	8,3	5,4
Industri pengolahan/ rumah tangga	1,4	10,7	5,9
Transportasi, bangunan, pariwisata	0,9	9,3	4,9
Lainnya	-	1,0	0,5
Jumlah (N)	100,0 (221)	100,0 (205)	100,0 (426)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Lampiran 14 :

Tabel 5.2
Distribusi Penduduk Sampel menurut Jenis Pekerjaan Utama,
Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008
(Persentase)

Jenis Pekerjaan Utama	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Kojadoi)	Kawasan Daratan (Namangkewa)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Nelayan tangkap	0,5	18,5	9,2
Nelayan bantu usaha perikanan tangkap	0,5	7,3	3,8
Nelayan budidaya rumput laut	42,1	1,5	22,5
Nelayan bantu usaha budidaya rumput laut	49,3	-	25,6
Petani pangan	0,5	29,8	14,6
Pedagang ikan/rumput laut	0,5	5,4	2,8
Pedagang kebutuhan rumah tangga	1,8	6,8	4,2
Tenaga jasa	2,7	8,8	5,6
Tenaga industri rumah tangga (minyak kelapa)	0,5	5,4	2,8
Tenaga industri rumah tangga (tenun ikat)	0,5	3,4	1,9
Tenaga industri rumah tangga (kue)	0,5	2,0	1,2
Tenaga kasar	0,9	4,4	2,6
Lainnya	-	6,8	3,3
Jumlah (N)	100,0 (221)	100,0 (205)	100,0 (426)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Lampiran 15 :

Tabel 5.3.
Distribusi Penduduk Sampel menurut Status Pekerjaan Utama,
Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008 (Persentase)

Status Pekerjaan Utama	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Kojadoi)	Kawasan Daratan (Namangkewa)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	5,9	41,0	22,8
Berusaha dengan ART	40,7	18,5	30,0
Buruh/karyawan/PNS/TNI	19,5	16,6	18,1
Pekerja keluarga tanpa upah/ membantu orang tua	33,9	23,9	29,1
Jumlah (N)	100,0 (221)	100,0 (205)	100,0 (426)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008.

Lampiran 16 :

Tabel 6.1
Distribusi Penduduk Sampel menurut Lapangan Pekerjaan Tambahan,
Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008 (Persentase)

Lapangan Pekerjaan Tambahan	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Kojadoi)	Kawasan Daratan (Namangkewa)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Perikanan tangkap	26,5	11,3	20,7
Perikanan budidaya (rumput laut)	31,9	16,9	26,1
Pertanian pangan	19,5	18,3	19,0
Pertanian tanaman keras/perkebunan	4,4	19,7	10,3
Peternakan	-	5,6	2,2
Perdagangan	1,8	5,6	3,3
Jasa	1,8	-	1,1
Industri pengolahan/ rumah tangga	3,5	16,9	8,7
Transportasi, bangunan, pariwisata	10,6	5,6	8,7
Jumlah (N)	100,0 (113)	100,0 (71)	100,0 (184)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Lampiran 17 :

Tabel 6.2.
Distribusi Penduduk Sampel menurut Jenis Pekerjaan Tambahan,
Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008 (Persentase)

Jenis Pekerjaan Tambahan	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Kojadoi)	Kawasan Daratan (Namangkewa)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Nelayan tangkap	24,8	8,5	18,5
Nelayan bantu usaha perikanan tangkap	1,8	2,8	2,2
Nelayan budidaya rumput laut	3,5	11,3	6,5
Nelayan bantu usaha budidaya rumput laut	28,3	5,6	19,6
Petani pangan	19,5	18,3	19,0
Petani tanaman keras/perkebunan	4,4	19,7	10,3
Peternak	-	5,6	2,2
Pedagang ikan/rumput laut	1,8	1,4	1,6
Pedagang kebutuhan rumah tangga	-	2,8	1,1
Tenaga jasa	1,8	-	1,1
Tenaga industri pengolahan (pembuatan perahu)	0,9	-	0,5
Tenaga industri rumah tangga (minyak kelapa)	-	2,8	1,1
Tenaga industri rumah tangga (tenun ikat)	1,8	14,1	6,5
Tenaga industri rumah tangga (kue)	0,9	-	0,5
Tenaga kasar	10,6	2,8	7,6
Lainnya	-	4,2	1,6
Jumlah (N)	100,0 (113)	100,0 (71)	100,0 (184)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Lampiran 18 :

Tabel 6.3
Distribusi Penduduk Sampel menurut Status Pekerjaan Tambahan,
Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka, 2008
(Persentase)

Status Pekerjaan Tambahan	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Kojadoi)	Kawasan Daratan (Namangkewa)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	38,1	46,5	41,3
Berusaha dengan ART	14,2	26,8	19,0
Buruh/karyawan/PNS/TNI	16,8	4,2	12,0
Pekerja keluarga tanpa upah/ membantu orang tua	31,0	22,5	27,7
Jumlah (N)	100,0 (113)	100,0 (71)	100,0 (184)

Sumber: Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

Lampiran 19 :

**Data dan Informasi Kemiskinan
Kabupaten Sikka (Provinsi Nusa Tenggara Timur), 2005 dan 2006**

Data/Informasi	Kabupaten Sikka		Provinsi NTT	
	2005	2006	2005	2006
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	54.400	59.600	1.171.200	1.273.900
Persentase penduduk miskin (%)	19,91	21,69	28,19	29,34
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	97.115	144.485	98.263	137.147
Distribusi persentase penduduk miskin menurut pendidikan yang ditamatkan:				
- < SD	65,54	73,01	53,73	61,12
- Tamat SD/SLTP	27,09	25,08	37,34	34,80
- SLTA +	7,37	1,90	8,93	4,08
Persentase penduduk miskin 15 tahun + menurut status bekerja:				
- Tidak bekerja	5,65	6,54	7,33	7,01
- Bekerja di sektor informal	86,84	82,92	88,26	88,68
- Bekerja di sektor formal	7,51	10,54	4,41	4,31
Persentase penduduk miskin 15 tahun + menurut sektor bekerja:				
- Tidak bekerja	5,65	6,54	7,33	7,01
- Bekerja di sektor pertanian	68,53	58,39	79,56	79,52
- Bekerja bukan di sektor pertanian	25,82	35,07	13,11	13,47
Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan:				
- Miskin	74,09	70,34	76,35	75,24
- Tidak miskin	64,30	64,32	64,49	62,77
- Miskin + tidak miskin	65,94	65,29	66,54	65,07
Angka melek huruf:				
- 15 tahun +	87,47	90,06	84,95	86,50
- 15-24 tahun	95,94	96,37	95,25	95,05
- 15-55 tahun	93,19	93,87	90,63	91,30

Lampiran 20 :

Data dan Informasi Kemiskinan... (lanjutan)

Data/Informasi	Kabupaten Sikka		Provinsi NTT	
	2005	2006	2005	2006
Angka partisipasi sekolah:				
- 7-12 tahun	95,43	95,97	94,30	94,00
- 13-15 tahun	69,05	74,14	75,74	77,24
Persentase penduduk bekerja menurut jam kerja per minggu:				
- < 42 jam	77,41	83,66	73,07	82,11
- < 36 jam	62,01	69,65	56,50	58,42
- < 15 jam	7,17	9,51	7,47	7,23
Persentase penolong persalinan pertama oleh tenaga kesehatan	73,78	72,99	39,00	37,66
Perentase penolong persalinan terakhir oleh tenaga kesehatan	75,83	74,84	45,26	43,38
Persentase pengguna alat KB	63,37	56,88	61,00	50,20
Persentase balita yang telah diimunisasi:				
- BCG	96,60	96,32	89,22	91,56
- DPT	95,24	95,22	87,61	89,73
- Polio	95,24	95,96	88,73	91,61
- Campak/morbili	83,32	88,57	76,32	82,73
- Hepatitis B	87,40	94,84	73,59	82,74
Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih:				
- Miskin	34,24	36,12	33,12	37,52
- Tidak miskin	42,55	48,96	46,28	45,95
- Miskin + tidak miskin	40,79	45,64	42,52	44,08
Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama:				
- Miskin	48,94	67,77	64,22	68,24
- Tidak miskin	70,89	73,32	76,66	76,21
- Miskin + tidak miskin	66,25	71,88	73,11	74,44

Sumber: BPS (2007), *Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2006 (Buku 2: Kabupaten)*

Lampiran 21 :

Kasus Nelayan Tangkap

Lainta, nelayan Desa Kojadoi berusia 31 tahun, satu isteri satu anak adalah nelayan tangkap dengan pukat, pakai kapal motor, tingkat pendidikan hanya tamat SD. Perhitungan pendapatan dari tangkap ikan di laut :

1. *Musim gelombang kuat :*
 - *Pengeluaran : beli solar sekali melaut 1liter = Rp 5.000,-*
 - *Jumlah melaut per bulan yang menghasilkan = 3 hari*
 - *Pendapatan kotor sekali melaut Rp 55.000,-*
 - *Pendapatan bersih sebulan = Rp 55.000,- - Rp 5.000,- =Rp 50.000,00 x 3 hari = Rp 150.000,-*
2. *Musim pancaroba :*
 - *Pengeluaran : beli solar sekali melaut 1liter = Rp 5.000,-*
 - *Jumlah melaut per bulan yang menghasilkan = 5 hari*
 - *Pendapatan kotor sekali melaut Rp 55.000,-*
 - *Pendapatan bersih sebulan = Rp 55.000,- - Rp 5.000,- =Rp 50.000,00 x 5 hari = Rp 250.000,-*
3. *Musim gelombang tenang :*
 - *Pengeluaran : beli solar sekali melaut 1liter = Rp 5.000,-*
 - *Jumlah melaut per bulan yang menghasilkan = 7 hari*
 - *Pendapatan kotor sekali melaut Rp 55.000,-*
 - *Pendapatan bersih sebulan = Rp 55.000,- - Rp 5.000,- =Rp 50.000,00 x 7 hari = Rp 350.000,-*

Lampiran 22 :

Kasus Pedagang/Pengumpul Rumput Laut di Kojadoi :

KS pengumpul rumput laut, usia 31 tahun, isteri usia 26 tahun belum punya anak, pendidikan SD tamat, pekerjaan lain tidak ada, memiliki satu perahu motor tempel, ukuran mesim 23 PK dan ukuran bodi 9 x 1 m dan memiliki satu sampan ukuran 7 x 0,8 m, punya rumah, TV, parabola, VCD player, kendaraan bermotor dan HP.

- *Modal usaha = Rp 32.000.000,-*
- *Membeli rumput laut kering tiap musim = 4.000 kg (4 ton)*
- *Harga pembelian per kg = Rp 8.000,- harga seluruh pembelian = Rp 8.000,- x 4.000 kg = Rp 32.000.000,-*
- *Harga penjualan per kg = Rp 9.500,- harga seluruh penjualan = Rp 9.500,- x Rp 4.000 kg = Rp 38.000.000,-*
- *Keuntungan = Rp 38.000.000,- - Rp 32.000.000,- = Rp 6.000.000,-*
- *Biaya – biaya :*
 1. *Biaya transportasi = Rp 200 / kg*
 2. *Biaya sortir = Rp 50 / kg*
 3. *Biaya pengemasan = Rp 50 / kg*
 4. *Buruh pikul = Rp 100 / kg*
 5. *Konsumsi = Rp 50 / kg*

Total biaya per kg = Rp 450 / kg biaya seluruhnya Rp 450 x 4.000 kg = Rp 1.800.000,-

- *Keuntungan bersih / pendapatan pengumpul sekali penjualan = Rp 6.000.000 – Rp 1.800.000 = Rp 4.200.000,-*
- *Keuntungan/pendapatan dalam satu tahun (3 kali penjualan) = Rp 4.200.000,- x 3 = Rp 12.600.000,- atau Rp 1.050.000,- per bulan*

Lampiran 22a :

Kasus Bagan Berjalan di Desa Namangkewa:

Investasi untuk pembuatan bagan berjalan, pada saat sekitar Rp 10 juta per unit, dipergunakan untuk membuat/membeli :

- 2 unit perahu sampan
- 1 unit mesin perahu
- 2 pukot
- 3 lampu peromaks

Jenis ikan yang dijaring utamanya ikan teri, campuran lainnya ikan layang, ikan rembang (merah). Sekali tarik pukot kondisi bagus mencapai 20 ember. Semalam kondisi bagus dapat tarik pukot 6 – 10 kali (Informan Muh H nelayan bagan berjalan).

Lampiran 23 :

Kasus Nelayan Budi Daya Rumput Laut :

LOJ nelayan budi daya rumput laut usia 40 tahun, pendidikan tamat SD, pekerjaan tambahan tukang kayu, isteri usia 38 tahun dan punya usaha kios, anak satu orang usia 16 tahun. LOJ termasuk nelayan budi daya yang agak berhasil.

- *Lahan budi daya rumput laut = 120 bentang, dari sejumlah lahan tersebut untuk persediaan bibit = 50 bentang dan untuk dijemur (dijual) = 70 bentang*
- *Produksi per bentang 7 kg per musim tanam, produksi untuk 70 bentang = 490 kg (basah).*
- *Hasil penjualan per musim tanam = 490 kg x Rp 5.000,- = Rp 2.450.000,-*
- *Biaya dikeluarkan :*
 1. *Seleksi bibit 70 x Rp 1.250 / bentang = Rp 87.500,-*
 2. *Membersihkan tali 70 x Rp 1.000 / bentang = Rp 70.000,-*
 3. *Biaya bahan baker 15 liter x Rp 5.000 = Rp 75.000*
- Total biaya per musim tanam = Rp 232.500,-*
- *Penghasilan bersih sekali tanam = Rp 2.450.000 – Rp 232.500 = Rp 2.217.500,-*
- *Penghasilan bersih per tahun (6 kali tanam dan panen) = Rp 2.217.500 x 6 = Rp 13.305.000 atau Rp 1.108.750 / bulan.*

